

Harga
Jawa Rp. 8000,-
Luar Jawa Rp. 11.000,-

Edisi 233
13 - 26 Rabiul Akhir 1440 H
21 Desember 2018 - 3 Januari 2019

Media ^{t a b l o i d} **umat**

mediaumat.news

Memperjuangkan Kehidupan Islam



Lagi, **DAI** **DIKRIMINALISASI**

Habib Bahar bin Smith:
Lebih Baik Busuk di Penjara daripada Minta Maaf

■ FOKUS

Pembantaian Papua,
Kriminal Biasa?

■ MANCANEGERA

Aksi 812 Malaysia
Tolak ICERD

■ WAWANCARA

Gus Nur,

Pimpinan Ponpes Tahfidz Qur'an
dan Majelis Dzikir Karomah 13 Palu

Banci itu Kata Lain dari Pengecut!



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Salam Perjuangan!

Alhamdulillah, kami bisa hadir kembali di ruang baca Anda di penghujung tahun 2018 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi seluruh aktivitas kita selama ini dan mengampuni dosa-dosa kita. Aamiin

Pembaca yang dirahmati Allah, waktu begitu cepat berlalu. Rasanya baru kemarin ganti tahun, beberapa saat lagi waktu sudah menginjak tahun yang baru. Benarkah saat kiamat sudah dekat?

Bila kita menyimak hadits Nabi SAW, tanda itu tak bisa dipungkiri. Beliau bersabda: *Kiamat tidak akan terjadi hingga ilmu dicabut, sering terjadi gempa, dan waktu terasa cepat*" (HR: al-Bukhari)

Dalam hadits lain riwayat Ahmad disebutkan: *"Dari Abu Hurairah, Nabi SAW berkata: Kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berlalu begitu cepatnya. Satu tahun terasa seperti satu bulan, satu bulan seperti seminggu, satu minggu seperti satu hari, dan satu hari seperti satu jam, dan satu jam seperti kedipan mata."* (HR: Ahmad)

Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud dari hadits di atas ialah hilangnya keberkahan hidup. Sehingga, hari berlalu begitu saja tanpa ada manfaatnya. Harta yang diperoleh tidak ada gunanya, habis begitu saja. Dan seterusnya.

Pembaca yang dirahmati Allah, perjalanan waktu tak bisa dihentikan. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengisi waktu itu. Sungguh sangat rugi bila waktu berlalu begitu saja sementara kita tak mendapatkan tambahan pahala sedikit pun. Dan celaka bila waktu berlalu sementara kita

bertambah dosanya. *Na'udzubillahi min dzalik.*

Bergantinya waktu bisa menjadi pengingat, bahwa kita sudah menjalani sekian lama di dunia. Jatah setiap orang makin berkurang. Nah, apa yang harus kita perbuat di sisa jatah umur kita ke depan?

Maka, sungguh beruntung bagi siapa saja yang bisa mengisi hidup dengan ketaatan kepada Allah SWT. Tapi tak cukup hanya bagi dirinya sendiri, lebih dari itu menjadi penerus risalah baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir ini adalah perbuatan mulia. Tentu, ini tidak mudah karena akan berhadapan dengan tantangan, hambatan, dan ancaman sebagaimana dulu Nabi SAW menyampaikan risalah kepada manusia.

Namun perlu diingat janji Allah SWT bahwa siapa yang menentang agama-Nya, Allah akan menolaknya dan mengokohkan kedudukannya. Inilah jalan keberuntungan ke depan bagi siapa saja, orang-orang beriman.

Sebaliknya, siapa saja yang menentang agama-Nya, Allah pasti akan menghinkannya dan menumbangkan kedudukannya. Ingat, dulu bagaimana para pembesar mulai dari Fir'aun, Namrudz, dan lainnya, hancur kedudukannya karena menentang Allah SWT.

Oleh karena itu, momentum perubahan waktu seharusnya menjadi saat introspeksi bagi siapa saja, apakah penguasa atau rakyat biasa, sudah sejauh mana sumbangsihnya kepada agama ini.

Mumpung masih ada waktu, jangan sampai kita menyesal kemudian. Padahal saat itu tak ada lagi kesempatan kita untuk beramal.

Selamat membaca!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

MEDIA PEMBACA

BPJS Makin Menghimpit

Kehidupan rakyat kian hari kian terhimpit. Pasalnya proses pemaksaan akan terjadi pada peserta BPJS. Rakyat harus menanggung negara dengan terpaksa. Jika tidak, mereka akan kehilangan hak untuk mendapatkan layanan negara. Inilah bentuk kezaliman rezim saat ini.

Masyarakat Indonesia yang menjadi peserta BPJS kesehatan akan dipaksa menanggung utang. Bahkan, bakal ada sanksi bagi peserta BPJS kesehatan yang menunggak iuran tiap bulan. Sanksinya berupa tidak akan bisa memperpanjang SIM, STNK, hingga paspor.

Jaminan sosial adalah kewajiban pemerintah dan merupakan hak rakyat. Sedangkan dalam asuransi sosial rakyat sebagai peserta yang harus membayar premi sendiri. Di samping itu akad dalam asuransi termasuk akad batil dan diharamkan oleh syariah Islam.

Inilah ketika negara menggunakan sistem kapitalisme, maka negara tidak mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Karena kewajiban menjamin kesehatan ditanggung sendiri oleh rakyat. Berbeda dengan Islam, kewajiban menjamin kesehatan, pendidikan, keamanan serta kebutuhan dasar rakyat yang lain ada di tangan negara bukan rakyat. **Ana K. Tulungagung. +6285735494xxx**

Kebebasan Semu

Demokrasi yang mengklaim memberikan kebebasan atas nama HAM, nyatanya merupakan standar ganda dan hipokrisi semata. Tak semua orang diberikan ruang kebebasan yang sama sebagaimana janji-janji manis demokrasi. Terbukti dengan adanya kebijakan pemerintah yang meng-sweeping PNS yang sembarangan komen atau memberi like di media sosial. Bagi pelaku, sanksinya tak main-main, karena akan dijatuhi hukuman disiplin berat.

Tentu topik utama yang menjadi objek sweeping berkaitan dengan politik, terlebih politik yang kontra rezim saat ini.

Padahal, bisa jadi, komen ataupun kritik yang dilayangkan rakyat mengandung solusi dan kebaikan untuk negeri. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa kekuasaan dalam demokrasi sejatinya adalah tirani minoritas atas mayoritas, sehingga "suara rakyat suara Tuhan" hanyalah slogan kosong. Kebebasan hanyalah untuk mereka yang sejalan dengan kepentingan pemilik demokrasi yakni Barat itu sendiri. **Faizah Khoirunnisa A. Tulungagung. +6289608072xxx**

Rezim Makin Panik

Hari ini, rezim makin panik. Melihat para penerus dakwah Rasulullah makin lama makin kuat. Padahal sebelum-sebelumnya mereka sudah berupaya keras membendung dan menutupi kita dengan berbagai cara. Mulai dari perang opini, sampai cara-cara kasar dan berbagai ketidakadilan lainnya. Sekiranya hingga dakwah ini segera terhenti atau masyarakat tidak lagi mempercayai kita.

Namun apa faktanya? Bendera Al Liwa' dan Ar Royah kini dikenal, dikibarkan, bahkan dibela ramai-ramai oleh tangan-tangan umat Islam. Ini adalah sebuah opini umum (Ra'yul 'amm) yang sangat nyata. Dan kini, tinggal tugas kita selanjutnya adalah mewujudkan kesadaran umum (Wa'yul 'amm) akan ideologi di tengah-tengah umat. Sehingga pertolongan Allah SWT akan segera menjadi keniscayaan. Sebagaimana Dia telah menolong Rasulullah SAW di Makkah menuju peradaban Islam di Madinah. **Mayuzuri. Lumajang. +6285235247xxx**

Setelah Sekian Lama

Hasil memang tidak akan mengkhianati proses. Setelah sekian lama para pengemban dakwah berjuang tiada henti, akhirnya umat pun kembali mengenali bendera tauhid yang suci, berbondong-bondong mendatangi aksi, rela berkorban sampai mati demi membela kalimat ilahi. Walau begitu, umat Muslim harus

LBH Pelita Umat menggelar diskusi *Islamic Lawyers Forum (ILF) Edisi 6: OPM Makar! Kenapa HTI yang Dibubarkan?* Ahad (16/12) di Jakarta. Hadir sebagai pembicara Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen; Eka Jaya (Sekjen LBH Bang Japar); Azam Khan (lawyer), Panca Putra Kurniawan (lawyer), KH Mohammad Asrori Muzakki (ulama) dan host Ahmad Khozinudin (Ketua LBH Pelita Umat).[]



MediaUmat tabloid
mediaumat.news
Memperjuangkan Kehidupan Islam

SMS/WA Berlangganan: 0857 1713 5759

Penerbit: Pusat Kajian Islam dan Peradaban. **Penasihat Hukum:** Achmad Michdan, Ahmad Khozinudin. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Farid Wajidi. **Pemimpin Perusahaan:** Anwar Iman. **Redaktur Pelaksana:** Humaidi. **Redaksi:** Joko Prasetyo, Fatih Sholahuddin, Ghifari Ramadhan, Zulia Ilmawati, Kholda Naajiyah. **Desain dan Pracetak:** Senyum Adv. **Keuangan:** Ibnu Soetrisno. **Marketing:** Muhammad Ihsan. **Sirkulasi:** Yudi. **Iklan:** Haris. **Alamat Redaksi dan Iklan:** Gedung Menara 165 Lantai 4, JTB Simatupang Kav 1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan. **Telp:** 021-50812002 ext 767 **Fax:** 021-50812003. **Email:** pembaca.tabloidmu@gmail.com. **Email Iklan:** iklan.tabloidmu@gmail.com. **Email Marketing:** marketing.tabloidmu@gmail.com **Hunting Pemasaran:** 085711044000, SMS: 089650202478. **Hunting Iklan:** 085717135759. **Rekening:** Bank Muamalat No Rek 9064150699 a.n Budi Darmawan.



SMS/WA Media Pembaca/Komentar untuk MU: 089634912651. Sertakan Nama dan Asal daerah.

terus berlari, memahami Islam yang lebih mendalam lagi, mewujudkan bisyarah yang selama ini dinanti yaitu tegaknya khilafah di muka bumi. **FatimahHanna. Sumedang. +6285211435xxx**

Siapa di Balik OPM

Berulang kali terjadi kejahatan yang dilakukan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang menawarkan bukan hanya dari masyarakat sipil saja bahkan dari TNI dan Polri. Kejadian yang terus berulang dan berulang tanpa ada penanganan yang serius dari pemerintah bahkan pemerintah cenderung bungkam.

Lalu siapa sebenarnya di balik OPM itu sendiri?

Banyak pihak yang berkepentingan di balik itu semua, karena memang Papua (Irian Jaya) yang mempunyai potensi kekayaan alam yang melimpah.

Banyak muatan politik di dalamnya. Banyak kepentingan yang mengharuskan rakyat sipil Papua menjadi korban karena memang semuanya dipelihara dan seakan dibiarkan, demi melanggengkan penjajahan terhadap negara ini dan mengambil seluruh kekayaan alam Indonesia.

Dengan melihat fakta di atas menunjukkan bahwa negara gagal melindungi dan mengayomi rakyatnya dari serangan kelompok bersenjata yang akan memisahkan diri. Ini semua akibat sistem yang diterapkan yaitu demokrasi sekuler yang membiarkan kelompok bersenjata bebas berkeliaran di wilayah negeri ini. Untuk itu mari kita berjuang agar khilafah islamiyah bisa segera tegak di muka bumi ini, insya Allah dengan khilafah seluruh umat bisa terlindungi.

Wallahu 'alam. **Nur'aliyah. Kab Bandung. +6283148312xxx**

Merawat Spirit Bela Tauhid

Terharu bangga sekaligus takjub tentu diliputi rasa syukur luar biasa kepada Allah SWT menyaksikan jutaan bendera Al-Liwa dan Ar-Rayah berkibar pada aksi "Reuni 212" aksi bela tauhid, Ahad 2 Desember 2018. Mereka yang datang dari berbagai daerah di Indonesia bahkan dari luar Indonesia dengan semangat dan bangga mengusung dan mengibarkan bendera Al-Liwa dan Ar-Rayah.

Mungkin tidak terbayangkan Al-Liwa dan Ar-Rayah di negeri ini yang konsisten diusung dan disosialisasikan oleh HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dalam berbagai aksinya, bisa dikibarkan oleh jutaan umat. Padahal HTI sendiri selalu dipersekusi, diintimidasi, dan dikriminalisasi bahkan dicabut BHP-nya. Namun nyawa Hizbut Tahrir bukan terletak pada BHP-nya, namun pada ideologi (mabda) Islam yang hidup di dalam setiap dada para aktivisnya.

Semangat dan spirit bela tauhid harus terus dirawat agar terus berkembang dan tumbuh di tengah-tengah umat. Spirit bela tauhid ini harus mewujudkan dalam visi sekaligus misi hidup seluruh umat manusia. Aturan-aturan dan syariah Allah SWT harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, tak hanya dalam unsur ibadah namun juga unsur ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, hukum, peradilan dan sebagainya. Dan kita siapkan aksi bela tauhid selanjutnya untuk mendorong dan menuntut penguasa untuk segera menerapkan syariah Islam secara kaffah. **Etty. Cipicung.**

Semangat 212

Menjadi pengemban dakwah yang mengajak kembali kepada syariah Allah adalah pilihan. Meski dengan risiko yang berat tapi inilah jalan hidup para nabi.

Dalam perjalanan dakwah kadangkala ada kekecewaan, mungkin akumulasi dari berbagai rasa dari ujian- ujian di dalam perjalanan dakwah, itu manusiawi. Rasulullah SAW pun kadangkala bersedih, namun Allah senantiasa menghibur beliau. Tugas pengemban dakwah adalah menyampaikan, sedangkan hidayah adalah hak Allah yang memberikan kepada seseorang.

Baru saja berlalu aksi 212 yang begitu penuh dengan antusiasme persatuan umat. Menyaksikannya sangat memberikan energi bagi kelanjutan dakwah. Spirit 212, spirit melanjutkan mempersiapkan umat menyongsong kemenangan Islam. **Leyla, Bogor. +6287873485xxx**



Refleksi 2018: Dunia Islam Butuh Khilafah

Tahun 2018 berlalu. Sepanjang tahun ini, penderitaan umat Islam, masih terjadi di mana-mana, seperti tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kawasan dunia Islam dirundung penderitaan. Palestina, negeri yang diberkahi, terus menerus dibombardir penjajah Zionis Yahudi. Hampir setiap hari, ada saja nyawa umat Islam yang melayang, darah umat Islam yang tertumpah. Rumah-rumah umat Islam dihancurkan untuk perluasan pemukiman Yahudi, penghuninya diusir.

Zionis Yahudi pun semakin brutal karena dukungan tanpa batas negara-negara Barat. Simbol dukungan itu diperkuat dengan perpindahan kedubes Amerika secara resmi dari Tel Aviv ke Yerusalem, pada 14 Mei 2018. Perpindahan ini terjadi di tengah aksi unjuk rasa di Jalur Gaza yang memakan puluhan korban jiwa. Amerika dengan arogannya tanpa memedulikan penguasa negeri Islam yang lemah, menunjukkan dukungannya terhadap kezaliman Zionis Israel. Sementara penguasa negeri Islam, terutama negara-negara Arab, hanya beretorika, tidak berbuat banyak dan nyata.

Penderitaan kaum Muslimin di Suriah pun menjadi catatan pilu dunia Islam. Sejak pecah konflik tujuh tahun yang lalu. Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia terdapat 364.792 orang telah tewas, sepertiga dari mereka adalah warga sipil. Di tahun 2018 ini, jumlah korban jiwa naik 13 ribu orang dalam enam bulan terakhir. Berdasarkan keterangan lembaga pengawasan di Inggris, jumlah korban tewas ini termasuk para pejuang, pejabat, dan staf medis. Posisi umat Islam pun semakin sulit dan berbahaya setelah menguatnya rezim Bashar Assad belakangan ini. Kota-kota yang menjadi basis perlawanan dibombardir.

Apa yang terjadi di Suriah, tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Aksi damai rakyat Suriah pada tahun 2011, sebagai imbas dari Arab Spring, disikapi dengan brutal rezim Bashar. Berbagai penangkapan, penyiksaan hingga pembunuhan terjadi. Rakyat Suriah pun melakukan perlawanan bersenjata. Keinginan mereka untuk menurunkan diktator Bashar dan menerapkan syariah Islam, sangat mengkhawatirkan Amerika Serikat. Apalagi, perang Suriah menjadi magnet kuat bagi mujahidin di seluruh dunia untuk jihad fi sabilillah, untuk membela saudaranya yang ditindas.

Awalnya, Amerika berupaya mencari pengganti Bashar Assad, namun gagal. Kelompok oposisi yang dibentuk Amerika pun gagal. Akhirnya Amerika mengubah kebijakan untuk tetap mempertahankan Bashar sekaligus menghancurkan umat Islam yang menghendaki tegaknya Islam. Caranya dengan membiarkan Iran dan Hizbullah masuk, serta Rusia.

Di Yaman, perang yang sesungguhnya merupakan perpanjangan kepentingan politik Amerika Serikat dan Inggris juga telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Menurut Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia, (WFP), David Beasley, Yaman terancam bencana kemanusiaan terburuk di dunia selama tempo 100 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dimilikinya jumlah warga yang berada di ambang kelaparan diperkirakan mencapai 12-14 juta jiwa atau hampir 50 persen dari total penduduk Yaman, negara yang terletak di Jazirah Arab.

Serangan koalisi Saudi dukungan Amerika Serikat telah membunuh banyak rakyat sipil termasuk anak-anak dan wanita. Jumlah korban tewas di Yaman diperkirakan mencapai puluhan ribu. Organisasi non-pemerintah Menurut Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), korban tewas di Yaman enam kali lebih tinggi daripada data yang dirilis oleh PBB. Dilaporkan dari *Sputniknews*, 15 Desember 2018, ACLED mengklaim 60.000 orang tewas secara langsung oleh konflik. Angka ini tidak termasuk, 85.000 anak-anak yang kemungkinan meninggal kelaparan dalam tiga tahun terakhir.

Penderitaan di tempat lain juga masih terjadi di Turkistan Timur. Umat Islam harus menghadapi kekejaman rezim Cina Komunis nyaris sendiri tanpa bantuan dari negeri-negeri Islam. Berbagai cara dilakukan oleh Cina komunis untuk mencabut akar Islam dari bumi Turkistan Timur yang merupakan negeri Islam yang dicaplok Cina. Umat Islam dicuci otaknya untuk melupakan Islam dalam kamp-kamp yang seperti penjara besar. Dilarang untuk beribadah, dipaksa makan daging babi dan minum alkohol. Umat Islam juga disiksa dengan cara yang sangat sadis, wanita-wanita Muslimah diperkosa. Rezim keji ini pun memaksakan ide-ide komunis pro-Cina, mengambil bayi-bayi dan anak-anak dari orang tua Muslim yang masih hidup.

Penderitaan yang sama juga menimpa umat Islam Rohingya di Myanmar, Pattani di Thailand, dan berbagai belahan dunia lain seperti Afrika.

Semua ini terjadi karena di tengah-tengah umat Islam tidak ada kekuatan politik yang sifatnya global untuk menghentikan kekejaman pihak-pihak yang memusuhi umat Islam terutama yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu penjajahnya. Hal ini tidak akan berlangsung nyaris tanpa perlawanan, kalau di tengah umat Islam ada negara khilafah yang menyatukan umat Islam.

Negara khilafah *ala minhajinnubuwwah* akan melindungi setiap nyawa umat Islam di berbagai kawasan dunia. Sekaligus, mengenyahkan penguasa-penguasa boneka di negeri Islam yang telah berkhianat dengan bersekutu kepada penjajah. Intinya, umat Islam membutuhkan khilafah *ala minhajin nubuwwah* untuk menyelesaikan berbagai kemelut di negeri Islam. Sementara itu, tegaknya kembali khilafah *ala minhajin nubuwwah* adalah merupakan janji Allah dan Rasul-Nya. Yang dituntut dari kita adalah ikut berjuang untuk menegakkannya. Allahu Akbar! **farid wadjudi**

Redaksi menunggu opini dan pertanyaan Anda terkait perkembangan peristiwa terbaru di sekitar kita. Kirimkan komentar Anda via HP yang tercantum atau ke pembaca.tabloidmu@gmail.com

Memimpikan KEADILAN

Keadilan adalah harapan setiap insan. Namun harapan itu akan hilang bila penegak keadilan tak memfungsikan dirinya sebagai pengadil, yang bertindak adil, dan tidak memihak.

Inilah yang tampak ketika penegak hukum memperlakukan kalangan Islam yang dianggap berseberangan dengan penguasa. Dengan kasat mata, aparat penegak hukum condong kepada kepentingan rezim. Maka, ketika ada pelaporan terhadap tokoh umat Islam, kepolisian begitu sigap memprosesnya. Sebaliknya, laporan yang datang dari kalangan Islam bagi orang-orang yang menghina Islam tak diproses atau kalau pun diproses begitu lambat.

Kesan sangat kuat bahwa aparat penegak hukum menjadi alat kekuasaan tak bisa dihindari. Masyarakat sudah sangat mengerti, apalagi dengan berkembangnya media sosial. Jejak digital tak bisa dihapus.

Fenomena yang terjadi ini pun bukan sebuah kebetulan. Tokoh Islam dikriminalkan, tokoh pendukung rezim diselamatkan. Umat Islam masih menyimpan daftar mereka yang menghina dan menistakan Islam dan tokoh Islam. Para penista ini masih berkegiatan dan malah memproduksi bahan kampanye untuk petahana.

Kasus Habib Bahar bin Smith menjadi sebuah catatan. Ia berceramah dua tahun lalu. Videonya sudah viral. Ceramahnya lugas dengan kritik pedas kepada rezim penguasa. Eh, sekarang dikriminalisasi. Diperiksa segera dan langsung jadi tersangka.

Lagi-lagi kaum Muslim bertanya, ke mana kasus Victor Laiskodat, Ade Armando, Deny Siregar, Abu Janda, dan Cornelis? Apakah mereka kebal hukum? Kepolisian tak pernah menjelaskan ini kepada rakyat. Bukankah mereka itu sebenarnya dibayar oleh rakyat?

Kasus Habib Bahar ini menambah rentetan ulama, tokoh, dan dai Islam yang masuk jerat hukum karena ceramahnya. Rupanya ceramah mereka-mereka membuat panas kuping penguasa dan pendukungnya. Terlebih menjelang pelaksanaan Pilpres 2019.

Bila aparat penegak hukum terus menerus memosisikan dirinya seperti itu maka mereka akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Kalau hukum sudah tidak dipercaya, masyarakat bisa bertindak semaunya sendiri. Ini sangat berbahaya.

Maka perlu sebuah paradigma baru dalam proses hukum ini agar keadilan benar-benar bukan sekadar mimpi. Setiap warga negara harus diposisikan sama kedudukannya dalam hukum. Nah, ini hanya bisa terwujud di tangan orang yang amanah. Tapi itu tak cukup, perlu sebuah sistem hukum yang adil, yang bebas dari kepentingan manusia. Sistem hukum ini harus datang dari luar manusia. Maka sistem hukum dari Zat Yang Maha Adil-lah yang tepat bagi manusia.

Inilah yang dulu dipraktekkan oleh baginda Nabi SAW. Menarik pesan Rasulullah SAW, *"Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya"* (HR. Bukhari dan Muslim).

Tentu kita rindu keadilan sejati seperti itu. Keadilan yang didasarkan keimanan dan dilaksanakan orang yang amanah. Kapan keadilan seperti ini akan terwujud? **emje**

HUKUM TAJAM KE LAWAN, TUMIPUL KE KAWAN



Satu per satu tokoh-tokoh yang bersuara lantang kepada rezim Jokowi diancam bui. Setelah Alfian Tanjung berhasil dikurung di jeruji besi karena dianggap 'mengganggu' rezim dan partai berkuasa gara-gara ceramah-ceramahnya tentang Partai Komunis Indonesia (PKI), kini giliran Habib Bahar bin Smith menjadi tersangka.

Habib Bahar yang ceramahnya sangat lantang dan vulgar ini dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Jokowi Mania (Joman) La Kamarudin dan Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid. Unik-nya, barang bukti pelaporan mereka adalah rekaman video dua tahun lalu yang sudah menyebar luas di Youtube.

Pendukung setia Jokowi ini menuduh Habib Bahar telah merendahkan Presiden Jokowi. Sebab, di dalam video itu dai muda dengan warna rambut pirang ini menyebut Jokowi sebagai 'banci'. Selain itu, Habib Bahar juga dituduh melakukan kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan tentang diskriminasi ras dan etnis, serta ujaran kebencian atau *hate speech*. Sebab dalam ceramahnya

ia menyebut kata kafir dan Cina.

Menariknya, pelaporan yang dilakukan pada 28 November 2018 itu langsung ditindaklanjuti oleh Mabes Polri pada 6 November 2018. Habib Bahar diperiksa selama hampir 11 jam dan setelah itu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ini sangat cepat, mengingat laporan yang sama terhadap penghina Islam sampai sekarang belum ditindaklanjuti.

Ia dikenai Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1, dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2).

Muncul pertanyaan publik, mengapa baru sekarang Habib Bahar diadukan? Padahal, video itu sendiri sudah beredar selama hampir dua tahun.

Salah satu kuasa hukum Habib Bahar, Munarman, mengatakan, kasus ini lucu dan aneh. Ia melihat penetapan tersangka ini dipaksakan. Sebab, sebelumnya Bahar dilaporkan atas ceramahnya yang diduga mengandung

ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol negara.

Namun, laporan ini lemah karena pasal 134, pasal 136, dan pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan presiden dan wakil presiden sudah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan nomor 013-022/PUU-IV/2006.

"Pasal penghinaan presiden sudah dihapus MK. Sekarang mereka gunakan pasal 16 huruf b angka 1 UU 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras," kata Munarman seperti dikutip *Viva Sabtu* (8/12).

Munarman menyindir penetapan tersangka ini seperti upaya diskriminasi yang dilakukan pihak rezim. Ia menilai, Habib Bahar seperti terkesan sengaja dijadikan target operasi.

"Lucunya yang melakukan diskriminasi hukum justru pihak rezim. Malah Habib Bahar yang dikenakan. Sungguh aneh dunia saat ini. Terlihat sekali Habib Bahar dijadikan target operasi," jelas Munarman.

Dalam pengakuannya di hadapan massa Reuni 212 di Monas, Habib Bahar menceritakan video yang dipermasalahkan itu.

Muncul pertanyaan publik, mengapa baru sekarang Habib Bahar diadukan? Padahal, video itu sendiri sudah beredar selama hampir dua tahun.

Memang ia menyebut Jokowi banci, pengkhianat bangsa, dan pemberi janji palsu.

Ia menyebut Jokowi banci karena ketika para ulama dan habib akan menemuinya di depan Istana pada aksi 411, mereka malah diberondong dengan gas air mata. "Presidennya lari dan kabur. Saya berkata seperti itu karena ketidakrealan saya, saudara saya diperlakukan seperti itu. Karena umat Islam dizalimi. Kenapa dia saya katakan pengkhianat bangsa, karena saya tidak rela rakyat kelaparan, kehausan, di saat yang sama pemimpin hidup senang dan kenyang," tandasnya.

Makanya, ia berteriak kepada mereka yang melaporkan: "jikalau itu suatu kesalahan, demi Allah, saya Habib Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara dari pada meminta maaf," tandasnya yang disambut dengan teriakan takbir oleh massa Reuni 212.

Ia berpesan agar kaum Muslim tidak pernah memadamkan api perjuangan seperti yang ia lakukan selama ini.

Saat wawancara dengan *TVOne*, dai asal Manado ini menjelaskan, kafir yang dimaksud da-

lam ceramahnya adalah orang asing. Sedangkan Cina yang dianggap rasial adalah negara Cina. Ia lalu mengungkapkan betapa banyak perusahaan asing dan perusahaan Cina yang beroperasi di Indonesia untuk merampok kekayaan alam Indonesia.

Ia menegaskan bahwa yang disampaikan bukan urusan pribadi. "Andaikan presiden itu adalah bapak saya, saya tetap sampaikan dia itu banci. Saya bukan urusan pribadi. Kita tidak akan membenarkan yang salah, walaupun itu keluarga sendiri. Kita tidak akan menyalahkan yang benar walaupun itu datang dari orang yang tidak sepaham. Kebenaran kita ambil, kebaikan kita ambil," tandasnya.

Terkait perlakuan polisi, Habib nyentrik ini menyebut bahwa penyidikannya berlaku profesional. Ia tak menyalahkan mereka karena bisa jadi mereka hanya disuruh, bukan atas kemauannya sendiri. Sebab, di atas mereka ada pemimpin, demikian seterusnya.

Menambah Daftar

Sebelum Habib Bahar, penetapan tersangka dialami oleh Gus Nur yang punya nama asli Sugi

Nur Raharja Kamis (22/11) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur atas kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui videonya yang dinilai telah menghina elemen Nahdlatul Ulama (NU), kyai, dan Banser.

Atas perbuatannya ini, Gus Nur disangkakan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan acaman hukuman empat tahun penjara.

Gus Nur lalu menceritakan soal musabab munculnya video yang kemudian jadi pangkal dalam perkara ini. Ia menyebut mulanya video itu ditujukan untuk akun media sosial 'Generasi Muda NU' yang menyebut dirinya adalah radikal.

"Akun itu membuat status 20 daftar ustadz wahabi dan radikal, isinya Tengku Zulkarnain, Ustadz Abdul Somad, dan saya masuk di situ, saya *counter* itu akun," katanya.

Nah video itu kata Gus Nur, hanya ditujukan untuk akun itu dan bukan untuk dimaksudkan menghina organisasi NU. Namun, secara tiba-tiba ada orang yang melaporkannya dan menudingnya mencemarkan nama baik NU.

Cornelis, Penista yang Dilindungi

Mantan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dalam sebuah video yang viral beberapa bulan lalu menuduh kerajaan Melayu dan Islam sebagai penjajah. Dalam video berdurasi 2 menit dan 49 detik ia mengatakan: "Kita Dayak terlalu lama dijajah oleh kerajaan-kerajaan. Mulai raja-raja Majapahit, raja-raja Sriwijaya. Yang paling parah kerajaan Melayu dan Islam, bersama dengan Belanda menjajah kita berabad-abad, sehingga mental kita adalah mental hamba, bukan mental kuli."

Atas pidatonya itu Cornelis dilaporkan oleh berbagai elemen masyarakat Kalimantan Barat atas penistaan agama. Laporan itu telah masuk ke Bareskrim Mabes Polri beberapa kali. Ada dengan nomor LP/B/814/VII/2018/Bareskrim, 4 Juli 2018. Juga dilaporkan oleh Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) pada 26 Juni 2018 dengan LP/B/780/VI/2018/Bareskrim.

Cornelis pun disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 28 *juncto* Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, si penista tak diproses. Benarkah kader PDIP itu dilindungi? **emje**

Sehari sebelumnya, Gus Nur juga diperiksa di Polda Sulawesi Tengah dengan tuduhan yang sama.

Tak beberapa lama kemudian Kepolisian RI menetapkan pentolan Band Dewa19, Ahmad Dhani Prasetyo, sebagai tersangka. Dhani—demikian ia biasa disebut—disangkakan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait cuitannya di media sosial sebagai hal yang keliru alias ujaran kebencian.

Ia dilaporkan oleh mereka yang menamakan dirinya Koalisi Bela NKRI. Caleg DPR Partai Gerindra itu dituding melakukan ujaran kebencian karena menyebut kelompok penolak deklarasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya dengan kata-kata "idiot".

Dhani menyebut kasusnya banyak kejanggalan. Bagaimana ia sampai dicekal padahal ancaman hukuman hanya di bawah 5 tahun. Ia tak terima lantaran kasus ini terkesan dipaksakan.

"Yang paling parah ketika kita menyodorkan ahli ITE, juga ahli pidana, itu menyampaikan bahwa yang dilakukan Mas Dhani tidak memenuhi unsur pidana. Tapi polisi terkesan memaksakan agar kasus ini prosesnya berlanjut," kata Aldwin, kuasa hukum Dhani.

Sebelum jadi tersangka, Ahmad Dhani sudah menjadi terdakwa dalam kasus ujaran kebencian atas laporan pendukung Ahok, Jack Boyd Lapien. pada 9 Maret 2017 karena sejumlah cuitannya di Twitter.

Dalam persidangan Senin 26 Desember 2018 lalu, jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Dhani dua tahun penjara. "Terdakwa bersalah menyebar informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan terhadap kesukuan, agama, ras dan antargolongan (SARA)," kata jaksa.

Dhani menilai tuntutan jaksa

tidak jelas dan tidak tegas. Sebab dalam tuntutan, jaksa tidak menyebut kepada siapa ujaran kebencian itu ditujukan. Jika hanya menyebut 'golongan', Dhani menilai kata itu sangat abstrak. "Siapa yang saya beri ujaran kebencian? Orang Cina, orang Arab, agama Islam, agama Kristen? Gak ada," katanya.

Beda Perlakuan

Beda pengkritik rezim Jokowi dengan pendukungnya. Masyarakat melihat proses hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan. Bila kasus hukum menimpa pengkritik Jokowi, kepolisian bertindak begitu cepat. Sebaliknya, kepolisian terkesan ogah-ogahan jika yang dilaporkan adalah pendukung Jokowi.

Fakta menunjukkan, sederet kasus yang dilaporkan oleh masyarakat hingga kini tidak jelas prosesnya. Para penista agama yang berulang kali dilaporkan seperti Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, Victor Laiskodat, Cornelis, dan Sukmawati Soekarnoputri, kasusnya seperti hilang ditelan bumi. Demikian pula pembacok Hermansyah, si ahli IT, tak jelas ke mana mereka kini. Juga seorang keturunan Cina bernama Royson Jordhany yang dengan sangat jelas membuat video yang menghina Jokowi tak diapa-apakan. Padahal, videonya penuh ancaman dan penghinaan. Apakah dia bebas karena anak konglomerat?

Sementara itu, pembakar bendera tauhid di Garut, Jawa Barat, hanya dikenai hukuman sangat ringan yakni penjara 10 hari dan denda Rp 2 ribu. Banyak kalangan mempertanyakan, bagaimana mungkin penista agama hanya dipenjara seingan itu? Mereka menduga, ini karena yang bersangkutan anggota Banser—dikenal sebagai pendukung rezim. **emje**



Hukum Jadi Alat Kekuasaan

Aparat penegak hukum itu digaji dari kas negara, bukan dari kasnya Jokowi maupun kantongnya Jokowi. Seharusnya adil.

Sudah menjadi rahasia umum, hukum digunakan sebagai alat kekuasaan menggebuk lawan-lawan politik penguasa. Melalui instrumen hukum inilah tindakan rezim tersebut seolah-olah mendapatkan legitimasi.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon saat menghadiri sidang Ahmad Dhani menyebut hukum di Indonesia menjadi alat politik. Bahkan tak hanya sebagai alat politik, ia menyebut hukum Indonesia telah menjadi kekuasaan.

"Hukum itu sekarang itu hanya dipakai untuk menjadi alat politik, alat kekuasaan. Ini saya kira *message* yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, gitu," ujar Fadli.

Bukan tanpa sebab Fadli menyebut hukum telah menjadi alat politik dan kekuasaan. Ia mengungkapkan fakta bahwa banyaknya

kasus ujaran kebencian dan pelanggaran hukum yang dilaporkan pihaknya, tapi tidak diproses oleh kepolisian.

"Kasus-kasus yang kita laporkan itu banyak sekali yang melakukan penghujatan dan pelanggaran hukum itu yang tidak diproses," kata Fadli.

Ia pun menilai, kasus-kasus ujaran kebencian seperti kasus merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menakuti masyarakat. Tujuannya, agar rakyat takut menyampaikan kritikan kepada pemerintah.

"Ini hak masyarakat untuk menyampaikan pikiran dalam bentuk lisan, tulisan, apalagi sekarang melalui sosial media. Yang paling penting bertangung jawab. Dan saya kira dengan nalar yang sehat saja. Apa yang disampaikan Ahmad Dhani itu saya kira masih di dalam batas-batas koridor yang tidak melanggar hukum

gitu ya," tuturnya.

Lebih jauh ia menilai, rezim ini mengidap islamophobia, anti terhadap Islam. Mereka gagal memahami aspirasi umat Islam dan suara para ulama dan tokoh umat. Itu diperlihatkan oleh sikap penegak hukum yang tebang pilih dan tidak berjalan sesuai norma hukum.

Sementara itu Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis melihat sikap kepolisian yang tebang pilih sangat kentara. Kasus Habib Bahar, misalnya, respon kepolisian sangat cepat. Dilarikan langsung diperiksa. orang lain yang melakukan *hate speech*, penghinaan terhadap agama, bukan lagi kritik terhadap penguasa, belum diproses contoh saja seperti Abu Janda, Victor Laiskodat, Sukmawati, Ade Armando, Cornelis, dan lainnya.

"Aparat penegak hukum menjadi alat kekuasaan, bukan

lagi jadi alat negara untuk penegakan hukum. Jadi ini menjadi alat untuk menggebuk lawan-lawan penguasa, dan itu tidak fair," tegasnya.

Ia mengingatkan, aparat penegak hukum itu digaji dari kas negara, bukan dari kasnya Jokowi maupun kantongnya Jokowi. "Seharusnya adil, kalau ada siapa pun rakyat melakukan kesalahan dan harus diproses semua, itu baru adil."

Praktisi hukum Ahmad Khozinuddin mengatakan, hukum saat ini bukan panglima. Kekuasaanlah, yang menjadi panglima dan mengatur hukum. "Kita bisa lihat, hukum menjadi sangat tajam ketika mengena kepada tokoh kontra rezim. Habib Bahar, secepat kilat naik status tersangka hanya dalam hitungan beberapa hari," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat ini.

Ia menduga, Habib Bahar ditarget rezim karena selama ini dinilai kritis terhadap rezim Jokowi. Dai berambut pirang ini dalam ceramahnya memang terkesan vulgar dan berani mengkritik rezim Jokowi.

Dalam kacamata hukum, lanjut Ahmad, secara prosedur, hukum tidak diterapkan secara equal, tetapi tebang pilih. Tajam kepada tokoh kontra rezim, namun tumpul kepada para penista agama yang pro rezim. Secara substansi, kasus sumir para ulama dan tokoh Islam dipaksakan cepat naik status tersangka. HRS kasusnya sangat sumir, tapi terus diburu. Gus Nur, kasus di Polda Jatim juga sangat sumir, tapi naik pangkat menjadi tersangka. Sementara substansi kasus Victor laiskodat, Sukmawati, Abu Janda dll yang jelas delik pidana, tapi diabaikan.

Tanda Kekalahan

Fadli Zon sepakat dengan

penilaian pengamat luar negeri bahwa rezim Jokowi ini menunjukkan tanda-tanda otoritarianisme. "Ini negara, menurut saya, menuju satu sistem otoritarianisme. Oleh karena itu, kita harus mencatat semua pelanggaran-pelanggaran hukum itu. Saya kira bagus itu supaya menjadi catatan hukum kita. Nanti ada saatnya untuk mencari keadilan," tandasnya.

Menurutnya, pemerintah Jokowi sedang panik. Ia menilai, tindakan yang dilakukan pemerintah itu menjadi pertanda kalau petahana akan kalah di Pilpres 2019. Sebelumnya Fadli sering menyoroti tindakan-tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang mengkritik penguasa. Ia menyebut itu sebagai bentuk persekusi. Sedangkan terhadap para ulama dan dai yang dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga menyebarkan ujaran kebencian sebagai bentuk kriminalisasi.

"Persekusi dan kriminalisasi menunjukkan reaksi kepanikan. Wujud nyata dari tanda-tanda kekalahan," kata Fadli dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon yang ditulis, Senin (10/12/2018).

Khusus terhadap kasus Habib Bahar bin Smith yang dilaporkan karena dinilai telah menyebarkan ujaran kebencian serta menghina kepala negara dalam isi ceramahnya yang berbunyi 'Jokowi banci', Fadli menilai semua pihak harus melihat konteks yang dimaksud dalam ceramah Habib Bahar. Itu bentuk kritikan bagi pemerintah. Tapi dengan ditetapkan Habib Bahar sebagai tersangka, ia menyebut ini sebagai kriminalisasi.

"Mereka yang dikriminalisasi sebenarnya sedang di 'wisuda' menjadi pemimpin dalam perjuangan melawan kezaliman," kata Fadli. [] **emje**

Maaf, Tabok dan Gebuk Hanya bagi Lawan

Jokowi geram karena merasa dirinya difitnah sebagai anak anggota PKI. Ia mengatakan itu fitnah. Dan ia akan menabok orang yang memfitnahnya itu.

"Mau saya tabok tapi orangnya di mana?" ujar Jokowi di Lampung Tengah, Lampung, Jumat (23/11).

Sebelumnya, ia malah akan menggebuk orang yang memfitnah dirinya sebagai anak PKI. "Ini bagaimana, kadang-kadang ya jengkel tapi cari orangnya enggak ketemu-ketemu. Awas kalau ketemu, tak (saya) 'gebuk' betul itu," kata Jokowi.

Namun, mungkin karena biasa ingkar janji, Presiden Jokowi tak melakukan apa-apa ketika ada orang yang mengaku selama ini dirinyalah yang memfitnah Jokowi sebagai keturunan dan pendukung

PKI.

Orang tersebut adalah La Nyalla Mattalliti, mantan Ketua Umum PSSI. Dengan teras terang Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur ini mengakui keterlibatannya dalam menyebarkan isu PKI tersebut. Namun, bersamaan dengan pengakuan itu ia mengatakan bahwa Jokowi telah memaafkannya.

Sebelumnya, La Nyalla adalah pendukung Prabowo. Kini, ia yang sebelumnya terjerat kasus hukum ini akhirnya berpindah haluan dan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. Tak jadi *deh* ditabok dan digebuk.

Coba kalau yang mengakui ini tetap berada di kubu lawannya, pasti palu godam datang. [] **emje**



Haram Mendukung Rezim Zalim!

Ingatlah, sungguh kekuasaan dan al-Kitab akan berpisah. Karena itu janganlah kalian memisahkan dari al-Kitab.

Kaum Muslim terus menerus dijadikan sasaran ketidakadilan oleh rezim Jokowi. Belum lupa dari ingatan, bagaimana Habib Rizieq Syihab, Amir Front Pembela Islam (FPI) harus menghadapi berbagai belasan kasus hukum, termasuk ancaman pembunuhan. Hingga akhirnya Habib menyelamatkan diri ke Saudi.

Berderet aktivis dan tokoh Islam harus masuk penjara karena sikap mereka yang kritis kepada penguasa. Jonru, pegiat media sosial, harus dijebloskan ke penjara dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian di media sosial.

Alfian Tanjung, masuk penjara, karena dituduh telah menyebarkan ujaran kebencian dengan menyebut salah satu partai politik dihuni oleh para pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia beberapa kali dilaporkan. Sempat dibebaskan oleh pengadilan di Surabaya, tapi hari itu juga ia dijebloskan ke penjara karena ada laporan yang lainnya dengan tuduhan serupa.

Tamim Pardede yang namanya cukup dikenal di media sosial pun harus merasakan jeruji besi. Ia didakwa telah menyebarkan konten berbau SARA dan penghinaan terhadap pemerintahan Jokowi.

Aktivis Muslimah Asma Dewi divonis 5 bulan 15 hari penjara hanya karena menulis 'koplak' dan 'edun' di media sosial. Awalnya ia dituduh sebagai bagian dari Saracen, namun kemudian hal itu tak terbukti.

Juga bagaimana Tengku Zulkarnain, Sobri Lubis, Fahri Hamzah mendapat ancaman fisik di beberapa daerah dan pelakunya dibiarkan begitu saja. Area bandara yang seharusnya terlarang untuk aksi malah menjadi ajang unjuk senjata. Aparat diam.

Belakangan rezim mengincar dai-dai yang masih vokal

menentang pemerintah. Mereka bisa terkena berbagai ancaman hukum melalui pengaduan oleh pihak lain, yang seolah-olah bukan pemerintah. Beberapa nama penceramah telah dicoret alias terlarang untuk mengisi kajian Islam di beberapa BUMN. Bahkan kampus pun ikut-ikutan mencekal beberapa tokoh yang sebenarnya akan berbicara soal akademis.

Yang dicatat dalam sejarah umat Islam pasca reformasi adalah pencabutan SK Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Hizbut Tahrir Indonesia. Dengan tanpa mengikuti prosedur sesuai aturan yang berlaku, rezim Jokowi membubarkan HTI. Tidak sampai di situ, rezim pun mempersekusi orang-orang yang dianggap mempunyai kaitan dengan HTI.

Bahkan seolah mempunyai dendam kesumat kepada HTI dan aktifisnya, rezim terus mencegah dakwah HTI. Padahal HTI hanya menyampaikan dakwah Islam.

Rezim pun tampak mengadu domba kelompok-kelompok Islam. Satu dimusuhi, satu lagi dirangkul untuk menggebuk kelompok yang dimusuhi itu. Jadilah umat Islam yang sebelumnya rukun menjadi saling curiga. Sematan radikal, fundamentalis, ekstremis, diarahkan kepada kelompok Islam yang tidak mendukung pemerintah.

Kaum Muslim yang ingin hidup lebih islami, sering dituduh mengancam kebhinnekaan, NKRI, dan Pancasila. Mereka menggunakan kaum sekuler-liberal untuk menyerang pandangan-pandangan Islam yang hakiki.

Di luar itu, rezim ini telah membiarkan rakyat hidup dalam kesulitan. Kondisi ekonomi yang dijanjikan membaik dan meroket tak pernah terwujud. Justru masyarakat merasakan beratnya beban hidup karena naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Barang-barang impor membanjiri

pasar sehingga produk dalam negeri keok. Rezim terus mengimpor beras, garam, gula, dan lainnya sementara produk di dalam negeri pun masih ada. Keberpihakan rezim kepada rakyat terlihat terus menurun.

Itu belum ditambah dengan masuknya buruh-buruh Cina ke Indonesia. Tenaga kerja Indonesia pun harus gigit jari karena ladang mereka diserahkan kepada asing. Belum lagi rezim terus membuka investasi ugal-ugalan agar asing masuk dan bisa menguasai mayoritas saham perusahaan-perusahaan milik negara.

Di tengah keterhimpitan itu rakyat harus menanggung beban utang luar negeri yang terus membumbung tinggi. Kran utang berbunga ini harus menjadi tanggungan rakyat, padahal rakyat tak merasakan dampak penggunaan utang itu.

Haram

Tindakan rezim melanggar dan memusuhi dakwah Islam, termasuk mengkriminalisasi dan mempersekusi dai-dainya, adalah perilaku zalim. Kezaliman itu sangat sangat berbahaya bagi umat manusia. Apalagi bila pelakunya adalah pemimpin/penguasa melalui berbagai kebijakan, peraturan, hukum dan undang-undang yang mereka keluarkan.

Terlebih lagi, rezim ini dengan sangat tegas memusuhi ajaran Islam yakni ide khilafah. Padahal khilafah adalah bagian dari ajaran Islam yang termaktub di dalam Alquran dan Hadits Nabi SAW serta dinyatakan di dalam kitab-kitab para ulama dan fuqaha. Kewajiban penerapan syariah secara kaffah dan penegakan Khilafah itu merupakan pendapat seluruh ulama dari berbagai mazhab. Bahkan khilafah merupakan kesepakatan para ulama dan para

imam mazhab.

Juru bicara HTI M Ismail Yusanto menyatakan, siapa pun dari kaum Muslim haram cenderung kepada orang zalim dan kezalimannya. Sebabnya, hal itu akan menyebabkan mereka dibakar api neraka dan tidak akan diberi pertolongan (QS Hud [11]: 113).

Rasul SAW pun memberitahukan ancaman kepada siapa saja yang mendukung penguasa zalim dengan sabdanya: *Akan ada sepeninggal aku nanti para pemimpin. Siapa saja yang menemui mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman mereka, maka dia bukan bagian dariku; aku pun bukan bagian dari dirinya dan dia tidak akan menemuiku di telaga surga* (HR at-Tirmidzi).

Karena itu kaum Muslim harus tetap berpihak pada kebenaran dan keadilan. Mereka harus tetap berpegang pada ajaran Islam, pada Alquran dan as-Sun-

nah. Itulah yang lebih baik di sisi Allah SWT.

Rasul SAW bersabda: "Ingatlah, sungguh poros Islam itu berputar. Karena itu berputarlah kalian bersama al-Kitab. Ingatlah, sungguh kekuasaan dan al-Kitab akan berpisah. Karena itu janganlah kalian memisahkan dari al-Kitab. Ingatlah, sungguh akan ada atas kalian para pemimpin, jika kalian menaati mereka, mereka menyesatkan kalian, dan jika kalian menyalahi mereka, mereka memerangi kalian." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana kami berbuat?" Beliau menjawab, "Bersikaplah seperti para sahabat Isa bin Maryam. Mereka disisir dengan sisir besi dan diikat di atas kayu. Mati dalam ketaatan kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam maksiat kepada Allah." (HR ath-Thabarani, Ibnu Asakir dan Ahmad bin Mani').[] **emje**

Rezim Zalim Pasti Terguling

Sungguh kekuasaan penguasa zalim, bagaimanapun kuatnya dalam pandangan manusia, niscaya akan hancur. Sejarah para tiran sejak zaman dulu telah memberikan pelajaran dan bukti. Bagaimana kekuasaan Namrud, Fir'aun, Abrahah, Romawi dan Persia, pada akhirnya Allah hancur-leburkan.

Allah SWT pun mengancam orang-orang zalim dengan ancaman di dunia: *Lalu orang-orang zalim itu dimusnakan hingga ke akar-akarnya* (TQS al-Anam [6]: 45).

Jika pun Allah SWT tidak menindak mereka di dunia, pasti orang-orang zalim tidak akan luput dari azab-Nya di akhirat: *Janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh kaum yang zalim. Sungguh Allah memberi mereka tangguh sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak* (TQS Ibrahim [14]: 42).[] **emje**



Gus Nur,
Pimpinan Ponpes Tahfidz Qur'an
dan Majelis Dzikir Karomah 13 Palu

Banci itu Kata Lain dari Pengecut!

Satu per satu ulama, tokoh dan aktivis Islam yang berseberangan secara politik dengan rezim dikriminalisasi bahkan tak sedikit yang dipidanakan. Terbaru giliran Habib Bahar bin Smith dijadikan tersangka karena menyebut Presiden Jokowi sebagai banci, menyusul Gus Nur yang sudah dijadikan tersangka pencemaran nama baik NU beberapa pekan sebelumnya. Terkait masalah ini, wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai Gus Nur. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda dengan dijadikannya Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka ujaran kebencian karena menyebut Presiden Jokowi sebagai banci?

Inilah kemunduran yang sangat mutlak dari rezim ini. Rezim ini lebih memuliakan Abu Janda, lebih memuliakan anak Cina, lebih memuliakan liberal-liberal, Syiah-Syiah, lebih memuliakan Sukmawati, Ade Armando daripada memuliakan habib, kyai, ulama, apalagi kalau habib itu berseberangan dengan rezim ini. Berseberangan dalam arti di dalam kebenaran ya. Jadi bukan hanya Habib Bahar ya, termasuk saya juga termasuk orang yang diincar, diintimidasi.

Rezim ini lebih suka memelihara orang munafik daripada orang jujur. Lebih suka memelihara penjilat, daripada orang yang tulus.

Tapi mengapa seorang anak pengusaha Cina yang menyebut Jokowi sebagai kacungnya dan dia juga mengancam membakar rumah Jokowi tidak dijadikan tersangka?

Ya, begitulah kurang lebih. Jadi sudah berada di titik nadir sebagai jongs atau sebagai cermin bahwa sudah tidak ada nilai harga diri di depan Cina. Harga diri bangsa, harga diri negara, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, termasuk harga dirinya sendiri, sudah tidak ada.

Apakah Anda menangkap makna yang maksud sebagai "banci" itu adalah orang yang menjabat sebagai "presiden"

tetapi tidak bersikap sebagai "pemimpin" karena lebih menunjukkan seperti yang dinyatakan anak pengusaha Cina tersebut?

Ya, kurang lebih begitulah. Banci itu *kan* kata lain dari pengecut. Banci itu kata lain dari orang yang berkelamin ganda. Kelamin yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Jadi kata banci itu sudah pada titik yang paling nadir nilai seorang manusia.

Jadi Pak Presiden Jokowi sudah tidak layak untuk dihargai, dihormati, sebagai presiden dan dari berbagai macam gestur, mau bahasanya, mau sorot matanya, mau cara jalannya, apalagi kata-katanya, intonasinya, semuanya sudah seperti itu. Tidak ada nilainya.

Sebelumnya, Anda juga dijadikan tersangka dengan tuduhan mencemarkan nama baik NU...

Ya, saya ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik NU dan Banser melalui video yang tersebar. Saya diperlakukan tidak adil. Karena sebenarnya kasus saya ini tak memenuhi sejumlah unsur pidana tetapi malah dijadikan tersangka. Jadi kasus ini hanya kasus main-main yang diadadakan.

Memang duduk perkara yang sebenarnya seperti apa sih?

Video yang saya buat itu bukan untuk mencemarkan NU tetapi ditujukan untuk melawan akun media sosial 'Generasi Muda NU' yang menyebut saya radikal. Akun itu membuat status 20 daftar ustadz wahabi dan radikal, isinya Tengku Zulkarnain, Ustadz Abdul

Somad, dan saya masuk disitu, saya *counter* itu akun!

Jadi video yang saya buat, ya hanya ditujukan untuk akun itu dan bukan untuk dimaksudkan menghina organisasi NU. Namun, seperti yang saya singgung di atas, saya juga termasuk orang yang diincar, diintimidasi. Maka, secara tiba-tiba ada orang yang melaporkan saya dan memfitnah saya mencemarkan nama baik NU. Lho, padahal saya hanya melawan akun Generasi Muda NU, begitu duduk persoalannya.

Selain itu ada kejanggalan apa lagi dalam kasus ini?

Si pelapor itu tak mempunyai *legal standing*, atau tak jelas kedudukan hukumnya dalam kasus ini.

Kenapa?

Jadi begini, saya dilaporkan delik pencemaran nama baik melalui media ITE alias melanggar UU ITE oleh orang yang bernama Moh. Ma'ruf Syah. Dia mengaku sebagai Forum Pembela Kader Muda NU. Lho apa hubungannya dengan Forum Kader Muda NU? Apa hubungannya dengan kader muda NU? Jelas-jelas yang saya *counter* itu akun Generasi Muda NU. Jadi tak ada hubungannya dengan NU atau kader muda NU.

Misal ya, yang saya *counter* NU, bukan akun Generasi Muda NU, tetap saja dia tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mewakili NU, dia itu bukanlah pengurus PBNU, bukan struktur PBNU, tidak juga mendapat surat kuasa atau mandat khusus dari PBNU, sehingga tidak dapat bertindak secara hukum, berbuat untuk dan atas nama NU

membuat laporan pencemaran nama baik atas NU. Kalau terkait Moh. Ma'ruf Syah apalagi! Saya tidak menyebut nama dia, kenal juga tidak!

Ada kejanggalan lainnya?

Video yang dijadikan barang bukti itu juga bukan diambil dari akun saya, tapi dari akun Youtube orang lain.

Memang videonya tidak sama?

Beda! Durasi video video di akun saya ada 28 menit tapi di akun orang 27 menit.

Beda semenit...

Video dari akun orang itu dipotong satu menit, tapi sangat penting! Bagian video yang dipotong itu memuat tentang inti pesan yang ingin disampaikan saya pada akun Generasi Muda NU. Tapi justru bagian penting tersebut dihilangkan!

Memangnya apa yang dihilangkan?

Pas adegan saya menampilkan satu *screen shot* akun Generasi Muda NU yang merilis 20 kiai radikal itu, itu yang dihilangkan! Jadi seolah-olah saya lagi menghina NU habis-habisan padahal yang saya permasalahan itu akunnya Genersi Muda NU!

Tapi kok Victor Laiskodat yang jelas menista ajaran Islam tentang khilafah tidak tersentuh hukum?

Jadi rezim ini lebih memuliakan Victor Laiskodat daripada ulama, padahal darah ulama ikut memerdekakan bangsa ini. Jadi memang rezim ini dikuasai oleh kontrak-kontrak

politik. Pak Jokowi lebih memuliakan Laiskodat, anak Cina dan lain sebagainya karena memang merekalah para pemodalnya. Merekalah yang berkuasa sebenarnya. Benar itu kalau ada kata-kata "presiden boneka" atau apalah begitu.

Apa benang merah yang Anda lihat dari semua kasus ini?

Negara ini sudah dibeli, negara ini sudah dirampas, dijarah dengan jerat utang, jerat ribawi, melalui tangan-tangan PKI-nya, komunisnya, liberalnya, Syiahnya. Bukan satu kebetulan presidennya Jokowi, Kapolrinya Pak Tito, Ketua PBNU-nya Aqil Siraj, Ketua Panglima Bansernya Gus Yaqut. Belum lagi ada Abu Janda, Guntur Romli, Ade Armando. Itu semua bukan kebetulan, itu settingan sistematis yang sudah lama dirancang, ini sekarang hasilnya. Itu benang merahnya kurang lebih.

Hikmah apa yang Anda petik dari berbagai kasus seperti ini?

Kalau secara hakikat, saya mensyukuri semua kasus di atas, karena dengan kasus di atas itu lahir juga ribuan hikmah yang sangat baik. Terlihat mana munafik, mana sejati. Terlihat mana yang benar-benar ulama lurus, mana ulama penjilat. Jadi kita semakin tahu yang benar-benar berjalan di jalan Allah, siapa perampok-perampok uang negara. Mudah-mudahan bangsa ini bisa keluar dari jerat ribawi, kemunafikan, atau orang-orang yang otak kardus, dan lain sebagainya.[]



**Chandra Purna Irawan,
Sekjen LBH Pelita Umat**

Bila ulama dan lawan politik rezim melakukan kritik pedas langsung disebut ujaran kebencian dan tak sedikit yang diproses secara hukum, terbaru terjadi pada Habib Bahar bin Smith. Sebaliknya, meski sudah menista agama, memfitnah bahkan menyebut 'Jokowi kacung saya dan siap membakar rumah Jokowi' tidak tersentuh karena ternyata pelakunya adalah kawan politik rezim. Mengapa seolah-olah mereka tinggal di negara yang berbeda dan aturan hukum yang diberlakukannya juga tak sama? Jawabannya terungkap dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Sekretaris Jenderal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan. Berikut petikannya.

Terjadi "Perselingkuhan" Hukum dan Politik

Bagaimana tanggapan Anda dengan diadakannya Habib Bahar sebagai tersangka ujaran kebencian karena menyebut Presiden Jokowi sebagai banci?

Habib Bahar diduga menghina Presiden Jokowi, maka dalam hal penghinaan terhadap presiden diatur dalam Pasal 134 KUHP, 136 KUHP, 137 KUHP (pasal penghinaan presiden), yang inti dari pasal-pasal tersebut adalah barangsiapa yang menghina presiden atau wakil presiden akan dikenakan pidana. Pasal penghinaan presiden ini sudah dicabut (dinyatakan tidak berlaku) oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 sehingga pasal penghinaan presiden ini sudah tidak berlaku lagi dan tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum. Jadi Habib Bahar tidak dapat dikenakan pasal penghinaan terhadap presiden.

Apakah pelapor memiliki *legal standing*, mengingat pelapor tersebut—adalah Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid—bukan Jokowi sendiri?

Penghinaan terhadap diri pribadi dalam konteks ini adalah penghinaan terhadap Jokowi dalam kapasitasnya sebagai pribadi (bukan sebagai presiden) yaitu Pasal 310, 311 KUHP bila penghinaan dilakukan secara lisan atau tulisan dan Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bila penghinaan dilakukan melalui media elektronik.

Namun perlu dipahami bahwa, untuk pasal penghinaan pribadi merupakan delik aduan.

Artinya yang berhak mengadu adalah orang yang merasa terhina yaitu Jokowi langsung. Tidak bisa orang lain misalnya simpatisan atau relawan Jokowi. Dan dugaan saya yang unggah ke media sosial bukan Habib Bahar, maka juga tidak dapat dikenakan pasal ITE. Bila penghinaan pribadi Jokowi dilaporkan oleh orang lain maka laporan tersebut tidak berdasar hukum (tidak ada *legal standing*).

Jadi penetapan sebagai tersangka harus dibatalkan demi hukum ya?

Karena dengan semua pasal yang saya jelaskan di atas tidak dapat diproses, akhirnya penegak hukum di antaranya menggunakan pasal tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008. Menurut pendapat saya, jika ceramah Habib Bahar tidak mempersoalkan ras dan etnis, maka tidak dapat dikenakan pasal ini.

Berarti kriminalisasi terhadap Habib Bahar adalah ketidakadilan dan kezaliman ya?

Proses terhadap Habib Bahar, Gus Nur, Ahmad Dhani, Jonru, dll dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk "ketidakadilan" dan "kezaliman". Penilaian itu muncul atas pengamatan fakta yang muncul dipermukaan yaitu misalnya Victor Laiskodat, Cornelis, Ade Armando, Abu Janda, Deni Siregar, Guntur Romli, Sukmawati. Mereka di antaranya diduga ada yang melakukan penghinaan dan penistaan agama, provokasi dan ujaran kebencian. Masyarakat menilai ada dugaan mereka

semua hingga kini belum ada kelanjutan terkait proses hukumnya.

Kecurigaan masyarakat bertambah lagi, ketika ada seorang pemuda keturunan Cina melalui video di media sosial yang melakukan penghinaan dan ancaman kepada Jokowi dan presiden. Juga ada dugaan tidak diproses hukum.

Sukmawati dan anak pengusaha Cina itu awalnya diproses tetapi keduanya meminta maaf lalu dibebaskan...

Iya, itu disebut *restoratif justice*. Dalam kasus tersebut penegakan hukum mengedepankan *restoratif justice*, sementara kepada Gus Nur tidak dapat *restoratif justice*. Padahal terkait video yang menjadi bahan laporan sudah *clear* atau selesai, saya sudah datang dari Palu ke Surabaya di kantornya Ansor untuk *tabayyun*. Itu bentuk itikad baik saya, karena kritik saya kepada Banser adalah bentuk kultum atau dakwah yang intinya mengingatkan untuk perbaikan.

Kalau sudah terjadi *tabayyun* atau *kroscek*, seharusnya penyidik mengedepankan *restorative justice* untuk menghentikan proses penyidikan ini. Karena tidak relevan jika orang lain yang melaporkan sementara pihak yang merasa dirugikan sudah terjadi *tabayyun*. Lantas bagaimana mungkin ini diproses? *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban.

Jadi UU ITE itu alat untuk memberangus suara kritis ya?

Sebenarnya semangat lahirnya UU ITE adalah dalam rangka keterbukaan informasi, memfasilitasi dunia bisnis, dan membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Membuka peluang investasi, peluang bisnis atau dalam rangka ekonomi terbuka. Hal ini bisa dilihat di konsideran UU ITE dan norma-norma yang ada di dalamnya. UU ITE dibuat untuk menyelesaikan kasus-kasus transaksi elektronik. Itulah mengapa UU ini tidak bernama Undang-undang Tindak Pidana Transaksi Elektronik.

Tapi tak sedikit suara kritis kepada rezim Jokowi dicituk pakai UU ITE...

Saya menduga UU ITE menjadi palu godam atau diktator konstitusional.

Maksudnya diktator konstitusional?

Diktator konstitusional yaitu hukum dijadikan sebagai dalil untuk memukul pihak lainnya. Agar terkesan tidak bertindak di luar peraturan maka dibuatlah peraturan yang melegalkan perbuatan tersebut. Tidak pernah terpikirkan oleh bangsa Indonesia sebelumnya bahwa UU ITE akan menjadi alat untuk membelenggu kemerdekaan berpendapat, menjadi alat kriminalisasi aktivis, menekan oposisi yang kritis dan melindungi penguasa dan pemodal dari berbagai kritikan dengan dalih pencemaran nama baik.

Oh, berarti kekuasaan negara diperalat untuk kepentingan rezim?

Penguasa memanfaatkan hukum demi mempertahankan dan meraih kekuasaan. "Perselingkuhan" hukum dan politik terjadi. Politik Machivellian untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan kerap dilakukan, hukum dan politik seharusnya berdiri dengan kedudukan yang sama dan saling menunjang. Tetapi politik itu "memungkinkan yang tidak mungkin". "Politics is the art of the possible". Celakanya, hukum pun dijadikan mainan "politics is the art of the possible". Berbagai persoalan hukum "dimanfaatkan" demi kepentingan politik kekuasaan.

Apa bahayanya kalau rezim seperti ini dibiarkan terus berkuasa?

Bahaya sekali jika hukum dijadikan alat kekuasaan, karena hal ini akan menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat. Pemerintah seharusnya menyadari jika keadilan hukum merupakan salah satu alat untuk menciptakan stabilitas dan kohesi sosial. Itu sebabnya pemerintah tak boleh melakukan politisasi hukum. Adanya standar ganda dalam bidang penegakkan hukum bisa mengancam kohesi sosial.

Penegak hukum (advokat, polisi, jaksa, hakim) tidak boleh sebagai alat, hukum juga tidak boleh menjadi alat, tidak boleh ada kekuasaan, di situlah profesionalisme. Penegak hukum adalah orang-orang yang hanya patuh pada hukum, pada aturan, bukan justru pada atasan atau kekuasaan.[]



Mereka Bicara Kriminalisasi Dai



Fadli Zon,
Wakil Ketua DPR

Rezim Islamophobia

Saya melihat persekusi ulama yang terjadi belakangan ini karena akibat hukum yang tak berjalan.

Sehingga, masyarakat mencari model hukum sendiri untuk menegakkan keadilan. Itu sudah bisa diramalkan dalam banyak peristiwa dan sebagainya. Ini seperti hukum sebab-akibat. Harusnya pihak kepolisian jangan sibuk dengan persepsi, harusnya melakukan penegakan hukum sebaik-baiknya.

Kalau hukum tidak berjalan, maka pasti orang mencari jalan keadilan sendiri. Apalagi, kriminalisasi terhadap ulama sudah semakin keterlaluan dan dianggap tidak berimbang dengan apa yang dilaporkan. Sebaliknya pada kepentingan yang berbeda.

Saya termasuk yang berpendapat rezim ini adalah *islamophobia*, anti terhadap Islam. Seharusnya penegak hukum tidak tebang pilih dan berjalan sesuai norma hukum. Sampai sekarang istilah penegakan hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah itu masih terus ada.

Ini negara menurut saya menuju satu sistem otoritarianisme. Oleh karena itu, kita harus mencatat semua pelanggaran-pelanggaran hukum itu. Saya kira bagus itu supaya menjadi catatan hukum kita. Nanti ada saatnya untuk mencari keadilan.[]



Tengku Zulkarenain,
Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pemerintah Dukung Persekusi

Saya tidak melihat ada gerakan nyata dari pemerintah untuk

mengurangi persekusi ulama. Pemerintah terkesan mendukung. Ketimpangan hukum dalam penanganan persekusi ulama. Sebab, selama ini pelaku persekusi tidak mendapat proses hukum yang jelas. Ketimpangan inilah yang terasa jelas dan transparan. Bahwa ada pihak-pihak penguasa yang sengaja menekan ulama.

Di mana kelihatannya ya tidak diproses hukum. Ini sudah tidak adil, begitu cepatnya pemrosesan kasus Habib, sedangkan yang pro terhadap mereka tidak diproses bahkan terkesan diabaikan oleh penegak hukum yaitu kepolisian.

Dan ini adalah catatan buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, pada tahun 2017 dan 2018. Maka di 2019, saya berharap supaya ada berubah membaik. Penegakan hukum ini tanpa pandang bulu.[]



Sobri Lubis,
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI)

Hukum Jadi Alat Kekuasaan

Kriminalisasi atau sekarang yang terjadi memang sekarang sedang dicari-cari kesalahan. Ambil saja kasus

yang baru ini yaitu Habib Bahar yang dilaporkan atas kasus ceramahnya 2 tahun lalu. Dia dilaporkan ke polisi lalu langsung dengan cepat diproses.

Sedangkan terhadap orang-orang lain yang melakukan *hate speech*, penghinaan terhadap agama, bukan lagi kritik terhadap penguasa, belum diproses. Seperti kasus Abu Janda, Victor Laiskodat, Bu Sukma, Ade

Armando dan Cornelis.

Ini tentu menjadi preseden buruk bagi pengakan hukum bahwasanya aparat pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum menjadi alat kekuasaan, bukan lagi jadi alat negara untuk penegakan hukum. Jadi ini menjadi alat untuk menggebuk lawan-lawan penguasa dan itu tidak *fair*.

Aparat penegak hukum itu digaji dari kas negara bukan dari kasnya Jokowi maupun kantongnya Jokowi. Seharusnya adil. Siapapun rakyat melakukan kesalahan, harus diproses semua, itu baru adil. Tapi kalau orang-orang Jokowi melakukan segala macam tindak pidana tidak diproses, giliran ada yang mengkritisi pemerintah diproses, ini *kan* tidak adil. Kita *kan* sama-sama rakyat dan warga Negara Indonesia dan itu harus sama di mata hukum.[]



Ahmad Khozinuddin,
Direktur LBH Pelita Umat

Hukum Bukan Panglima

Kriminalisasi itu tindakan yang bukan terkategorikan kejahatan tapi dipaksa menjadi delik pidana. Kasus Gus Nur itu jelas kriminalisasi, karena kritik Gus Nur yang dilayangkan kepada Banser dan akun Generasi Muda NU itu bukan kejahatan tetapi dipaksa dijadikan delik pidana.

Jelas, ini sebuah kriminalisasi jika dikaitkan posisi Gus Nur yang kritis terhadap rezim. Ujaran kejahatan SARA seperti ungkapan kacung seorang anak Cina kepada Jokowi, tidak dipersoalkan karena dianggap tidak mengancam eksistensi rezim.

Perbedaan perlakuan aparat yang lemot ketika menangani kasus Ade Armando, Victor Laiskodat, Bu Sukma, Cornelis, hingga Abu Janda, semakin menunjukan bahwa hukum saat ini bukan panglima. Kekuasaanlah yang menjadi panglima dan mengatur hukum. Kita bisa lihat, hukum menjadi sangat tajam ketika mengenai kepada tokoh kontra rezim. Habib Bahar, secepat kilat naik status tersangka hanya dalam hitungan beberapa hari. Ya, saya menduga kuat Habib Bahar ditarget rezim karena kritis terhadap rezim.

Jelas, kita bisa lihat secara prosedur dan substansi. Secara prosedur, hukum tidak diterapkan secara seimbang, tetapi tebang pilih. Tajam kepada tokoh kontra rezim, namun tumpul kepada para penista agama yang pro rezim. Secara substansi, kasus sumir para ulama dan tokoh Islam dipaksakan cepat naik status tersangka. HRS kasusnya sangat sumir, tapi terus diburu. Gus Nur, kasus di Polda Jatim juga sangat sumir, tapi naik pangkat menjadi tersangka. Sementara substansi kasus Victor laiskodat, Busukma, Abu Janda dll yang jelas delik pidana, tapi diabaikan.

Jelas bahaya ini juga, jika hukum menjadi alat kekuasaan akan hilang keadilan dan kepastian hukum. Masyarakat tidak akan percaya kepada hukum, dan akhirnya *chaos*! Hukum rimba! Siapa kuat dia menang. Apa negeri ini didesain untuk *chaos*?[]



Mahendradatta,
Pembina TPM

Menurunkan Kepercayaan Publik

Kalau dengan metode

memperbandingkan praktek hukum atau perbandingan penegakan hukum, tentu kita pada posisi yang bisa dianggap "terdiskriminasi". Memang secara hukum positif tidak ada aturan yang mengatur kewajiban polisi untuk mendahulukan perkara yang lebih dahulu masuk harus ditangani lebih dahulu. Celah ini bisa saja dijawab suka-suka, tetapi justru mendegradasi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Publik atau awam tidak mengerti bahwa waktu proses tindak pidana di kepolisian tidak ada aturannya kecuali didorong oleh pengawasan baik melalui institusi gelar perkara ataupun pengawasan eksternal yang kurang menggigit.[]



Mustofa Nahrawardaya,
Pegiat Media Sosial

Hukum Tidak Standar

Jadi dari awal saya merasa ini ada ketidakadilan antara laporan yang disampaikan dari dua kubu. Kubu

oposisi dan kubu pro pemerintah. Masalahnya adalah kubu yang anti Jokowi ini banyak ulama-ulama dari 212. Diakui atau tidak itu tidak pro Jokowi. Akhirnya mereka para ulama yang berasal dari 212 ataupun pro Prabowo sama-sama terkena imbasnya.

Dan kalau pro Jokowi dilaporkan, *follow-up*nya tidak serius, dan belum pernah satu pun belum ada yang sampai ke pengadilan. Beberapa kasus, kalau ada laporan penistaan terhadap HRS, Prabowo, atau yang dari pihak berseberangan Jokowi, seperti ada kewajiban yang melapor itu yang dihina.

Tetapi kalau yang pihak lain, orang lain yang melaporkan bukan yang terkait, tetap diproses. Kalau Jokowi, yang dihina Jokowi tidak pernah lapor sendiri tapi kasus di-*follow up*.

Tampaknya ini adalah sebuah ketidakadilan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Dulu tidak seperti ini. Mestinya harus seimbang, dan sekarang terjadi betul seperti La Nyalla yang mengaku telah memfitnah Jokowi PKI, karena meminta maaf lalu tidak dipidanakan. Padahal Ratna Sarumpaet juga pernah membuat hal serupa, sudah meminta maaf tapi tetap dipidana. Inilah yang dirasakan saat ini di mana ketimpangan hukum itu berlangsung, tidak *fair*.

Nah, meski rakyat sudah sadar kenapa pemerintah itu tetap ngotot melakukan tindakan hukum yang tidak berimbang. Mereka khawatir, dengan cara seperti ini mungkin saja ada harapan, ada misi untuk menakuti umat Islam untuk selalu tidak menyudutkan pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi. Mereka meminta Pak Jokowi jangan disudutkan secara keterlaluan, karena masyarakat sendiri sudah paham sebenarnya Pak Jokowi ini lemah, tidak memiliki *skill* untuk berkuasa, tidak memiliki *skill* untuk berkomunikasi dengan mayoritas Muslim di Indonesia.

Jadi hukum itu seharusnya tidak boleh goyah, siapa pun operatornya. Jadi sekarang lagi diperintah oleh Jokowi, lalu katakanlah tahun depan Prabowo berkuasa, tidak boleh penegakan hukum itu berubah tergantung siapa yang memimpin, hukum itu patokannya ada.

Sekarang ini hukum seperti tidak standar. Hukum itu hanya berlaku untuk oposisi, hukum itu hanya berlaku untuk orang miskin, untuk orang Islam. Ini berbahaya kalau diteruskan.[] **fatih-ghifari**



Kisah Rasulullah SAW dengan Jin (3)

Oleh: Rokhmat S Labib, MEI

Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih; (TQS al-Ahqaf [46]: 31).

Dalam ayat sebelumnya diberitakan tentang adanya sekelompok jin yang mendengarkan Alquran. Setelah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Kepada kaumnya, mereka mengatakan Alquran merupakan kitab yang telah diturunkan sesudah Musa, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan menunjukkan



kepada kebenaran dan kepada jalanyang lurus.

Ayat ini masih memberitakan seruan rombongan jin tersebut kepada kaum mereka.

Seruan Jin kepada Sesamanya

Allah SWT berfirman: *Yâ qawmanâ ajībû dâ'iyal-lâh wa âminû bihi* (hai kaum kami, terimalah [seruan] orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya). Rombongan jin yang telah mendengarkan Alquran dan beriman kepadanya itu kemudian menyampaikan seruan kepada sesama mereka. Mereka menyerukan agar kaum mereka mau menerima *dâ'iyal-lâh* (orang yang menyeru kepada Allah). Yang maksud dengannya adalah Nabi Muhammad SAW.

Mereka juga menyerukan: *wa âminû bihi* (berimanlah kepadanya). Menurut al-Qurthubi, *dhamîr al-hû* kembali kepada: *bi al-dâ'i* (yang menyerukan), yakni

Muhammad SAW. Ada juga mengatakan, beriman kepada Allah SWT. Alasannya lanjutan ayat ini berikutnya: *Yaghfirlakum lakum min dzunûbikum* (niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu).

Bisa juga semua ajaran yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar al-Jazairi berkata, "Dan terimalah apa yang diserukan olehnya, yaitu seruan untuk men-tauhidkan-Nya dan menaati-Nya, serta mengimani keseluruhan risalah Rasulullah SAW dan semua yang beliau bawa, berupa petunjuk dan jalan yang benar."

Ibnu Jarir al-Thabari berkata, "Allah SWT berfirman seraya mengingatkan dan mengabarkan tentang perkataan serombongan jin: *Yâ qawmanâ ajībû dâ'iyal-lâh*. Mereka berkata: "Terimalah Rasulullah Muhammad SAW yang mengajak kalian untuk taat kepada Allah SWT." *Wa âminû bihi*: Dan benarkanlah apa yang beliau bawa kepadamu dan kepada kaumnya berupa perintah dan larangan Allah SWT, dan selain itu yang diserukannya untuk dibenarkan."

Firman Allah SWT: *ajībû dâ'iyal-lâh* berarti menerima semua perkara yang diperintahkan, termasuk di dalamnya perintah untuk beriman. Akan tetapi dalam ayat ini disebutkan perintah untuk beriman secara khusus. Apa faidahnya pengulangan tersebut?

Menurut beberapa mufassir, pengulangan tersebut karena keimanan merupakan bagian paling penting dan paling mulia yang diperintahkan. Oleh karena itu disebutkan secara khusus. Ini termasuk dalam topik: penyebutan yang umum, kemudian di-*athafkan* kepadanya.

Dijelaskan juga oleh Fakhruddin al-Razi, penyebutan lafadz umum kemudian diikuti dengan penyebutan sesuatu yang paling mulia dari jenisnya banyak terdapat di dalam Alquran, seperti firman-Nya: *Dan malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril* (TQS al-Baqarah [2]: 98).

Ayat ini menunjukkan bahwa beliau diutus kepada jin dan manusia. Menurut Imam al-Qur-

thubi, ini juga ditunjukkan hadits dari Jabir bin Abdullah al-Anshari, Rasulullah SAW bersabda: *Aku diberi lima perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun kecuali kepadaku, yakni: Setiap nabi diutus secara khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada yang merah dan yang hitam* (HR Muslim).

Mujahid berkata, "*al-ahmar wa al-aswad* (yang berkulit merah dan berkulit hitam) adalah jin dan manusia. Dalam riwayat lain dari Hadits Abu Hurairah ra disebutkan: *Dan aku diutus kepada makhluk seluruhnya* (HR Muslim).

Balasan bagi yang Menerima

Disebutkan dalam ayat ini bahwa ketika mereka mau menerima seruan Rasulullah SAW dan mau beriman kepadanya, maka akan mendapatkan beberapa balasan kebaikan. Balasan tersebut disebutkan dalam ayat ini selanjutnya: *Yaghfirlakum min dzunûbikum* (niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu).

Ibnu Jarir al-Thabari berkata, "Tuhanmu akan menutupi dosa-dosamu, sehingga dia menyembunyikannya dan tidak menyingkapnya di akhirat dengan menghukummu atas dosa-dosa tersebut."

Dalam ayat ini disebutkan huruf (*min*). Ada sebagian yang mengatakan bahwa huruf tersebut merupakan zaidah (tambahan). Ibnu Katsir meragukan pendapat ini. Alasannya, penambahan huruf tersebut dalam kalimat yang *itsbât* (positif) jarang terjadi.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa huruf tersebut bermakna *li al-tab'îdh* (menunjukkan makna sebagian). Al-Syaukani termasuk di antaranya. Menurutnya, dosa yang diampuni adalah selain hak sesama hamba. Pendapat senada juga dikemukakan Wahbah al-Zuhaili. Mufassir tersebut berkata, "Allah SWT mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Yakni dosa yang murni merupakan hak Allah SWT. Sedangkan yang merupakan hak-hak manusia dan kezaliman terhadap sesama hamba, tidak diampuni dengan keimanan. Akan tetapi dapat gugur dengan kerelaan pemilik hak tersebut."

Abu Bakar al-Jazairi juga berkata, "Dia mengampuni dosa-dosa kalian. Yakni dosa-dosa ka-

lian dengan Allah SWT, yaitu dengan menutupinya dan tidak menghukumnya. Sedangkan dosa-dosa antara kalian dengan sebagian yang lain, itu tidak diampuni kecuali orang yang dizalimi itu memaafkannya atau dia mengembalikan kepada pemiliknya."

Kemudian dilanjutkan: *Wa yujirkum min 'adzâb alîm* (dan melepaskan kamu dari azab yang pedih). Balasan lainnya adalah diselamatkannya dari azab yang pedih. Ibnu Katsir berkata, "Dan melindungi kalian dari azab-Nya yang pedih." Ibnu Jarir juga berkata, "Dia menyelamatkan kalian dari azab yang menyakitkan jika kamu telah bertaubat dari dosa-dosamu dan kembali dari kekufuran menuju keimanan kepada Allah SWT dan penyeru-Nya."

Berdasarkan ayat ini, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jin Mukmin tidak mendapatkan pahala kecuali mendapatkan *maghfirah* (ampunan) dan *ijârah* (perlindungan) dari siksa neraka. Di antara yang berpendapat demikian adalah al-Hasan. Menurutnya, jin Mukmin tidak mendapatkan pahala kecuali diselamatkan dari dari azab neraka. Dalilnya adalah ayat ini: *Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih*. Seandainya ada balasan bagi jin Mukmin atas keimanannya lebih dari apa yang telah disebutkan, tentulah akan disebutkan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Menurutnya, jin tidak mendapatkan pahala kecuali diselamatkan dari neraka, kemudian dikatakan kepada mereka, "Jadilah kamu debu!", seperti terjadi pada binatang ternak.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa mereka bisa masuk surga. Sebagaimana mereka mendapatkan hukuman karena kejahatan yang mereka lakukan, demikian pula kalau mereka melakukan kebaikan. Mereka pun mendapatkan balasan atas kebaikan mereka seperti manusia.

Di antara yang berpendapat demikian adalah Malik, al-Syafi'i, dan Ibnu Laili. Al-Dhahhak berkata, "Jin masuk ke dalam surga, makan dan minum." Pendapat ini juga dipilih banyak ulama seperti al-Zamakhsyari, al-Razi, al-Qurthubi, Ibnu Katsir, al-Syaukani, al-Baidhawi, al-Naisaburi, dan lain-lain. Pendapat ini didasarkan firman-Nya: *Dan masing-masing*

IKHTISAR:

1. Rombongan jin yang sudah beriman mengajak sesama golongan jin untuk menerima Rasulullah SAW dan beriman terhadap semua risalah yang beliau bawa.
2. Barangsiapa yang mau menerima dan mengimannya akan diampuni dosa-dosanya dan diselamatkan dari siksa neraka.

orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya (TQS al-An'am [6]: 132). Ini menunjukkan bahwa mereka diberikan pahala dan masuk surga. Sebab, di awal ayat ini, yakni: *Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat-Ku* (TQS al-An'am [6]: 130).

Dalil lainnya yang menunjukkan bahwa jin Mukmin juga mendapatkan balasan pahala dan surga adalah firman-Nya: *Dan bagi orang yang takut saat menghadapi Tuhannya ada dua surga. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?* (TQS al-Rahman [55]: 46-47).

Pendapat ini juga dipilih Ibnu Katsir. Menurutnya, QS al-Rahman [55]: 46-47 tersebut adalah dalil yang tepat tentang masalah ini. Alasannya, Allah SWT telah menganugerahkan kepada dua jenis makhluk-Nya (manusia dan jin) berupa pahala surga bagi mereka yang berbuat baik dari kalangan keduanya. Kalangan jin juga telah menjawab ayat ini dengan ungkapan rasa syukur yang lebih kuat daripada manusia. Mereka berkata, "Tiada sesuatu pun dari tanda-tanda kebesaran dan nikmat-Mu yang kami dustakan, wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji."

Dikatakan juga oleh Ibnu Katsir bahwa Allah SWT tidak sekali-kali menjanjikan pahala bagi mereka yang kemudian tidak mereka terima. Sesungguhnya apabila Allah membalas jin yang kafir dengan neraka sebagai keadilan dari-Nya, maka terlebih lagi bila Dia membalas jin yang Mukmin dengan surga sebagai karunia dari-Nya.

Demikianlah. Rasulullah diutus kepada manusia dan jin. Semuanya wajib beriman dan menerima risalahnya. *Wa'lam bi al-shawâb*.[]

Lembaga survei bisa menyusun materi survei yang menggiring objek survei untuk membenarkan maksud dan tujuan survei.

Hasil Survei Setara Menghantam Islam

Setara Institute kembali merilis hasil surveinya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, lembaga yang dipimpin tokoh HAM Hendardi ini mengumumkan kota-kota di Indonesia yang memiliki tingkat toleransi tinggi hingga yang terendah.

Tahun ini Setara menempatkan Singkawang sebagai kota paling toleran. Tahun sebelumnya Manado. Sebelumnya lagi Denpasar. Sedangkan tahun ini Jakarta digolongkan sebagai kota yang memiliki tingkat toleransi terendah ketiga dari bawah.

Termasuk kota yang dianggap toleransinya rendah adalah Banda Aceh. Itulah mengapa anggota DPR Kota Banda Aceh Irwansyah, menilai hasil itu tak memiliki dasar dan tak sesuai fakta. Menurutnya, ada upaya Setara Institute mengerdilkan pembelajaran syariah Islam di Banda Aceh.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan survei itu sendiri. Ia berharap Setara bisa membuka daftar pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu guru besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra membuka fakta bahwa justru kota seperti di Manado kaum Muslim sulit menjadi pegawai karena yang diterima malah yang Kristen.

Senada dengan Anies, pengamat

sosial dan politik Iwan Januar menilai bahwa publik tidak tahu apa saja sebenarnya isi dari survei itu. Jika tentang 10 kota paling toleran, apa materinya? Lalu siapa yang disurvei? Kemudian bagaimana teknik dan metodologinya.

Menurutnya, lembaga survei bisa menyusun materi survei yang menggiring objek survei untuk membenarkan maksud dan tujuan survei. "Sudah sejak lama orang ada yang berbohong dengan statistik. Kelihatannya ilmiah padahal tidak jujur dan sudah diframing," ujarnya saat wawancara dengan *Media Umat*, Kamis (13/12), di Jakarta.

Iwan juga menilai sepertinya ada penyebab yang membuat gelisah dan takut dengan adanya kebangkitan Islam di negeri ini. Pasca pilkada DKI, kelompok ini membaca bila perlahan namun pasti ideologi Islam kian mengkristal di tengah umat.

Lalu mereka mengambil tindakan represif dan membangun opini tentang bahaya kebangkitan radikalisme Islam, mengkriminalisasi tokoh-tokoh Islam, membubarkan ormas Islam HTI, membenturkan Islam dengan Pancasila, dsb.

"Intinya mereka putar otak untuk membendung laju kebangkitan Islam. Termasuk dengan membangun opini lewat survei kalau kota seperti Jakarta, tempat Ahok keok, dan Aceh yang menerapkan



Perda Syariah adalah bermasalah."

Padahal kalau mau jujur, kata Iwan, siapa sebenarnya yang pantas dibidang intoleran? "Masak umat Muslim? Insiden Tolikara, penyerangan pada Ustadz Tengku Zulkarnain, politisi Fahri Hamzah, penghadangan terhadap UAS di Bali, justru korban-nya tokoh Islam. Itu kan jelas tidak perlu pakai survei lagi," ucapnya.

Kemudian walaupun dilihat di tengah masyarakat, malah umat Muslim dan ajaran Islam itu faktor utama kerukunan umat beragama. Lihat saja di Myanmar, Cina, beberapa negara Eropa juga di AS, Muslim yang jadi korban.

"Di Indonesia? Memang sebanyak apa sih kalangan di luar Islam yang dianiaya? Hampir zero," sindirnya.

Dalam pandangannya, Setara Institute itu ingin mencitrakan negatif ajaran Islam. Mereka lupa kalau sekarang kesadaran umat kian meninggi. Coba lihat saja aksi 212 saja berjalan damai. Tak ada kerusuhan.

Karena itu, ia menambahkan, umat Muslim jangan berhenti memperjuangkan Islam. Negeri ini bakal bangkrut dan *chaos* bila umat Muslim mundur. "Justru hanya dengan Syariat Islam dan Khilafah Islam, selamat," pungkasnya. **ghifari**

Sudah menjadi mahfum publik terkait tentang kerudung—yang biasa disebut umum jilbab—adalah menutup aurat hingga di bagian dada.

Aturan Jilbab ASN Mendagri Akhirnya Dicabut



Hanya berumur sekira 10 hari, Instruksi Mendagri No 025/10770/SJ Tahun 2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akhirnya dicabut.

Padahal instruksi itu baru ditandatangani pada 4 Desember lalu. Surat instruksi yang menyebar di media sosial menimbulkan polemik. Masyarakat mempertanyakan aturan yang bertentangan dengan Islam tersebut. Buru-buru Kemendagri membuat jumpa pers Jumat (14/10) dan menyatakan bahwa aturan itu dicabut.

Di dalam aturan yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo itu tertulis kewajiban bagi Aparat Sipil Negara (ASN) perempuan yang mengenakan jilbab [baca: kerudung] untuk memasukkan kerudung-nya ke kerah pakaian dinas coklat pada Senin-Selasa, dan putih pada Rabu.

Aktivis Muslimah Iffah Ainur Rohmah menilai aturan itu layak dicabut. Sebab, sudah menjadi mahfum publik terkait tentang kerudung—yang biasa disebut umum jilbab—adalah menutup aurat hingga di bagian dada.

"Kalau kemudian diharuskan dimasukkan ke dalam baju, dengan alasan untuk kerapihan dan seterusnya, tetap saja yang

kita tahu itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh para Muslimah," ujarnya kepada *Media Umat*, Ahad (16/12), di Jakarta.

Menurutnya, sangat wajar bila kaum Muslimah meski mereka bukan ASN pun bereaksi. "Ini adalah fenomena yang menarik untuk diangkat atau dikomentari. Kenapa karena membuat kebijakan yang sebenarnya sudah diketahui berpotensi menimbulkan penolakan bahkan ketidakpatuhan?" ucapnya.

Menurutnya, penolakan publik merupakan wujud kesadaran publik untuk lebih taat kepada syariah dan ini menunjukan hal yang positif bahwa publik semakin paham syariahnya dan makin tampak keinginannya untuk berlakukan syariah. "Ini bukan sekadar publik menentang pemerintah, bukan demikian. Memang ini karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan syariah dan bahkan berpotensi membawa masyarakat pada pelanggaran terhadap syariah," jelasnya.

Ia menjelaskan dalil yang tegas tentang kerudung ini yakni surah An-Nur ayat 31. Ayat itu berbunyi: "Hendaklah kalian memakai penutup kepala atau khimar menjulur sampai dada". Perintah-Nya jelas

bahwa wajib mengenakan kerudung dan menjulurkannya hingga ke bagian dada.

Adanya aturan Kemendagri ini, menurutnya, bisa menjadi pintu masuk untuk menjelaskan lebih gamblang bagaimana para wanita berkerudung sesuai syariah.

Ia menilai, motivasi pemerintah mengeluarkan kebijakan itu ada dua kemungkinan. *Pertama*, karena ketidakmengertiannya terhadap syariah, bagaimana perempuan Muslimah seharusnya mengenakan pakaian.

Kedua, ada kemungkinan phobia Islam. Faktor kedua ini sangat berbahaya jika memang benar adanya. Sebab, justru mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Ia berpendapat, seharusnya pemerintah menyusun aturan yang sesuai dengan aspirasi mayoritas bukan malah sebaliknya.

"Dalam mengambil kebijakan di negeri ini mayoritas Muslim, kita harus percaya bahwa syariah akan mendatangkan kebaikan. Jangan memperjangkit phobia terhadap Islam, karena Islamlah yang akan bisa menyelamatkan negeri ini dari bera-gam persoalan," pungkasnya. **ghifari**

Rakyat Sulit Dapatkan e-KTP Malah Berceceran

Apapun alasannya, penemuan tersebut adalah bentuk kelalaian dari pemerintah yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Terjadi lagi, ribuan E-KTP ditemukan tercecer di dalam sebuah karung di area persawahan yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12/2018).

Ditemukannya ribuan E-KTP tersebut berawal dari laporan adanya anak-anak yang memainkan E-KTP tersebut. Ipit, Ketua RW 011 Pondok Kopi menegaskan bahwa barang tersebut ditemukan di karung putih. "Ada ribuan e-KTP aktif. Saya *ngitungin aja udah capek*, pada *bosen*. Ribuan itu, jelas di atas seribulah," ujar Ipit.

Menanggapi hal tersebut, Wahyudi Al-Maroky, Direktur Pamong Institute mengatakan apapun alasannya, penemuan tersebut adalah bentuk kelalaian dari pemerintah yang seharusnya tidak boleh terjadi. Wahyudi mengatakan bahwa kejadian tersebut menunjukkan yang bertanggung jawab amatir dan tidak amanah.

"Apapun alasannya, kasus tersebut menunjukkan pengelolaan manajemen pemerintahan dalam mengurus KTP ini sangat tidak profesional alias amatiran dan sangat tidak amanah, bagaimana mungkin

KTP yang begitu penting diurus secara amatiran dan asal-asalan," ungkapnya kepada *Media Umat*.

Tentunya, lanjut Wahyudi permasalahan tersebut menunjukkan juga kelemahan pemerintah dalam manajemen, terutama dari pejabat kepada unit-unit di bawah tanggung jawabnya. Dan seharusnya yang terkait dengan tanggung jawab tersebut mengundurkan diri.

"Kalau dikatakan pemerintah lalai, bisa juga tapi menurut hemat saya itu lebih dikarenakan tidak amanah. Mestinya pejabat terkait mundur dari jabatannya sebagai wujud tanggungjawabnya. Kelelai pun tak mau terantuk batu yang sama, kejadian sampai dua kali menunjukkan apa?" tegasnya.

Saat ada kejadian E-KTP yang tercecer di Bogor seharusnya pemerintah menjadi lebih waspada dan teliti lalu mengantisipasi agar tidak terjadi lagi, ditambah lagi ini adalah tahun politik. Anehnya, Wahyudi menilai pemerintah khususnya Kemenag malah lalai dan tidak fokus.

"Mestinya ketika kasus tercecer KTP di Bogor itu para pejabat pemerintah harus waspada dan serius mengantisipasi agar

tidak terjadi lagi. Apalagi ini tahun politik mestinya lebih waspada. Tapi bukannya waspada malah mendagri sibuk *ngurusi* baju dinas terkait kerudung. Benar-benar lalai dan tak profesional," katanya.

Ia menambahkan bahwa seharusnya para pejabat pemerintah yang terkait malu terhadap rakyat dan takut kepada Allah atas bentuk ketidakprofesional dan tidak amanahnya dalam bekerja.

Pada, rakyat hingga kini begitu sulit mendapatkan e-KTP tapi kenapa justru barang tersebut bisa tercecer ke mana-mana.

Karenanya, lanjut Wahyudi, masyarakat harus semakin berani untuk menyuarakan kebenaran atas kelalaian pemerintah, dan urusan umat.

"Kepada rakyat agar lebih peduli dengan urusan umat, harus berani mengoreksi penguasa sebagai wujud kecintaan atas negeri ini. Jangan lagi cenderung kepada penguasa zalim apalagi mendukungnya, apalagi memilihnya, jangan pilih rezim zalim, apalagi zalim dan ingkar janji," ungkapnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Dhany



Sukma mengatakan, sekarang e-KTP yang ditemukan di Kelurahan Pondok Kopi merupakan e-KTP cetakan lama. E-KTP tersebut merupakan cetakan 2011-2013. Dhany mengaku belum mengetahui apakah ribuan e-KTP itu masih aktif atau tidak.

Dhany juga tidak menjawab dengan jelas alasan mengapa e-KTP cetakan lama tersebut belum diserahkan ke warga. Dinas Dukcapil DKI Jakarta meminta polisi mencari pelaku yang membuang e-KTP tersebut.

Informasi yang berkembang, orang dalam Kemendagri dicurigai terlibat terkait tercecernya KTP elektronik (e-KTP) di Duren Sawit, Jakarta Timur itu. [] **fs**

Suherman Kena Hukuman Percobaan

Jaksa menilai meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal, tetapi tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan tidak signifikan.

Setelah menjalani proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya Pengadilan Negeri Bekasi memvonis Muhammad Suherman 2 bulan 15 hari dengan tidak perlu menjalani hukuman, masa percobaan selama 5 bulan dan denda 1 juta

masa percobaan selama lima bulan, dengan denda 1 juta subsidi kurungan 5 hari, menurut hemat kami masih cukup melegakan. Sebab, putusan ini tidak mengharuskan terdakwa menjalani pidana di dalam penjara," ungkap Ahmad kepada *Media Umat*.

Pihaknya sendiri akan mengambil

dalam pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Tindakan terdakwa yang mengirim konten berupa foto diduga perjanjian antara Rahmat Efendi dengan perwakilan pendeta dan gereja secara japi kepada 5 (lima) orang melalui WhatsApp, dinyatakan bersalah secara hukum," jelas Ahmad.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana 5 bulan penjara, denda 100 juta rupiah subsidi kurungan dua bulan. Tuntutan ini relatif ringan, mengingat dakwaan jaksa yang mengacu pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, ancaman pidananya hingga 6 (enam) tahun penjara dan denda hingga satu miliar rupiah.

"Dalam konteks tuntutan, jaksa menilai meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal, tetapi tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan tidak signifikan. Sehingga, jaksa hanya menuntut pidana 5 bulan penjara, denda 100 juta rupiah subsidi kurungan dua bulan," ungkap Ahmad.

Ahmad menambahkan, putusan yang melegakan terhadap Suherman ini tidak lepas dari dukungan dan doa segenap umat Islam khususnya yang ada di Bekasi.

"Kami ucapkan terima kasih secara khusus kepada Ust Verry, Ketua FAPB Kota Bekasi. Beliau, telah gigih menjembatani

dan berkomunikasi dengan banyak pihak khususnya tokoh dan ormas di Bekasi, agar terlibat aktif mengadvokasi kasus Ust Suherman, dari sejak penyidikan hingga proses di persidangan," katanya.

Bahkan FPI ikut aktif menggerakkan laskar LPI untuk ikut dalam aksi mengawal kasus Suherman. Yang paling heroik, aksi di depan kantor Walikota Bekasi di mana peserta aksi nyaris mencapai angka tiga ribu peserta.

Dukungan juga datang dari GARIS Bekasi. Ketuanya selalu hadir dan berorasi menyemangati peserta aksi untuk tetap bersatu membela Suherman. Bahkan, dalam audiensi dengan perwakilan Walikota Bekasi, ia mengusulkan dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menemukan siapa pembuat konten foto yang menyebabkan Suherman mengalami proses hukum.

"Kepada Bang Agung dari LBH Bang JAPAR, Ust Ismail Ibrahim, Ust Tajudin, Pakde Nanang Seno, Ust Irwan Syaifulloh, Ust Wahyu Abu Fawaz, KH Abu Hanifah, KH Jainudin, Ust Abdul Kadir, Bung Wahyu, Santri-Santri Ponpes Al Khoirot, serta segenap elemen umat Islam yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga, Allah SWT memberi limpahan pahala dan balasan kebajikan yang berlimpah. Aamiin," ucap Ahmad. [] **fs**



subsidi kurungan 5 hari. Putusan itu disampaikan majelis hakim pada Kamis (13/12) siang.

Kuasa hukum terdakwa Ahmad Khozinuddin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat menyatakan vonis tersebut tidak memuaskan namun melegakan. "Melegakan, karena sanksi pidana yang diberikan berupa vonis pidana percobaan 2 bulan 15 hari dengan tidak perlu menjalani,

langkah tujuh hari setelah putusan tersebut. "Prinsipnya, keputusan terbaik tetap kami kembalikan kepada Pak Suherman. Semoga Allah SWT membimbing kita semua agar tetap menaati petunjuk dan tetap istiqamah berjuang di jalan-Nya," ujarnya.

Majelis hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

Larangan Nikah di Bawah 19 Tahun Bertentangan dengan Islam?

Semestinya pemerintah perlu mempertimbangkan norma agama yang mengatur mengenai perkawinan.



Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan anak.

Dalam pertimbangannya, Ketua MK Anwar Usman menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan batas pernikahan untuk laki-laki di usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. MK juga menilai beleid tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak.

Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan pemohon yang meminta batas umur pernikahan bagi perempuan disamakan dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Namun Mahkamah Konstitusi tidak berhak menentukan batas usia perkawinan itu karena wewenangnya ada di pembuat undang-undang yaitu DPR RI.

Ketua Eksekutif Nasional BHP Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan menilai terkait perkawinan yang berusia di bawah 19 tahun, dibolehkan selama persyaratan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan terpenuhi.

"Oleh karena itu penghulu tetap memproses dan mencatatkan pernikahan setelah semua persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah terpenuhi," ujarnya saat *Media Umat* wawancara pada Ahad (16/12), di Jakarta.

Menurutnya, UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya tidak mengenal adanya perkawinan anak atau pernikahan dewasa. UU Perkawinan hanya memberi batasan minimal usia ideal bagi

warga negara untuk menikah, yaitu setelah berumur 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja, UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membolehkan laki-laki berumur di bawah 19 tahun dan perempuan di bawah 16 tahun untuk menikah, selagi mendapat dispensasi dari pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama.

Ia menjelaskan, sebetulnya ada sejumlah regulasi yang mendefinisikan anak dengan batasan usia di bawah 18 tahun. Sebut saja UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, UU Pendidikan Nasional dan sekitar 20 regulasi lainnya, semua mendefinisikan anak dalam pengertian tersebut. "Dengan demikian, peristiwa menikah di bawah 18 tahun disebut sebagai perkawinan anak, menurut peraturan perundang-undangan ini," ucapnya.

Tetapi, lanjut Chandra, jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, posisi UU Perkawinan lebih kuat. Di dalam hukum dikenal asas *Lex specialist derogat legi generali*, yaitu adanya aturan khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum.

Dalam perkawinan di Indonesia, maka yang menjadi aturan khususnya adalah UU Perkawinan. Sehingga ketika dihadapkan

dengan aturan yang bersifat umum, maka kedudukan UU Perkawinan lebih kuat untuk dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Apalagi dalam aturan yang bersifat umum tersebut tidak ada satu pasal pun yang secara tegas melarang perkawinan anak.

"Apakah UU perkawinan bisa diubah? Sangat memungkinkan, di antaranya melalui Perubahan UU dan Judicial review di MK," tannya.

Sebelumnya MK sudah pernah menolak *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan mengenai batas usia perkawinan. Semestinya pemerintah perlu mempertimbangkan norma agama yang mengatur mengenai perkawinan.

Chandra menilai UU ini tidak perlu direvisi, jika itu terjadi maka perlu umat Islam mengawal agar tidak terjadi pertentangan dengan Islam. "Islam mengatur bahwa ketika telah baligh maka boleh untuk dinikahkan jika memang itu lebih baik ketimbang terjerumus pada potensi perzinahan," jelasnya.

"Hanya saja, jika dianggap kurang dewasa itu persoalan lain yaitu perlunya negara, masyarakat dan keluarga mempersiapkan anak-anaknya," tutupnya. **ghifari**

Tolak Poligami PSI Terkategori Nistakan Agama

Sikap dan pernyataan PSI yang menentang poligami sudah dikatakan sebagai penistaan agama. Hal tersebut berdasarkan pasal 156a KUHP.

PSI kembali menegaskan sikapnya menolak syariah Islam. Setelah sebelumnya dengan terus terang menentang Perda Syariah, partai yang diketuai Grace Natali—non Muslim—kini mereka dengan berani menolak poligami. Alasannya, poligami memperdaya perempuan.

"Poligami itu memperdayakan perempuan, bukannya memberdayakan. Banyak perempuan terjebak dalam pernikahan poligami karena tidak mudah bagi perempuan untuk masuk dalam sektor ekonomi," ujar Dara Adinda Nasution, juru bicara PSI untuk isu-isu perempuan, Selasa (18/12).

Menanggapi hal tersebut Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan mengatakan sikap dan pernyataan PSI yang menentang poligami sudah dikatakan sebagai penistaan agama. Hal tersebut berdasarkan pasal 156a KUHP.

Dalam rumusan Pasal 156a KUHP: barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia.

Chandra menjelaskan, Pasal 156a

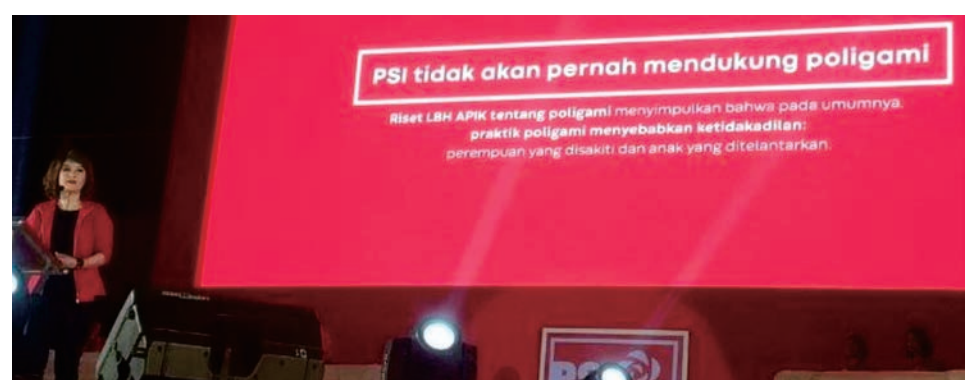
KUHP ini ada dua jenis tindak pidana penodaan agama yaitu Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 156a huruf b KUHP, apabila terpenuhi salah satu bentuk unsur dari huruf a maupun huruf b saja, maka pelakunya sudah dapat dipidana.

"Unsur Pasal 156a huruf a KUHP yaitu dengan sengaja, di muka umum, dan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, terpenuhi," katanya.

Saat PSI menyatakan penolakannya terhadap poligami, menurut Chandra, itu sudah masuk unsur sengaja di muka umum dalam pasal 156a KUHP mengenai penistaan agama.

Menurutnya, unsur di muka umum ini terpenuhi yaitu apabila pernyataan atau perbuatan cukup diucapkan di hadapan pihak ketiga, yaitu cukup dihadiri 1 orang saja sudah cukup memenuhi unsur di muka umum. Atau pernyataannya atau perbuatannya didengar publik ini termasuk di muka umum. Dan jika pidato atau pernyataan disampaikan dihadapan masyarakat, unsur di muka umum terpenuhi.

Dan unsur perbuatan ini bersifat alter-



natif yaitu cukup salah satu unsur dari pernyataan atau perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Pidato atau pernyataan tersebut yang terpenuhi disini adalah penodaan terhadap agama.

Penafsiran "Agama" menurut Pasal 156a KUHP yaitu: (a). jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. (b). Jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. (c). Ajaran agama yang bersangkutan.

"Dari penafsiran mengenai agama yang terpenuhi adalah tentang ajaran agama. Dalam penggalan pidato atau pernyataan ada frasa kalimat "Poligami itu memperdayakan perempuan, bukannya mem-

berdayakan," tegas Chandra.

Chandra juga menambahkan bahwa UU Perkawinan mengatur tentang Poligami, UU Perkawinan memberikan kebebasan poligami, sebagaimana Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu setelah seluruh persyaratan terpenuhi. **fs**

Marwan: revisi terakhirnya masih mengutamakan kepentingan kontraktor untuk mempertahankan dominasi pengelolaan tambang di Indonesia.

Revisi PP Pertambangan Kokohkan Liberalisasi



Rencana Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah No. 23/2010 sebagai acuan pelaksanaan Undang-undang Minerba No 4 tahun 2009 mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Ahmad Redi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Menurutnya, ada empat poin yang menjadi sorotan perubahan atau revisi PP 23/2010 yang tercantum dalam draft PP 2018 tersebut. *Pertama*, mengenai luas wilayah pertambangan. *Kedua*, barang milik negara. *Ketiga*, mengenai perubahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). *Keempat*, mengenai penerimaan negara.

Ahmad menyoroti revisi PP yang tidak menetapkan batas

wilayah tambang. Padahal UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 83 disebutkan bahwa wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 hektar.

Mengenai barang milik negara, dalam aturan revisi, barang milik negara atau fasilitas yang ditinggalkan dapat disewa. Sedangkan di UU Minerba barang tersebut dikuasi oleh negara. Terkait mengenai perubahan perjanjian, dalam revisi diatur untuk perusahaan dapat memperpanjang kontrak dari PKP2B menjadi IUPK.

Menurutnya, kontrak yang sudah habis bisa diberikan kepada negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun UU Minerba menyatakan Kontrak Karya dan PKP2B yang

telah ada sebelum undang-undang ini tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Adapun mengenai penerimaan negara, pada aturan sebelumnya Pajak Penghasilan (PPH) badan dikenakan ke perusahaan tambang sebesar 45 persen. Sedangkan, dalam revisinya, PPH badan menjadi 25 persen. "Jadi ada selisih penerimaan negara," kata Redi, di Jakarta, Rabu (12/12) seperti dikutip *katadata.co.id* (12/12).

Sementara Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengungkapkan, sejak awal PP 23/2010 telah melanggar Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Mineral dan Batubara.

Pasalnya, menurut Marwan, PP 23/2010 hingga revisi terakhirnya masih mengutamakan kepen-

tingan kontraktor untuk mempertahankan dominasi pengelolaan tambang di Indonesia. Faktanya, sesuai UUD 1945, UU Nomor 30/2007 dan UU 4/2009, sumber daya energi maupun sumber daya minerba diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal senada disampaikan oleh pengamat ekonomi Islam, Arim Nasim. Menurutnya, perubahan PP ini hanya mengokohkan dominasi swasta baik lokal maupun asing dalam mengeksploitasi kekayaan milik rakyat. Ini sejalan dengan kebijakan rezim Jokowi yang sangat liberal dan pro para kapitalis atau swasta.

Menurutnya, bukan hal yang aneh kalau yang mendukung PP ini adalah pihak pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) sebagaimana pernyataan

Direktur Eksekutif Hendra Sinadia bahwa perubahan PP Nomor 1 Tahun 2017 ini perlu untuk memberikan kepastian investasi lebih awal kepada perusahaan tambang.

Arim yang juga dosen Ekonomi Islam Universitas Pendidikan Indonesia, menambahkan, sebenarnya Undang-Undang Minerba UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (minerba), juga dalam sudut pandang ekonomi Islam masih keliru, karena dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa negara harus menguasai saham mayoritas (minimal 51 persen) dalam setiap usaha tambang di Indonesia.

Ia menjelaskan, hal ini keliru. Dalam sistem ekonomi Islam, barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas atau jumlah depositnya besar merupakan milik umum. Pengelola harta milik umum dalam sistem ekonomi Islam adalah badan usaha milik umum (BUMU) dan bentuk badan usahanya tidak boleh berbentuk perseroan terbatas atau perseroan saham tapi badan usaha dengan pemilik atau pemodalnya 100 persen negara sebagai wakil dari umat, sehingga semua hasil tambang tersebut bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. **man/lm**

MUAMALAH

Hibah Asuransi

Hukum asuransi haram sudah jelas. Karena akadnya menyalahi akad syar'i, baik dari objek yang diakadkan [*ma'qud 'alaihi*], yang bukan salah satu dari objek yang bisa diakadkan, yaitu barang dan jasa, maupun dari bentuk *dhaman* yang menyalahi ketentuan *dhaman* secara syar'i. Karena itu, tidak dibenarkan melakukan akad seperti ini.

Masalahnya, bagaimana jika ada perusahaan tempat seseorang bekerja mengasuransikan mobil orang tersebut atas nama perusahaannya, bukan atas nama dirinya, sementara orang tersebut tidak terlibat langsung dengan asuransi tersebut, apakah ini diperbolehkan?

Maka, yang harus dilihat adalah, apakah ini merupakan bentuk *hilah* [dalih], dengan memanfaatkan celah, yaitu perusahaan tempat orang tersebut bekerja agar mengasuransikan mobilnya, atau tidak? Karena memang ada kaidah, "*Tabaddulu sabab al-milk qa'imun maqam tabadduli ad-dzat*" [perubahan sebab kepemilikan statusnya mengikuti perubahan zat]. Misalnya, susu berubah menjadi keju tidak mengubah dzatnya, yaitu sama-sama halal. Tetapi, susu tersebut diperoleh melalui hibah, bukan karena dibeli, mengubah sebab kepemilikan susu tersebut. Dengan begitu, konsekuensinya juga

berubah.

Asuransi tersebut diperoleh oleh orang tersebut sebagai *hibah* [pemberian], meski hukum asalnya haram, tetapi setelah asuransi tersebut diberikan oleh perusahaan orang tersebut sebagai *hibah*, yang bukan *hilah* [dalih agar bisa mendapatkan yang haram dengan cara halal], maka sebab kepemilikannya telah berubah, dari melakukan akad sendiri, ke hibah dari orang lain. Dengan kata lain, dia memilikinya karena diberi. Kaidah di atas boleh digunakan, tetapi dengan asas syar'i, yang dibenarkan bukan karena untuk mencari *hilah*, dan alasan pembenaran.

Adapun bedanya *hilah* dengan tidak seperti apa?

Misalnya, seorang Muslim tidak boleh melakukan keharaman, yaitu melakukan akad asuransi, agar boleh, maka dia mewakilkan kepada orang lain, misalnya, untuk melakukan itu. Yang berarti, dia meminta orang lain melakukan akad yang haram, untuk mewakili dirinya. Maka, asuransi itu tetap haram, dan mewakilkannya kepada orang lain untuk melakukan yang haram juga tetap haram. Ketika orang tersebut mendapatkannya dari akad *wakalah* statusnya tetap haram. Begitu juga, orang yang mewakili melakukan yang haram juga tidak boleh. Karena, *wakalah bi al-haram* hukumnya haram.

Ini berbeda dengan *hibah*, yang dilihat dari aspek sebab kepemilikan, *hibah* tersebut merupakan sebab kepemilikan yang sah, tanpa harus melihat sumber yang dihibahkan sebelumnya, apakah haram atau tidak. Karena, status hukum harta itu terputus mengikuti sebab kepemilikannya. Ini sama seperti waris, dan harta Baitul Mal dari sitaan harta haram.

Jika ada seseorang mendapatkan warisan berupa harta yang ditinggalkan orang tuanya, sementara harta tersebut diperoleh orang tuanya dari harta haram, maka waris, sebagai sebab kepemilikan telah mengubah status harta yang jatuh ke tangan orang tuanya berbeda hukumnya dengan ketika harta itu jatuh ke tangan anaknya. Mengapa? Karena harta itu tidak haram, karena zatnya, kecuali memang zatnya haram, melainkan karena faktor sebab kepemilikannya.

Begitu juga, ketika seseorang mendapatkan harta dari Baitul Mal, yang diperoleh dari harta haram, maka pemberian negara kepada individu dari Baitul Mal, meski asalnya harta tersebut haram telah mengubah status harta tersebut jatuh ke tangan orang tersebut menjadi halal. Begitulah. *Wallahu a'lam.*

Sebanyak 31 orang pekerja PT Istaka Karya tewas di Papua oleh gerakan yang menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka. Namun, sungguh aneh respon aparat keamanan terlihat begitu lambat? Mengapa? Kenapa mereka tak disebut teroris? Fokus mengupasnya.

PEMBANTAIAN PAPUA, KRIMINAL BIASA?

Data yang terekam media, setidaknya selama enam bulan terakhir telah terjadi sepuluh kali penyerangan dan teror di Papua.

Ahad, 2 Desember 2018, menjadi hari yang buruk bagi pekerja BUMN PT Istaka Karya. Sebanyak 31 orang perusahaan ini tewas dibantai secara mengenaskan saat mereka sedang mengerjakan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Jumlah korban tewas sebanyak 31 orang itu berdasarkan laporan awal melalui radio dari pendeta Wilhelmus Kogoya dari gereja distrik Yigi.

Menurut penuturan Johny Aritonang, pekerja PT Istaka Karya yang berhasil selamat, sehari sebelumnya sebanyak 25 orang pekerja diculik oleh sekelompok orang bersenjata. Mereka digiring ke bukit Kabo. Dan keesokan harinya, mereka ditembak. Sebagian meninggal di tempat, sebagian lagi pura-pura mati terkapar.

Orang-orang bersenjata itu melanjutkan perjalanan menuju bukit Puncak Kabo, lalu 11 orang karyawan yang pura-pura mati berusaha melarikan diri, namun dikejar. Lima orang tertangkap dan dibacok hingga tewas di tempat. Adapun enam orang berhasil melarikan diri. Empat yang melarikan diri, bisa mencapai pos polisi, tapi dua orang lagi yang mengambil arah berbeda, belum juga muncul sampai laporan itu disampaikan.

Berikutnya, pada 4 Desember 2018, kelompok bersenjata juga menyerang pos TNI, akibatnya satu orang anggota TNI gugur.

Berdasarkan hal itu, menurut Kapendam Cendrawasih Kol M Aidi, jumlah korban tewas yang sudah dipastikan sebanyak 20 orang terdiri dari 19 orang pekerja PT Istaka Karya dan satu orang anggota TNI (BBC News, 9/12).

Aparat menyebut pelakunya adalah sebuah kelompok

pimpinan Egianus Kogoya. Menurut Sidney Jones, kelompok Egianus Kogoya merupakan sempalan dari kelompok Kelly Kwalik, komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tewas dalam penyerangan pada 2009. Anggota kelompok ini muda-muda dan lebih militan. Itu artinya, yang melakukan serangan dan pembantaian itu adalah kelompok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-OPM (TPNPB-OPM).

Hal itu juga ditegaskan oleh Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sanbom dalam keterangan tertulisnya pada 5 Desember 2018. Sebby mengakui bahwa OPM melalui sayap bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang melakukan semua itu. Sebby juga mengklaim bahwa OPM dan rakyat Papua tidak membutuhkan jalan trans-Papua seperti yang dikerjakan sekarang, maupun pembangunan dalam bentuk lain. Yang mereka butuhkan adalah kemerdekaan. Ini seperti dilansir viva.co.id (5/12).

Penyerangan dan teror sudah berulang kali terjadi di Papua. Data yang terekam media, setidaknya selama enam bulan terakhir telah terjadi sepuluh kali penyerangan dan teror di Papua.

Meski ada pengakuan dari OPM itu, anehnya pemerintah menyebut pelaku pembantaian itu sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Menko Polhukam Wiranto pernah mengatakan, mereka disebut kriminal karena mengancam dan memalak rakyat. Dalam konteks itu, aparat kepolisian bertindak untuk mengamankan para pelaku. Namun mereka juga melakukan kegiatan separatisme. Inilah mengapa penggunaan istilah KKB tidak tepat karena seolah menegaskan adanya gerakan separatisme di Papua. Maka di-

gunakan sebutan baru, Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Dengan penggunaan sebutan ini, TNI bisa bertindak untuk mengamankan para tersangka.

Tak Disebut Pemberontak

Muncul pertanyaan publik, kenapa aksi itu hanya disebut tindakan kriminal dan kelompok pelakunya hanya disebut KKB/KKSB? Kenapa tidak disebut aksi separatisme atau pemberontakan bersenjata? Padahal nyata-nyata tindakan itu bagian dari aksi-aksi termasuk aksi bersenjata untuk memisahkan Papua dari negara ini?

Menhan Ryamizard memilih menggunakan kata pemberontak daripada kelompok kriminal. "Mereka itu bukan kelompok kriminal, tapi pemberontak. Kenapa saya bilang pemberontak? Ya kan mau memisahkan diri, Papua dari Indonesia," ungkap Ryamizard di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Dengan penyebutan pelaku pembantaian sebagai KKB artinya aksi itu hanya dianggap sebagai kriminal atau gangguan keamanan. Dan itu artinya penanganan menjadi kewenangan penuh Polri dan TNI tidak bisa bertindak kecuali diminta oleh Polri. Berbeda jika aksi itu disebut sebagai aksi separatisme atau pemberontakan bersenjata, maka itu akan menjadi ranah TNI dan TNI bisa bertindak. Sebab sesuai dengan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI selain perang yakni mengatasi pemberontakan bersenjata.

Pemerintah melalui aparat keamanan juga terlihat menghindari penyebutan aksi itu dilakukan oleh OPM. Kenapa hal itu dihindari? Apakah karena pemerintah khawatir, penyebutan OPM dianggap secara politis

seolah mengakui keberadaan kelompok tersebut? Dan hal itu dikhawatirkan akan meningkatkan daya tawar gerakan itu di dunia internasional.

Aksi-aksi yang terjadi itu juga jelas-jelas termasuk aksi teror dan menimbulkan suasana teror di masyarakat. Meski begitu, aksi-aksi itu tidak disebut sebagai aksi terorisme oleh Pemerintah. Kenapa? Apakah karena takut terhadap tekanan internasional? Pada beberapa tahun lalu sempat muncul alasan kenapa aksi-aksi kekerasan dan bersenjata OPM tidak disebut terorisme dengan ungkapan, "nanti akan ada tekanan internasional".

Diakui atau tidak, persoalan separatisme OPM dengan berbagai aksi bersenjata memang memiliki dimensi internasional. Mengingat ada OPM melalui ULMWP (The United Liberation Movement for West Papua) bergerak secara internasional untuk menggalang dukungan internasional bagi kemerdekaan Papua. ULMWP sendiri telah membuka kantor di Inggris, Belanda, Australia dan Vanuatu. Juga telah ada dukungan dari beberapa politisi di Inggris, Australia dan negara-negara Pasifik.

Di sisi lain, dimensi internasional aksi-aksi OPM juga bisa muncul dari aspek HAM. Menteri Kehakiman Vanuatu Ronald Warsal dengan mengatasnamakan tujuh negara Pasifik (Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Nauru dan Kepulauan Solomon), pada awal Mei 2017 melancarkan tuduhan kepada pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM serius terhadap orang asli Papua di sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss (2/3/2017).

Tuduhan itu tidak ditindaklanjuti oleh PBB. Meski demikian, aspek HAM bisa dijadikan titik masuk bagi campur tangan

internasional. Apalagi dalam sejarah, beberapa orang senator dari Amerika Serikat juga pernah mempersoalkan aspek pelanggaran HAM di Papua.

Hingga sejauh ini, dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat baru datang dari sejumlah politisi secara individu. Tidak ada dukungan secara institusional yang berpengaruh baik dari partai apalagi negara. Belajar dari kasus lepasnya Timor Timur, separatisme itu akan sampai pada tingkat yang sangat membahayakan ketika sudah ada dukungan dari organisasi internasional atau dari negara-negara berpengaruh. Dukungan dari negara berpengaruh sendiri bisa muncul jika negara itu memandang kepentingan strategisnya akan lebih terkomodir dan terjamin jika suatu wilayah lepas dari negara induknya.

Dalam hampir semua kasus, kepentingan rakyat banyak di wilayah yang merdeka itu biasanya tidak terpenuhi sebagaimana yang dipropagandakan sebelumnya. Dalam kasus Timor Timur misalnya, belakangan terungkap dukungan dari Australia lebih dimaksudkan untuk bisa menguasai cadangan minyak di selatan laut Timor. Buktinya, saat ini terjadi perselisihan antara Timor Timur dengan Australia terkait cadangan minyak di selatan laut Timor itu.

Untuk di Papua, kekayaan alam terbesar yang berpotensi bisa menjadi faktor seperti cadangan minyak di laut Timor itu adalah kekayaan tambang emas yang saat ini dikuasai oleh Freeport (Amerika Serikat) dan pengelolaan cadangan gas yang dikuasai oleh BP (Inggris). Jika kepentingan penguasaan kekayaan alam itu terancam, buka mustahil dukungan terhadap kemerdekaan Papua akan dimajukan. Inilah yang harus diwaspadai. *Wallāh a'lam bi ash-shawāb.* [] Is



Aksi-aksi OPM di Papua telah nyata-nyata merupakan aksi teror, bukan sekadar terduga.

Aksi pembantaian setidaknya 19 orang pekerja PT Istaka Karya di Nduga Papua dan aksi-aksi kekerasan dan penyerangan lainnya yang dilakukan oleh OPM sebenarnya memenuhi semua unsur untuk disebut aksi terorisme.

Dalam kamus KBBI Kemendikbud dijelaskan, makna teroris adalah "orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik".

Sementara dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sepakat jika aksi kelompok kriminal bersenjata terhadap masyarakat sipil di Papua merupakan aksi terorisme. "Ini aksi terorisme di mana sebanyak 31 warga sipil yang sedang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua justru mereka jadi korban kebiadaban," ujarnya (BBC News, 5/12/2018).

Aksi teror di Papua itu memenuhi semua syarat untuk disebut aksi terorisme. Di situ ada unsur penggunaan kekerasan dan senjata, untuk motif politik, menimbulkan korban jiwa banyak warga sipil dan menimbulkan

kan teror. Namun tetap tidak disebut aksi terorisme oleh Pemerintah. Dan berikutnya, aksi-aksi itu tidak ditangani layaknya menangani ancaman terorisme.

Perlakuan itu jelas berbeda seratus delapan puluh derajat dengan perlakuan jika pelakunya adalah Muslim. Seperti dalam kasus Santoso di Poso. Aksi yang dilakukan Santoso dan kelompoknya sejak awal langsung dinyatakan sebagai aksi terorisme. Dan karena terorisme dianggap sebagai tindak kejahatan luar biasa, maka penanganan Pemerintah terhadap kelompok Santoso pun juga luar biasa. Untuk menumpas kelompok Santoso sampai dilakukan operasi militer dengan mengerahkan ribuan personel polisi dan tentara. Padahal jumlah anggota kelompok Santoso di Poso jauh lebih sedikit jika dibandingkan jumlah anggota TPN OPM, bahkan lebih sedikit dari jumlah anggota satu kelompok kecil TPN OPM yaitu kelompok yang dikomandoi oleh Egianus Kogoya yang diidentifikasi sebagai pelaku pembantaian di Nduga Papua. Menurut Kapolri Tito Karnavian, kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu berkekuatan sekitar 50 orang, dengan sekitar 20 pucuk senjata api. Kendati menurut keterangan TNI sebelumnya, mereka dibantu lebih dari 200 warga sipil (BBC News, 5/12/2018). Padahal masih ada beberapa kelompok lainnya.

Perlakuan terhadap OPM jauh berbeda dengan perlakuan terhadap siapa saja, Muslim, yang dituduh sebagai teroris. Banyak dari mereka baru terduga. Artinya, bisa ya benar dia terkait aksi teror dan bisa juga tidak terkait sama sekali. Ini juga dikuatkan dengan sejumlah kasus salah tangkap. Meski baru

terduga, toh mereka ditindak secara sedemikian keras dan banyak dari mereka ditembak mati tanpa sempat dibuktikan melalui proses hukum, itu artinya belum terbukti secara hukum sebagai pelaku terorisme.

Sementara, aksi-aksi OPM di Papua telah nyata-nyata merupakan aksi teror, bukan sekadar terduga. Korban aksi-aksi penyerangan oleh OPM selama ini juga sudah banyak jumlahnya. Banyak di antaranya, atau malah mungkin kebanyakannya adalah warga sipil, selain juga aparat dari anggota Polri dan TNI.

Ini bukan berarti membenarkan aksi yang dilakukan oleh Santoso dan kelompoknya, atau membenarkan "aksi teror" itu sendiri. Namun ini sekadar membandingkan perlakuan dan tindakan terhadap aksi teror yang dirasakan dan dinilai oleh publik ternyata diperlakukan dan ditindak secara berbeda.

Perbedaan perlakuan dan tindakan itu bisa menimbulkan persepsi di tengah publik, khususnya umat Islam, bahwa sebutan teroris dan terorisme hanya untuk aksi yang pelakunya Muslim. Sedangkan jika pelakunya non Muslim, meski aksinya lebih keras, lebih meneror, dan lebih banyak korbannya, hanya disebut sebagai KKB seperti dalam kasus OPM, atau hanya disebut tindakan kriminal seperti dalam kasus bom Mal Alam Sutura. Atau bahkan sepi dari sebutan tindakan kriminal apalagi aksi terorisme seperti dalam kasus pembakaran masjid di Tolikara.

Semua itu juga mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan oleh rezim dalam masalah keamanan dan penindakan aksi kekerasan dan teror masih menggunakan pen-

dekatan, kerangka, dan cara pandang Barat. Yakni, sebutan dan penindakan terorisme hanya dialamatkan terhadap para pelaku Muslim. Juga terkesan menjadikan Islam sebagai sasaran. Ini juga diperkuat dengan penggunaan sebutan radikal, fundamentalis, ekstremis dan teroris, yang hanya diarahkan kepada pelaku Muslim. Sebaliknya

nya jika pelakunya non Muslim hanya disebut tindakan kriminal saja. Semua itu sama seperti pendekatan, perlakuan dan kerangka yang digunakan di Barat. Semua itu boleh jadi akan makin menguatkan kesan di benak publik bahwa rezim ini adalah rezim yang anti Islam. *Wallâh a'lam.* [] **yahya abdurrahman**

SERANGAN OPM

Organisasi separatis Papua terus melangsungkan aksi kekerasan dalam beberapa bulan belakangan. Sudah banyak nyawa yang jatuh. Tapi, seolah nyawa itu dinilai murah saja. Tidak ada pernyataan bahwa mereka adalah teroris yang harus dibabat habis.

Berikut aksi mereka yang terekam media sejak Juni 2018.

- **22 Juni 2018**
Pesawat Dimonim ditembak KKB di Bandara Kenyam, Nduga; satu orang terluka (Kopilot).
- **25 Juni 2018**
Warga sipil di Kenyam, Kab Nduga, tiga tewas.
- **27 Juni 2018**
KKB menyerang ASN dan sipil; Camat dan dua sipil tewas.
- **6 Agustus 2018**
KKB menyerang petugas survei PLN dan TNI di Kab Paniai; tiga prajurit TNI terluka, tiga senjata dirampas pemberontak.
- **7 Agustus 2018**
Kontak senjata dengan petugas Polres Puncak Jaya di Distrik Irimuli, Kab Puncak Jaya.
- **17 Agustus 2018**
KKB menyerang truk di kawasan mile 65 PT Freeport di Timika, Kab Mimika.
- **2 Oktober 2018**
Kontak senjata dengan TNI di Distrik Tingginambut, Kab Puncak Jaya; dua pemberontak tewas.
- **12 November 2018**
KKB menembak pengemudi ojek di Distrik Wiringgambur, Kab Lanny Jaya.
- **1 Desember 2018**
KKB menembak pekerja PT Istaka Karya; 19 tewas.
- **3 Desember 2018**
KKB menyerang Pos TNI 755/Yalet; 1 prajurit TNI tewas.
- **5 Desember 2018**
Kontak senjata Tim Belukar (TNI/Polri) dan KKB saat pengambilan jenazah pekerja PT Istaka Karya; satu anggota tim belukar tertembak. []

Cara Nabi Membangun Pondasi Negara

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Di dalam Madinah, ada tiga kekuatan: kaum Muslim, baik Anshar maupun Muhajirin, musyrik yang kemudian masuk Islam, dan jumlah mereka tinggal sedikit, terakhir Yahudi. Sedangkan di luar Madinah, kekuatan yang paling keras perlawanannya terhadap Islam adalah Quraisy. Suku ini sudah mencoba melakukan berbagai cara teror, intimidasi, tekanan, strategi pemboikotan dan berbagai cara, selama 13 tahun, ketika kaum Muslim masih di bawah kekuasaan mereka, di negeri kufur.

Ketika kaum Muslim hijrah ke Madinah, tanah, rumah dan harta mereka pun dirampas. Tak hanya itu, mereka pun dihalangi agar tidak lagi bisa berhubungan dengan keluarganya. Siapa yang bisa mereka tahan, mereka tahan, mereka siksa, bahkan Nabi SAW pun mereka hendak bunuh sebelum sampai ke Madinah.

Namun, setelah kaum Muslim berhasil melintasi berbagai rintangan ini, kaum Quraisy pun memainkan peran politiknya dengan memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin keagamaan di tengah-tengah bangsa Arab dan poros perdagangan, sehingga menyeret kaum musyrik Arab dalam perang melawan penduduk Madinah. Madinah pun mengalami pemboikotan dari berbagai penjuru, sementara jumlah pendatang yang datang ke sana, dari hari ke hari terus bertambah.

Ini berbagai situasi dan problem yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika menginjakkan kakinya di Madinah, menjadi kepala negara baru, sebagai Nabi, pemimpin dan panglima. Nabi SAW pun mulai melaksanakan peranannya sebagai Rasul sekaligus pemimpin di Madinah dengan membuktikan kepada tiap kaum, apa yang berhak mereka dapatkan, baik kasih sayang maupun ketegasan. Sampai akhirnya urusan tersebut benar-benar kembali kepada Islam dan pemeluknya dalam beberapa tahun.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Rasulullah SAW telah tiba di Madinah, singgah di Bani Najjar pada hari Jumat, 12 Rabiul Awwal 1 H/27 September 622 M. Baginda SAW singgah di tanah depan rumah Abu Ayyub al-Anshari. Baginda SAW bersabda, *"Di sinilah, insyaallah, tempat tinggal. Kemudian baginda berpindah ke kediaman Abu Ayyub al-Anshari."*

Membangun Masjid Nabawi

Langkah pertama Nabi SAW adalah membangun Masjid Nabawi. Tempat yang digunakan untanya untuk berhenti, dan duduk itu kemudian dibangun di atasnya Masjid Nabawi. Baginda SAW membeli tempat tersebut dari kedua anak yatim, yang menjadi pemilik tanah tersebut. Nabi SAW sendiri memberikan andil membangunnya, dengan tangan baginda SAW sendiri, dengan mengangkat batu dan adonan

"semen". Seraya melantunkan syair:

"Ya Allah, tiada kehidupan, kecuali kehidupan akhirat"

Ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin.

Pengangkut ini tidaklah sama nilainya dengan pengangkut [benteng] Khaibar

[Karena] ini merupakan bentuk ketatan kepada Tuhan kami, dan lebih suci."

Ungkapan Nabi itu membuat para sahabat semakin bersemangat membangun masjid, hingga salah seorang di antara mereka berkata:

"Kalau kita duduk saja [tidak bekerja], padahal Nabi bekerja"

Karena itu, kita harus memberikan jerih

kang. Kedua sisinya juga sama.

Tak hanya membangun Masjid Nabawi, Nabi SAW juga membangun beberapa rumah dengan batu, dan adonan yang sama. Atapnya terbuat dari pelepah dan pokok kurma. Itu adalah rumah-rumah istri Nabi SAW. Setelah rumah-rumah tersebut selesai, maka Nabi SAW berpindah dari rumah Abu Ayyub al-Anshari ke rumah tersebut. [Lihat, al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz I/71, 555, 560; Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad*, Juz II/56]

Masjid Nabawi bukan hanya digunakan untuk menunaikan shalat saja, tetapi merupakan kampus [jami'ah], dimana di sana kaum Muslim mendapatkan pelajaran

lebih 400 orang.

Mempersaudarakan Kaum Muslim

Selain Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, yang menjadi pusat pertemuan, baginda SAW juga melakukan tindakan lain yang luar biasa yang dicatat dalam sejarah sebagai tindakan yang sangat fantastis. Ketika baginda SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar. Tindakan ini dilakukan oleh Nabi SAW di rumah Anas bin Malik, mereka berjumlah 90 orang. Separuh dari Muhajirin dan separuh lagi dari Anshar.

Mereka dipersaudarakan oleh Nabi SAW untuk saling berbagi dan saling mewarisi setelah mereka meninggal, padahal tidak mempunyai hubungan kekerabatan sampai terjadinya Perang Badar, saat Allah menurunkan QS al-Anfal [8]: 75. Setelah turun ayat ini, Allah membatalkan waris di antara mereka, kecuali dengan sesama kerabat yang mempunyai hubungan darah. Strategi Nabi SAW mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin ini sekaligus menghapus sentimen jahiliah sehingga yang ada hanya sentimen Islam. Perbedaan nasab, warna kulit dan tanah kelahiran pun hilang, sehingga tak seorang pun melangkah, kecuali karena *muruah* dan ketakwannya.

Rasulullah SAW telah menjadikan ukhuwah ini sebagai ikatan yang benar-benar kuat, bukan kata-kata kosong, tanpa bukti. Perasaan mendahulukan orang lain, saling berbagi, dan kasih-mengasihi benar-benar menghiiasi ukhuwwah ini, dan memenuhi masyarakat baru ini dengan keteladanan yang luar biasa. Rasulullah SAW memberi contoh dengan mengajak Ali bin Abi Thalib sebagai saudaranya. Kemudian diikuti oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, dengan Zaid bin Haritsah; Abu Bakar ash-Shiddiq, bersaudara dengan Kharizah bin Zaid. 'Umar bin al-Khattab dengan Itban bin Malik al-Khazraji (Ansar). Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi (Ansar).

Selain itu, Nabi SAW menyusun Piagam Madinah. Piagam ini benar-benar menjadi pondasi, selain dua strategi Nabi SAW di atas, yang berhasil digunakan baginda SAW untuk menghimpun kekuatan di dalam Madinah, dan menyatukan mereka di bawah kepemimpinan baginda SAW. Mereka yang diikat oleh Piagam Madinah ini saling bahu-membahu di antara sesama mereka, dan melindungi dari pihak manapun yang hendak menyerang mereka.

Dengan kebijakan Nabi SAW yang luar biasa ini, baginda SAW telah berhasil membangun pondasi masyarakat baru, yang luar biasa. Masyarakat Islam yang pertama kali yang dibangun Nabi SAW di bawah naungan Negara Islam yang pertama di Madinah al-Munawwarah. *Wallahu a'lam.*



Masjid Nabawi bukan hanya digunakan untuk menunaikan shalat saja, tetapi merupakan kampus [jami'ah], juga forum [muntada]; sekaligus basis administrasi dan manajemen semua urusan rakyat, juga majelis permusyawaratan, dan pelaksanaannya.

payah yang lebih.."

Ketika itu, di tempat tersebut ada kuburan kaum musyrik, kebun kurma dan pohon gharqad. Nabi SAW memerintahkan agar kuburan kaum musyrik tersebut dibongkar, kebun kurma dan pohon gharqad ditebangi, di mana posisinya ada di arah kiblat masjid. Kiblat masjid saat itu mengarah ke Masjidil Aqsha. Dua tiangnya dibangun dari batu, lalu dindingnya dibangun dari adonan dan tanah liat. Atapnya dibuat dari pelepah kurma, tiangnya dibuat dari pokok kurma, sedangkan lantainya dari kerikil dan pasir. Masjid Nabawi saat itu mempunyai tiga pintu. Panjangnya 100 Dira', dari ujung kiblat hingga bagian belat-

tentang Islam, arahan tentang Islam; juga forum [muntada] di mana semua elemen kabilah yang pada zaman jahiliyah saling berperang dan konflik bertemu di sana; sekaligus basis administrasi dan manajemen semua urusan rakyat, dari sanalah semua misi diberangkatkan; juga wadah musyawarah untuk mengadakan majelis permusyawaratan, dan pelaksanaannya.

Meski pada waktu yang sama, Masjid Nabawi juga menjadi rumah bagi sejumlah orang miskin, yaitu fuqara' Muhajirin, yang belum mempunyai rumah, harta, keluarga dan anak di Madinah. Mereka ditempatkan Nabi SAW di Suffah, sehingga dikenal sebagai ahli Suffah. Jumlah mereka kurang

**#2019SEJUTAQURAN BANGKITKAN INDONESIA**

Jakarta. Serikat Saudagar Nusantara memberikan dukungan kepada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) untuk menyukseskan Program Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan (WAP): #2019SejutaQuran Bangkitkan Indonesia, Selasa (18/12). []

**MENJADI GURU BERKUALITAS PEMBAWA PERUBAHAN**

Madura. Sekitar 60 guru mengikuti seminar pendidikan *Menjadi Guru Berkualitas Pembawa Perubahan* yang diselenggarakan Muslimah Peduli Generasi, Ahad, (9/12) di Pamekasan, Madura. []

**PEMOEDA HIJRAH KONAWE KAMPANYE BEBAS HIV/AIDS**

Konawe. Pemoeda Hijrah Konawe menggelar talkshow *Yuk Hijrah: 2019 Gemilang, Bebas HIV/AIDS* Ahad, (2/12) di Aula SMKN 1 Unaaha. dr. Fauzan Azhari Marzuki, M.Kes., Sp.KK. hadir sebagai pembicara. []

**INTELKTUAL MUSLIM JATIM: YANG MENAKUTKAN ITU LIBERALISME, BUKAN SYARIAH!**

Malang. Dalam forum diskusi *Malang Intellectual Club: Siapa Genderuwo yang Menghantui Indonesia?* Sekitar 40 intelektual Muslim dari sejumlah kota di Jawa Timur menegaskan yang menakutkan itu liberalisme bukan syariah, Ahad (25/11). []

**MUSLIMAH TIDAR COMMUNITY SELENGGARAKAN TALKSHOW REMAJA**

Magelang. Muslimah Tidar Community (MTC) menyelenggarakan *Talkshow Inspiratif: Millennials, Let's Make Islam Great Again!*, Ahad (18/11). []

**MABIT BARENG TCM**

Jember. Sekira 30 mahasiswa mengikuti Malam Bina Iman dan Takwa (Mabit) yang diselenggarakan Tsaqofah Center Al-Mumtaz pada Sabtu-Ahad, 17-18 November. []

**KAJIAN ISLAM LOVERS COMMUNITY (ILC) DI IAIN MADURA**

Madura. Sekitar 26 mahasiswi dari berbagai kampus di Pamekasan mengikuti kajian bulanan *Agent Of changes di Era Milenial* yang diselenggarakan Islam Lovers Community (ILC) Madura, Jumat (16/11) di IAIN Madura. []

**MULTAQA ULAMA DAN TOKOH UMAT SOLORAYA**

Solo. Sekitar 70 ulama, tokoh umat dan aktivis dakwah mengikuti *Multaqa Ulama dan Tokoh Umat Soloraya: Meneladani Nabi Muhammad SAW, dalam Mewujudkan Kepemimpinan yang Islami*, Ahad (16/12). []

Khilafah Membebaskan Raja Prancis

Raja Prancis, Francis I (1494-1547 M) pernah menjadi tawanan Jerman, Chalken, setelah kekalahan sang Raja dalam Perang Bavia, yang telah berlangsung 24 Februari 1525 M.

Setelah sang Raja ditawan Jerman, Raja Francis I, yang menjadi tawanan dan ibundanya, Ratu Danco, masing-masing mengirim surat kepada imperium terbesar sekaligus sultan terbesar kala itu, baik di Eropa maupun seluruh dunia, yaitu Sultan Sulaiman al-Qanuni, khalifah kaum Muslim, di era Khilafah 'Utsmani. Keduanya mengharap bantuan Sultan, agar Sultan mengintervensi Jerman, sehingga Jerman bersedia membebaskan Raja Francis I.

Duta Besar Prancis untuk Khilafah 'Utsmani, Jean Fragipani, menyampaikan dua surat tersebut kepada Sultan Sulaiman al-Qanuni. Surat ibunda Raja yang tertawan, yaitu Ratu Danco, benar-benar menyentuh hati Sultan. Surat itu isinya, *"Hamba sudah lama berharap, hingga kini, akan dibebaskannya putra hamba sebagai tawanan, berharap pada keadilan dan maruah Charkan, tetapi harapan hamba pupus. Karena dia tetap saja menghinakan putra hamba. Karena seluruh dunia mengetahui kemuliaan, kemasyhuran dan keagungan Paduka, maka hamba berkirim surat kepada Paduka, agar Paduka yang Mulia berkenan melakukan upaya melepaskan dan membebaskan putra hamba."*

Setelah mereka membacakan surat tersebut kepada Sultan, dan menerjemahkannya untuk Sultan, maka Sultan menoleh ke arah para pembantu dan penasihatnya, sembari bertitah kepada mereka tentang derita sang ibu, *"Bagaimana pendapat kalian tentang duka seorang ibu yang penuh kesedihan dan penderitaan, memikirkan putranya?"*

Maka, setelah itu, Sultan pun menulis dua pucuk surat kepada Raja yang tertawan, Francis I, dan yang lain untuk ibundanya, Ratu Danco.

Surat yang ditulis bagi Raja Francis I, isinya, antara lain, *"Kepada Francis, Raja 'Ayalah' Prancis. Surat Anda telah sampai ke Sultanah, melalui orang Anda, Duta Anda, Fragipani, sebagaimana Anda mengirimnya melalui perantara secara lisan, dari sana saya paham, bahwa musuh telah memasuki negeri Anda. Sementara Anda hingga sekarang masih ditawan. Anda membutuhkan bantuan kami, khususnya dalam masalah ini."*

Sebenarnya bukan hal yang mengherankan, jika para Raja itu kalah dan ditawan. Karena itu, Anda jangan berputus asa, karena kuda-kuda dan pendang-pedang kami selalu siap, baik siang maupun malam. Insya Allah, masalahnya akan berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Masyi'ah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kemenangan maupun kebaikannya."

Dengan mencermati surat Sultan Sulaiman al-Qanuni ini, kita tahu bahwa Sultan tidak memandang Prancis kala itu sebagai sebuah negara. Ia hanya memandangnya sebagai "Ayalah", yaitu salah satu bagian, atau provinsi di Prancis. Ia tidak memandang kerajaannya, kecuali sebagai Raja atas bagian kecil itu. Di satu sisi untuk menghiburnya, di sisi lain untuk menghinakannya, atas kekalahan dan penawanannya. Ia tidak menjanjikan masa depannya, dengan "janji yang tidak jelas", sembari bertitah, *"Sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Adapun kuda-kuda dan pedang-pedangnya selalu siap."*

Begitulah, cara Sultan Sulaiman al-Qanuni merespons

keinginan Sang Raja yang tertawan ini. Padahal, sebenarnya Sultan tidak mau menampakkan strategi dan rencananya untuk menghadapi peperangan. Namun, telah sampai kepadanya, bahwa Dunia Kristen sedang menyiapkan Perang Salib besar-besaran melawan Negara 'Utsmani.

Karena itu, ia sebenarnya tengah menyiapkan diri untuk menghadapi Perang Salib ini. Setelah persiapannya selesai, ia mengerahkan pasukannya ke Austria. Di sana, ia menghadapi tentara gabungan negara-negara Eropa, dalam Perang Salib. Negara-negara yang paling penting dalam Perang Salib ini adalah: Austria, Jerman, Italia, Spanyol, Cekoslovakia, Belanda, Vatikan dengan pasukannya. Di sana terjadilah Perang Mohak, yang bersejarah, antara dua kekuatan Kristen dan Islam, pada 29 Agustus 1526 M.

Peperangan ini telah berlangsung sengit karena tentara gabungan yang terlibat di sana sangat kolosal. Namun, dengan izin Allah, kemenangan berpihak pada tentara kaum Muslim. Sedangkan kekalahan besar berpihak pada raja-raja Eropa dan pasukannya.

Setelah Chalken, Raja Jerman, yang terlibat dalam Perang Gabungan ini mengalami kekalahan yang luar biasa, maka ia pun diminta angkat kaki dari ketamakannya atas beberapa wilayah 'Utsmani di Eropa, sebagaimana dia dipaksa untuk membebaskan Francis I, Raja Prancis yang tertawan itu, karena dia tahu Sultan Sulaiman al-Qanuni menginginkan itu.

Akhirnya, Raja Prancis pun bebas. Itulah jasa Khilafah pada Prancis, yang tak akan pernah mereka lupakan. **har**

KRISTOLOGI

Tahun Baru Budaya Paganisme

Oleh: **Hj Irena Handono**, Pakar Kristologi, Pendiri Irena Center

Sebelum lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi. Hingar-bingar perayaan malam Tahun Baru dengan terompet, topi kerucut, petasan, aksi konvoi keliling kota dengan memakai kendaraan yang knalpotnya kebetulan suaranya "dipecah" sehingga memekakkan telinga, akan dimulai.

Kalau mau jujur, ternyata yang merayakan perayaan Tahun Baru dengan penuh suka cita adalah kebanyakan dari saudara kita juga. Ini dikarenakan acara tahun baruan sudah menjadi budaya yang lazim diperingati oleh siapa saja, termasuk oleh kaum Muslimin.

Perayaan Tahun Baru menjadi rutinitas masyarakat umum tak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia dan bahkan dinegeri-negeri Muslim. Namun sesungguhnya umat Islam sudah tertipu. Kali ini kita akan membahas masalah tahun baru, terompet dan topi kerucut serta kaitannya dengan budaya pagan, budaya kafir.

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." (Hadits Riwayat Abu Dawud)

Asal muasal dari perayaan Tahun Baru Masehi ini sangat penting untuk kita ketahui. Mengapa harus 1 Januari? Dan budaya dari kaum apakah perayaan tersebut? Hal itu dimaksudkan agar kita tidak terjebak oleh ketidaktahuan kita yang akan menyebabkan kita terlempar ke dalam kesesatan.

Sejarah Tahun Baru 1 Januari

Jika kita buka *The World Book Encyclopedia* tahun 1984, volume 14, halaman 237 tentang Tahun Baru, dikatakan:

"Penguasa Romawi Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru semenjak abad ke 46 SM. Orang Romawi mempersembahkan hari ini (1 Januari) kepada Janus, dewa segala gerbang, pintu-pintu, dan permulaan (waktu). Bulan Januari diambil dari nama Janus sendiri, yaitu dewa yang memiliki dua wajah – sebuah wajahnya menghadap ke (masa) depan dan sebuahnya lagi menghadap ke (masa) lalu."

Siapa sosok Dewa Janus? Dalam mitologi Romawi Dewa Janus adalah sesembahan kaum Pagan Romawi, dan pada peradaban sebelumnya di Yunani telah disembah sosok yang sama bernama Dewa Chronos. Kaum Pagan, atau dalam bahasa kita disebut kaum kafir penyembah berhala, hingga kini biasa memasukkan budaya mereka ke dalam budaya kaum lainnya, sehingga terkadang tanpa sadar kita mengikuti mereka.

Sejarah pelestarian budaya Pagan (penyembahan berhala) sudah ada semenjak zaman Hermaic (3600 SM) di Yunani, dan dikawal oleh sebuah persaudaraan rahasia yang disebut sebagai Freemasons. Freemasons sendiri adalah kaum yang memiliki misi untuk menyebarkan ajaran para Nabi dari dunia ini.

Bulan Januari (bulannya Janus) juga ditetapkan setelah Desember dikarena-

kan Desember adalah pusat Winter Soltice, yaitu hari-hari di mana kaum pagan penyembah matahari merayakan ritual mereka saat musim dingin. Puncak Winter Soltice jatuh pada tanggal 25 Desember, dan inilah salah satu dari sekian banyak pengaruh Pagan pada budaya Kristen selain penggunaan lambang salib. Tanggal 1 Januari sendiri adalah seminggu setelah pertengahan Winter Soltice, yang juga termasuk dalam bagian ritual dan perayaan Winter Soltice dalam Paganisme.

Kaum Pagan sendiri biasa merayakan tahun baru mereka (atau Hari Janus) dengan mengitari api unggun, menyalakan kembang api, dan bernyanyi bersama. Kaum Pagan di beberapa tempat di Eropa juga menandainya dengan memukul lonceng atau meniup terompet.

Terompet Yahudi

Masyarakat pagan kuno mempercayai tiap 2150 tahun akan terjadi perubahan era. Era Taurus terjadi pada 3400 SM hingga 2150 SM. Era taurus disimbolkan dengan kerbau/sapi, menurut Bibel Perjanjian Lama di tahun inilah terjadi penyembahan kerbau/sapi oleh umat Nabi Musa.

Dan masa penyembahan tersebut berakhir ketika memasuki masa era Aries 2150 SM hingga 1 Masehi. Aries disimbolkan dengan seekor domba dengan tanduk melintir. Karena itulah hingga saat ini umat Yahudi ortodoks memelihara kuncir di samping telinga yang menyerupai tanduk

melintir dan mereka juga menggunakan terompet berbentuk tanduk domba.

Topi Kerucut

Sebagaimana yang telah saya tulis dalam buku *Menyingkap Fitnah & Teror*. Topi kerucut mempunyai sejarah yang bermula pada masa Muslim Andalusia. Saat itu terjadi pembantaian Muslim Andalusia yang dilakukan oleh Raja Ferdianand dan Ratu Isabela yang dikenal dengan peristiwa Inkuisisi Spanyol. Inkuisisi dimulai semenjak tahun 1492 dikeluarkannya Dekrit Alhambra yang mengharuskan semua non-Kristen untuk keluar dari Spanyol atau memeluk Kristen. Muslim yang memilih tetap tinggal dilumpuhkan secara ekonomi dan diisolasi dalam kampung-kampung tertutup yang disebut Gheto untuk memudahkan pengawasan terhadap aktifitas Muslim.

Tidak cukup hanya diisolasi, tapi Muslim Andalusia harus menggunakan pakaian khusus berupa rompi dan topi kerucut yang disebut SANBENITO. Ketika orang Barat menggunakan topi ini dalam pesta-pesta mereka, sejatinya mereka merayakan kemenangan atas jatuhnya Muslim Andalusia dan keberhasilan Inkuisisi Spanyol. Masa demi masa berlalu topi kerucut ini kemudian menjadi budaya yang digunakan oleh umat Islam dalam merayakan tahun baru masehi dan ulang tahun.

Masih mau merayakan Tahun Baru?[]



Oleh: **Prof Dr Ing Fahmi Amhar**

Sebagian orang menduga bahwa perkembangan sains di masa keemasan peradaban Islam adalah dipicu oleh filsafat yang semula dipelajari dari buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Yunani. Adalah para mutakalimin yang dipaksa keadaan untuk belajar filsafat, yakni untuk meladeni perdebatan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Syam yang sudah terlebih dahulu menekuni filsafat Yunani. Namun menurut Imam an-Nabhani (dalam kitab Syakhshiyah Islamiyah juz 1), generasi kedua setelah mutakalimin sudah menekuni filsafat tak lagi untuk modal berdebat, tetapi sudah murni karena filsafat ternyata olah pikir yang mengasyikkan.



■ Lukisan tahun 1509 tentang Plato (kiri) dan muridnya: Aristoteles (kanan)

Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. **Filsafat tidak didalami dengan eksperimen dan percobaan ilmiah**, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis dengan berbagai premis dan aksioma, mengajukan beberapa solusi, lalu memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses itu dimasukkan ke dalam sebuah dialektika. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir rasional dan logika bahasa.

Logika merupakan ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Itu membuat filsafat sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, rasa penasaran dan ketertarikan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain dengan sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal.

Kata falsafah atau filsafat merupakan kata serapan dari bahasa Arab *فلسفة*, yang juga diambil dari bahasa Yunani; *Φιλοσοφία* (*philosophia*). Kata ini merupakan kata majemuk dari kata (*philia* = persahabatan, cinta) dan (*sophia* = "kebijaksanaan"). Sehingga arti harfiahnya

berarti seorang "pencinta kebijaksanaan".

Oleh para pengamat, filsafat diklasifikasikan menurut wilayah dan menurut agama. Menurut wilayah, filsafat bisa dibagi menjadi: filsafat Barat (Yunani, Eropa), Timur (Cina), dan Timur Tengah (Arab, Persia). Sementara, menurut agama, filsafat dibagi menjadi: filsafat Islam, filsafat Budha, filsafat Hindu, dan filsafat Kristen.

Dalam tradisi filsafat Barat, dikenal adanya pembedaan dalam filsafat yang menyangkut tema tertentu. Secara umum filsafat membicarakan ontologi (di dalamnya ada fisika dan metafisika), epistemologi, dan aksiologi (etika+estetika).

Metafisika mengkaji hakikat segala yang ada. Di sini, hakikat yang ada dan eksistensi secara umum dikaji dalam Ontologi. Adapun hakikat manusia dan alam semesta dibahas dalam Kosmologi. Dalam metafisika sendiri ada berbagai perbedaan teori-teori filsafat. Idealisme, misalnya, meyakini bahwa realitas ada hanya di dalam mental (jadi "banyak atau bagus, itu karena pikiran kita mengatakan banyak atau bagus"), sementara realisme menyatakan bahwa realitas, setidaknya beberapa bagiannya, memang benar-benar ada secara independen dari pikiran.

Kemudian epistemologi, ini cabang filsafat yang mengkaji hakikat dan wilayah pengetahuan, seperti batas, sumber, serta kebenaran suatu pengetahuan. Skeptisisme adalah posisi yang mempertanyakan kemungkinan yang benar-benar membenarkan kebenaran apapun. Argumen regresi, terjadi ketika untuk membenarkan pernyataan apapun, diperlukan dukungan oleh pembeneran yang lain. Rasionalisme adalah penekanan pada penalaran sebagai sumber pengetahuan. Empirisme adalah penekanan pada bukti pengamatan melalui pengalaman indrawi atas bukti lain sebagai sumber pengetahuan. Parmenides (500 SM) berpendapat bahwa berpikir harus memiliki objek, dan karena itu, jika ada yang melampaui pemikiran, maka objek tersebut mustahil dapat dipikirkan dengan benar.

Sedang aksiologi adalah yang membahas masalah nilai atau norma yang berlaku pada kehidupan manusia. Dari sini lahirlah dua cabang filsafat yang membahas kualitas hidup manusia: etika dan estetika. Etika, membahas tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak dan mempertanyakan bagaimana kebenaran dari dasar tindakan itu dapat diketahui. Sedang estetika membahas mengenai keindahan dan implikasinya pada kehidupan.

Yang sering disebut filsafat Islam adalah filsafat yang seluruh pelakunya Muslim. Ada perbedaan besar dengan filsafat lain: *Pertama*, meski semula para filsuf Muslim klasik menggali karya filsafat

Yunani terutama Aristoteles dan Plato, namun kemudian menyesuikannya dengan ajaran Islam. Kedua, karena Islam agama tauhid, maka, bila dalam filsafat lain masih 'mencari Tuhan', dalam filsafat Islam justru Tuhan 'sudah ditemukan', sehingga filsuf Islam relatif lebih fokus kepada manusia dan alam, karena sebagaimana mafhum, pembahasan Tuhan hanya menjadi suatu pembahasan yang tak pernah ada akhirnya.

Hanya saja, kadang-kadang ada sebagian filsuf, yang terpancing untuk memikirkan alam ghaib seperti sifat-sifat Allah, malaikat atau akhirat, dan akhirnya mendapat kesimpulan yang sesat, misalnya bahwa alam ini qadim atau azali, tetapi surga ternyata tidak kekal. Pemikiran ini tentu saja tidak mungkin divalidasi, karena seperti kata Parmenides, objeknya melampaui pemikiran. Namun para filsuf ini kadang menisbahkan pemikiran sesatnya ini pada beberapa filsuf kondang dalam dunia Islam, misalnya Ibnu Sina atau Ibnu Rusyd.

Ibnu Sina hidup antara 980-1037 M. Dia seorang polymath, hafal Quran, dokter terkenal (pengarang Kitab Qanun fit Thib - ensiklopedi kedokteran), juga penggemar ilmu matematika, fisika, geografi, astronomi dan juga filsafat (seperti tertuang dalam kitab *as-Syifa*).

Pada 1058 - 1111 M hidup Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Ghazali (Imam Ghazali) yang pernah menekuni filsafat sebelum beralih ke ilmu-ilmu agama dan menulis *masterpiece*-nya "Ihya Ulumuddin". Al-Ghazali mendapatkan bahwa banyak orang awam mempraktekkan filsafat secara keliru sehingga tersesat. Maka al-Ghazali lalu menulis kitab "Tahafut-Falasifah" (Kerancuan Filsafat). Kitab ini membuat banyak ulama kemudian menjauhi filsafat, bahkan memusuhi para filosof, bahkan sebagian tanpa pernah membaca langsung kitab filsafat itu seperti apa, atau berdiskusi dengan seorang filosof pun. Pada waktu itu, ilmu fisika pun masih dimasukkan sebagai bagian dari filsafat.

Setelah al-Ghazali wafat, pada 1126 - 1198 M hidup Abū l-Walid Muhammad Ibn 'Ahmad Ibn Rusyd (Ibnu Rusyd), seorang mujtahid (penulis kitab "Bidayatul Mujtahid") yang juga polymath (ahli matematika, fisika, geografi, astronomi, kedokteran, dan filsafat) yang melihat bahwa kitab al-Ghazali ini telah menyebabkan orang menjauhi aktivitas ilmiah (yang disimbolkan dengan para filosof), sehingga menimbulkan kemunduran dalam taraf berpikir umat. Dia akhirnya menulis kitab "Tahafut-Tahafut" (Kerancuan kitab Tahafut Falasifah al-Ghazali). Intinya, filsafat itu bisa menyesatkan bila dipraktekkan oleh orang awam atau orang yang belum memiliki dasar akidah yang kuat. Kritik al-Ghazali itu tepat, bila disampaikan kepada para

filosof, agar mereka lebih berhati-hati mengajarkan filsafat, tetapi menjadi keliru, bila beredar di kalangan yang awam pada filsafat, yang akhirnya jadi memusuhi para filosof. Kalau melihat tahun hidup mereka yang tidak bersinggungan, kita jadi tahu, bahwa "dialog peradaban Al-Ghazali - Ibn Rusyd" sebenarnya hanya searah, karena mereka sesungguhnya tidak pernah bertemu.

Namun karena Ibn Rusyd hidup di Maghreb (Maroko), sementara saat itu di Timur Tengah sedang berkecamuk perang Salib, sepertinya kitab Tahafut-Tahafut kurang bergema. Maka tak heran, pada 1263-1328 M hidup Taqiyyuddin Ahmad ibn Taymiyyah (Ibn Taimiyah). Dia termasuk yang mengikuti buku Tahafut Falasifah al-Ghazali, bahkan lebih ekstrim lagi. Dia "mengadili" Ibnu Sina. Padahal mereka terpaut hampir 2 abad. Ibnu Sina tidak bisa menjelaskan apa yang keliru dipahami, sebagaimana ia juga tidak bisa menjelaskan kepada al-Ghazali. Namun demikianlah, Ibn Taimiyah memvonis Ibnu Sina sesat dan kafir. Dan pendapat Ibn Taimiyah ini yang berabad-abad kemudian diikuti sebagian ulama.

Memang, sebagaimana ada "pencela yang fanatik", ada juga "pemuja yang fanatik". Yang adil adalah yang di tengah, yang menilai secara proporsional berdasarkan bukti-bukti empiris yang kuat atas fakta yang dihukumi, dengan istidlal dalil syara' yang juga ilmiah. Apa yang hari ini dinisbatkan ke Ibnu Sina, belum tentu shahih berasal dari Ibnu Sina, sebagaimana apa yang hari ini diklaim sebagai "hadits", boleh jadi adalah hadits palsu yang tidak pernah berasal dari Rasulullah. Semoga Allah senantiasa menunjuki kita jalan yang benar itu benar, agar kita dapat mengikutinya; dan jalan yang salah itu salah, sehingga kita dapat menjauhinya.

Namun yang jelas, sejarah kemudian mencatat, bahwa yang benar-benar berkembang dalam peradaban Islam bukanlah "filsafat ghaib" (metafisika) yang tak bisa diuji, tetapi "filsafat alam", yang berbasis pengamatan dunia empiris. Filsafat alam inilah yang lalu berkembang menjadi ilmu fisika, kimia, astronomi dan sebagainya. Isaac Newton masih menulis buku dalam bahasa Latin berjudul "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica" ("Matematika prinsip-prinsip filsafat alam"). Jadi definisi filsafat memang telah berkembang.

Namun juga tidak terlalu salah untuk mengatakan, bahwa sebenarnya Islam tidak memerlukan filsafat. Islam jelas membutuhkan logika dan matematika. Namun apa yang harus dipelajari, bagaimana mempelajarinya, serta soal nilai dan norma, semua sudah dijelaskan di dalam Qur'an dan Sunnah. Tinggal tugas para mujtahid dan ilmuwan untuk menjabarkannya.[]

Media Kuno Belanda: Khilafah Pendorong Nusantara Melawan Belanda

"Para penceramah menjelaskan bahwa bagi orang-orang Mohammedan [maksudnya Islam] hanya aturan Khalifah—Sultan Turki—yang merupakan aturan yang sah. Mereka melihat bahwa semua aturan lainnya tidak sah, termasuk aturan kita di Indonesia.

Karena itu, ajaran tentang Khilafah adalah elemen yang sangat berbahaya."

~ Koran Terbitan Belanda Algemeen Handelsblad pada 1910 ~

Pada periode 1850-1930 sebagian besar analisis surat kabar Belanda berpendapat bahwa masalah orang Belanda di Indonesia dimulai dengan hajinya Muslim Indonesia ke Makkah. Misalnya pada tahun 1859 seorang analisis di surat kabar *Algemeen Handelsblad* menulis:

Hadj.	
In de Petites Relations d' Orient lesen we dat 't aantal pelgrims die zich naar Mekka begaven, grooter was dan dat van de vorige jaren. Daarvan zijn er 90,051 over zee gekomen n.l. naar Djeddah. Daarvan waren;	
Javanen	19.312.
Ottomanen	17.413.
Indiërs	16.536.
Egyptiërs	15.619.
Uit Rusland en Boekarest	10.091.
Uit Soenda en Hadramaut	6.953.
Perzen	2.300.
Uit Algiers en Marokko	1.827.

■ "Haji" menjadi headline surat kabar *Het Nieuws van den Dag* voor *Nederlandsch-Indië*, 12 Juli 1911. Sebagian besar peziarah yang tiba di Jeddah adalah orang Indonesia ("orang Jawa").

"Pendapat umum yang ada adalah bahwa penyebab pemberontakan sebagian besar dapat ditemukan di: (...) kedua, dalam peningkatan jumlah peziarah ke Makkah, yang menyebabkan meningkatnya fanatisme, karena penduduk asli Indonesia termotivasi untuk memberontak melawan kekristenan dan dominasi Eropa."

Dan pada tahun 1866 surat kabar *De Locomotief* menulis:

"Bahaya bagi keselamatan orang Jawa biasa meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah peziarah. Namun hal ini banyak diremehkan. Bahaya ini adalah sebuah fakta, tanpa bayangan keraguan."

Analisis lain kemudian menjelaskan mengapa haji menjadi sumber semua masalah bagi Belanda di Indonesia. Surat kabar *De Locomotief* menulis pada tahun 1877:



■ Jamaah haji asal Jepara sekira tahun 1880.

"Semakin banyak jamaah haji pergi ke Mekka, semakin meningkat fanatismenya."

Dengan kata lain, tulis *SeraaMedia* (www.seraamedia.org), 23 Mei 2017, Belanda melihat hubungan antara haji dan kekuatan keyakinan Islam di antara orang Indonesia. Ini karena haji, bagi jamaah haji, juga merupakan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Pada periode 1850-1924, khilafah masih ada. Hijaz, daerah sekitar Makkah dan Madinah yang dikunjungi para peziarah, masih merupakan bagian dari kekhalifahan.

"Jadi ketika orang Indonesia pergi haji, dia pergi ke sebuah negara yang didirikan berdasarkan Islam, studi

tentang Islam memiliki kedudukan besar di masyarakat, dan orang-orang dimotivasi oleh negara untuk belajar tentang Islam. Orang Indonesia membawa apa yang mereka pelajari di sana ke Indonesia, dan berbagi dengan sesama Muslim di Indonesia," simpul *SeraaMedia*.

Lalu, apa yang dikhawatirkan oleh Belanda tentang pengetahuan keislaman di kalangan orang Indonesia?

Jawaban atas pertanyaan ini adalah apa yang oleh Belanda disebut "pan-Islamisme". Misalnya sebuah analisis di surat kabar *Nieuwe Rotterdamse Courant* pada tahun 1915 mengatakan:

"Di masa lalu, mungkin saja kita khawatir dengan keinginan berlebihan orang-orang Mohammedan [maksudnya Islam] di Indonesia untuk pergi haji, karena berbagai alasan. (...) Beberapa di antara mereka mendapat pengaruh pan-Islamisme di sana, dan kemudian ketika mereka kembali, memiliki pengaruh atas orang-orang sebangsanya."

Seorang analisis yang menulis untuk surat kabar *Het Nieuws van den Dag* pada tahun 1911 mengatakan:



■ "Pemerintah untuk Indonesia dan Islam" adalah berita utama di surat kabar *Algemeen Handelsblad*, 9 Juli 1889

"Kita tidak perlu lagi membicarakan tentang fanatisme di antara sebagian besar peziarah yang kembali. Ini sudah sangat terkenal, bahkan lebih berbahaya lagi di zaman kita saat ini. Saat ini, pan-Islamisme (...) mencoba membuat terobosan di mana-mana."

Dengan kata lain, ungkap *SeraaMedia*, ceramah tentang pan-Islamisme adalah masalah yang muncul dari pendidikan Islam di Makkah dan Madinah. Apa yang dimaksud dengan istilah pan-Islamisme? Pertanyaan ini dijelaskan oleh surat kabar *Nieuw Tilburgsche Courant* pada tahun 1900:

"Istilah pan-Islamisme dipahami oleh orang Eropa sebagai 'aspirasi di antara umat Islam untuk bersatu dalam satu negara. (...) Dimanakah ide pan-Islamisme ini berakar? Dalam hukum Mohammedan ortodoks, (yang mengatakan) bahwa semua pengikut Mohammad (Mohammedan), terlepas dari bangsanya, terlepas dari bahasa yang



■ Jamaah haji asal Malang dan Pasuruan sekira tahun 1880.

digunakan, harus menjadi satu komunitas ideal; Dan bahwa semua penguasa Mohammedan harus mengakui satu

penguasa tertinggi. (...) Apa akibatnya? Bahwa penguasa yang kafir, sebagai masalah prinsip, tidak akan pernah diterima oleh orang-orang Mohammed ortodoks sebagai



■ Jamaah haji asal Palembang sekira tahun 1880.

penguasa mereka yang sah. (...) Ini adalah suatu bahaya yang tak terbantahkan, untuk negara Kristen mana pun yang menjadikan Islam sebagai subjeknya, dalam tingkat yang lebih rendah atau lebih tinggi."

Atau seperti yang dikatakan oleh surat kabar *Algemeen Handelsblad* pada tahun 1910:

"Para penceramah menjelaskan bahwa bagi orang-orang Mohammedan hanya aturan Khalifah—Sultan Turki—yang merupakan aturan yang sah. Mereka melihat bahwa semua aturan lainnya tidak sah, termasuk aturan kita di Indonesia. Karena itu, ajaran tentang Khilafah adalah elemen yang sangat berbahaya."

"Dengan kata lain, Belanda menyadari bahwa Khilafah adalah pilar Islam. Dan Belanda menyadari bahwa pilar Islam ini memotivasi umat Islam Indonesia untuk terus menerus melawan penjajahan Belanda," tegas *SeraaMedia*.

Inilah yang dikatakan oleh surat kabar *Het Nieuws van den Dag* pada 1897:

"Pemerintah kita bisa mendapat banyak masalah dari ini. Karena, bagi kita, pan-Islamisme juga adalah musuh

Islam zijn gewicht in de schaal legt. Spreker zegt niteen, dat voor de Mohammedanen alleen het gezag van den Kalif -- den Sultan van Turkije -- het wettig gezag vertegenwoordigt, dat zij elk ander gezag, ook het onze dus, als ongrondwettig beschouwen. In die opvatting van de leer van het Kalifaat schuilt voor ons een gevaarlijk element, vooral

■ "Bagi orang-orang Mohammedan hanya aturan Khalifah—Sultan Turki—yang merupakan peraturan yang sah" di surat kabar *Algemeen Handelsblad*, 2 Februari 1910

terbesar dan terhebat bagi perdamaian di wilayah koloni kita, sama seperti untuk semua negara Eropa lainnya yang menjadikan orang-orang Mohammedan sebagai subjek atau pihak yang mereka tundukkan."

Pemerintah Belanda menyadari hal ini, seperti yang ditunjukkan oleh sebuah laporan di surat kabar *Nieuw Tilburgsche Courant* tahun 1898:

"Saat diskusi mengenai anggaran untuk pemerintahan kolonial di Indonesia pada tahun 1899, Mr. De Waal Malefijt mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya Mohammedanisme di Indonesia, yang menyebabkan pengaruh pan-Islamisme meningkat."

Dari berbagai media kuno Belanda tersebut dapat disimpulkan, kesadaran bahwa hanya aturan Islam yang diterapkan khilafahlah yang sah dan aturan kafir yang diterapkan penjajah tidak sah tersebut yang mendorong kaum Muslimin di Nusantara berjihad melawan Belanda.[]
joko prasetyo



Oleh: Dr M Kusman Sadik

Bencana, Ketika Tokoh Umat Tidak Lagi Kokoh

Bagi umat Muslim, politik itu bukan sekadar perebutan kekuasaan. Namun jauh lebih penting dari itu, yakni meraih kekuasaan untuk menegakkan ajaran Islam. Karena faktanya politik itu terkait kewenangan untuk mengatur persoalan masyarakat. Sehingga melalui kewenangan itulah semestinya ajaran Islam diterapkan dalam rangka mengatur persoalan masyarakat tersebut.

Umat tentu berharap adanya keteladanan dari para tokoh Muslim yang memiliki orientasi politik semacam itu. Bukan politik yang hanya mengarah pada kepentingan pragmatis yang berorientasi pada jabatan dan kekuasaan semata. Sementara Islam sekedar diposisikan sebagai alat propaganda untuk meraih kekuasaan tersebut.

Tahun politik seperti sekarang ini dapat menjadi arena pembuktian orientasi tersebut. Tentu menjadi kejayaan bagi umat Muslim di negeri ini apabila para tokohnya terbukti kokoh dan istiqamah. Yakni istiqamah

dalam memperjuangkan tegaknya Islam. Sebaliknya, sebuah bencana jika ternyata para tokoh Muslim tersebut telah bermetamorfosis menjadi pemburu jabatan dan kekuasaan semata.

Sebagai sebuah catatan. *Pertama*, sepanjang sejarah di negeri ini ada ribuan tokoh Muslim yang kokoh dan istiqamah memperjuangkan Islam hingga akhir hayatnya. Mereka terus dikenang umat hingga kini sebagai teladan dalam perjuangan. Namun berita sedihnya, ternyata ada pula tokoh Muslim yang akhirnya terbukti menjadikan Islam sekedar barang dagangan dalam politik.

Apa yang terjadi hari ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari sejarah tersebut. Di antara ribuan tokoh Muslim yang kokoh berjuang, ternyata hari ini mulai tercatat satu dua tokoh yang mulai terpental dari arena perjuangan. Memang sejarah itu akan terus berulang seraya membuktikan siapa pejuang dan siapa pecundang.

Kedua, Rasulullah SAW telah memberikan keteladanan

yang sangat agung dalam hal kekokohan dan keistiqamahannya memperjuangkan Islam. Hal ini misalnya tercermin dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi (No. 3406) dan Imam Bukhari (No. 4958) tentang para pemuka Quraisy yang pernah secara khusus menemui Abu Thalib.

Intinya mereka membujuk Abu Thalib untuk meminta Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Mereka pun menjanjikan harta dan tahta sebagai imbalan bagi Rasulullah SAW apabila bersedia menerima tawarannya.

Ketika Abu Thalib menyampaikannya hal tersebut, Rasulullah SAW menanggapi dengan sikap penuh ketegaran dan kewibawaan. Beliau bersabda, *"Wahai paman, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan usaha dakwah ini hingga Allah memenangkannya atau aku binasa dalam perjuangan ini."*

Sikap kokoh Rasulullah SAW tersebut telah membuat

para pemuka Quraisy putus asa. Karena bukan lagi segunung emas dan sesamudera permata, bahkan matahari dan bulan pun tidak akan mampu memalingkan perjuangan dakwah beliau.

Ketiga, para sahabat juga menunjukkan keteladanan dalam hal keistiqamahannya. Misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam *Madaarijus Salikiin* (II/79) mengutip perkataan Umar bin al-Khattab r.a., *"Istiqamah adalah bila engkau tetap lurus dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Tidak berkelit ke sana kemari layaknya seekor musang"*.

Umar r.a. telah melaksanakan apa yang beliau katakan tersebut. Sehingga tidak ada yang mampu merayu kekokohan beliau agar berpaling dari perjuangan menegakkan Islam. Bahkan setan pun tidak berani menggoda beliau. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (No. 3480) Rasulullah bersabda:

"Wahai Ibnu al-Khattab, demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah setan ber-

temu dengannmu di suatu jalan melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalan-mu".

Sejarah membuktikan bahwa kejayaan Islam berhasil diraih karena di sana ada para pejuang yang berdiri kokoh. Rasulullah dan para sahabat kokoh memperjuangkan Islam hingga akhirnya terbukti berbuah kemenangan. Khususnya setelah beliau berhasil mendirikan negara Islam di Madinah. Dari sanalah kemudian cahaya Islam itu dipancarkan menembus benua Asia, Afrika, hingga Eropa selama 13 abad.

Bagi umat Muslim, politik adalah bagian dari aktivitas dakwah. Salah satu wujudnya adalah berupa perjuangan politik (*al-kifah as-siyasi*). Misalnya mengkritik berbagai kebijakan penguasa yang bertentangan dengan syariah Islam. Karena inti dari dakwah adalah seruan untuk menerapkan syariah Islam secara *kaaffah*. Pada posisi inilah semestinya para tokoh Muslim berjuang secara kokoh bersama umat. *Wallaahua'lam bi ash-shawaab.*]

MEDIA GAUL



Sepikan Malam Tahun Baru!

Oleh: Hafidz341 (Pimpinan Redaksi Majalah Remaja Islam Drise)

Menjelang pergantian tahun, banyak pihak yang ikut ambil bagian dalam perayaan tahun baru. Mulai dari resto, café, tempat nongkrong anak muda di pinggir jalan, pub, diskotik, hotel berbintang, hingga stasiun televisi swasta. Semuanya berlomba-lomba menggelar acara malam tahun baru yang unik dan menarik. Bagi yang keuangannya cekak, udah punya rencana konvoi kendaraan bermotor pada malam pergantian tahun sambil niup terompet dan mukulin galon air mineral. Atau patungan bareng teman sekolah untuk ngadain acara makan-makan sambil ngebongkar belanjaan gosipnya. Ada juga yang punya agenda kemping di alam terbuka sambil menikmati malam pergantian tahun.

Kalo udah bicara perayaan, pastinya nggak akan jauh dari suasana pesta-pora. Itulah tradisi yang tetep lestari dari tahun ke tahun. Terutama di dunia remaja yang gampang kepincut kegiatan apa aja yang menjanjikan kesenangan dan hura-hura. Mereka terjerumus dalam gaya hidup pestaphoria. Gaya hidup yang memuja kesenangan, kemegahan, dan hura-hura secara berlebihan

Bahaya

Dari awal, pestaphoria lahir dari pola hidup masyarakat barat yang steril dari aturan agama. Apalagi aturan Islam. Nggak heran kalo dalam pestaphoria seperti perayaan tahun baru, kemaksiatan merajalela. Mulai berlomba-lomba memamerkan aurat dan daya tarik seksual,

campur baur laki perempuan yang bebas tanpa batas, peredaran narkoba dan minuman keras, hingga ajang bakusyahwat.

Perayaan hari-hari besar yang selalu dimeriahkan dengan pesta tak lepas dari muatan ajaran di luar Islam. Seperti perayaan tahun baru Masehi. Buktinya dalam sejarah, tanggal 1 Januari dirayakan sebagai hari tahun baru untuk pertama kalinya pada tahun 45 Sebelum Masehi (SM) oleh Kaisar Roma, Julius Caesar (www.irib.ir). Dan bagi orang Kristen, tahun baru masehi dikaitkan dengan kelahiran Yesus Kristus atau Isa al-Masih. Sehingga agama Kristen sering disebut agama Masehi. Masa sebelum Yesus lahir pun disebut tahun Sebelum Masehi (SM) dan sesudah Yesus lahir disebut tahun Masehi. Gitchu ceritanya!

Sebagai Muslim, nggak ada pantasnya kita menirunir budaya di luar Islam. Kaya perayaan tahun baru itu. Kalo kita ikut-ikutan, sama aja kita membenarkan apa yang diyakini oleh penganut agama lain. Padahal Rasul dengan tegas melarang umatnya untuk meniru-niru budaya atau tradisi agama dan kepercayaan lain. Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang menyerupai (bertasyabuh) suatu kaum, maka ia termasuk salah seorang dari mereka." (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan ath-Thabrani)

Sepikan

Sudah jelas kalo perayaan tahun baru itu bagian dari budaya kafir. Jadi, nggak ada alasan bagi kita untuk ambil

bagian. Meski demi menjaga hubungan baik ama teman, bukan berarti ngerayain tahun baru jadi boleh lho. Sekadar ngucapin selamat juga mesti hati-hati.

Seorang ulama sekelas Ibnu Qayyim mengingatkan, *"Memberi selamat atas acara ritual orang kafir yang khusus bagi mereka, telah disepakati bahwa perbuatan tersebut haram. Bagi yang mengucapkannya, berarti ia telah memberi selamat atas perbuatan mereka yang menyekutukan Allah. Bahkan perbuatan tersebut lebih besar dosanya di sisi Allah dan lebih dimurkai dari pada memberi selamat atas perbuatan minum khamar atau membunuh. Banyak orang yang kurang mengerti agama terjerumus dalam suatu perbuatan tanpa menyadari buruknya perbuatan tersebut. Seperti orang yang memberi selamat kepada orang lain atas perbuatan maksiat, bid'ah atau kekufuran maka ia telah menyiapkan diri untuk mendapatkan kemarahan dan kemurkaan Allah."*

Sahabat, sekarang kita punya alasan kuat untuk nggak ikut-ikutan pesta perayaan tahun baru yang merupakan budaya non Islam dan menghapus gaya hidup pestaphoria yang cuman ngejar kesenangan dunia (*fun*) dalam kamus hidup kita. Pastinya lebih keren kalo kita isi masa muda dengan kegiatan bermanfaat yang nggak ngelanggar syariat dan bisa mencerahkan masa depan kita di dunia dan akherat. Di antaranya, dengan ikut dan aktif dalam pengajian sebagai tanda taat. Yuk! [/].



Ibu dan, Generasi K-Pop

Seorang ibu yang menyuarakan kebenaran, dibully dengan keji oleh anak-anak peradaban sekuler. Generasi macam apa ini?

Sebuah iklan tentang aplikasi *marketplace* meresahkan ibu-ibu. Apa pasal? Iklan itu tayang di acara kartun anak-anak. Dibawakan oleh cewek-cewek centil dengan pakaian minim. Dialah Blackpink. Nama grup musik cewek yang sedang hits di jagad hiburan.

Keresahan ini lantas disuarakan oleh seorang ibu yang juga pendidik, Maimon Herawati. Dosen ini membuat petisi agar tayangan iklan tersebut dihentikan. Target petisi ditandatangani 150 ribu. Dukungan mengalir deras. Bukti bahwa tindakannya mewakili kaum ibu. Hasilnya, Komisi Penyiaran Indonesia mencekal tayangan iklan tersebut.

Yang menjadi keprihatinan adalah reaksi para penggiat K-Pop. Ketika idola mereka diprotes, remaja-remaja ini *ngamuk* di luar batas kewajaran. Caci maki dan kata-kata keji terlontar begitu beringas. Sampai-sampai mereka membuat petisi-petisi tandingan. Salah satunya, "Usir Maimon Herawati dari Indonesia." Nastaghfirullah. Mengerikan.

Bukannya introspeksi tentang apa dan siapa tontonan mereka, malah menyerang dan mem-bully orang yang mendakwahkan kebenaran. Seorang ibu yang berusaha mengingatkan dan meluruskan bahwa idola mereka bukan sosok yang pantas untuk dipuja.

Cengkeraman K-Pop

Sejatinya bukan hanya Blackpink grup musik yang dandanan dan gayanya mengundang keresahan. Sebab, hampir semua K-Pop mengusung karakter yang serupa. Pakaian minim. Dandanan menor. Joget tak karuan. Memang, penyanyi lokal di Indonesia pun tak sedikit yang serupa itu. Namun, tak asalah juga jika kali ini cengkeraman K-Pop yang membawa budaya liberal yang diprotes. Sebab, dengan diprotes saja masih bercokol merajalela. Apalagi jika semua diam.

Masih ingat dengan cuitan psikolog Elly Risman yang juga protes dengan pembawaan grup musik SNSD yang juga asal Korea? Ia lebih dulu mengalami nasib serupa. Di-bully habis-habisan oleh para penggiat Korea. Dan, hal ini terulang kembali. Begitu besarnya cengkeraman K-Pop hingga pembelanya demikian militan.

Tentu menjadi cermin, bagaimana kualitas generasi muda jika tontonan yang menuntun mereka seperti itu. Ke mana pelajaran adab dan etika yang mereka

pelajari hingga begitu mudah melontarkan kata-kata keji, bahkan kepada sosok ibu yang tulus berniat mengayomi anak-anak negeri?

Inilah potret anak didik sistem sekuler yang memuja kebebasan dengan kebablasan. Bagi mereka, kesenangan jasadiyah adalah kebahagiaan. Menyimak, mengikuti dan menggemari apa yang sedang hits adalah sebuah keharusan. Mereka rela berkorban apa saja demi menikmati itu semua. Tanpa peduli bahwa alam bawah sadarnya secara tidak langsung telah dididik agar menerima budaya liberal.

Tertanam di benak mereka, tak mengapa pamer aurat. Tak mengapa goyang erotis. Tak mengapa melantunkan lagu-lagu cinta, bahkan lirik yang mengajak mesum, zina atau maksiat. Mereka tidak sadar otak pun ikut dirusak.

Inilah potret anak didik sistem sekuler yang memuja kebebasan dengan kebablasan. Bagi mereka, kesenangan jasadiyah adalah kebahagiaan. Menyimak, mengikuti dan menggemari apa yang sedang hits adalah sebuah keharusan. Mereka rela berkorban apa saja demi menikmati itu semua.

Buktinya, ketika ada yang menyuarakan kebenaran, malah mereka hinakan. Mengapa mereka bisa gelap mata seperti itu? Karena cara pandang mereka telah mengenakan kaca mata liberal.

Mereka tidak sadar bahwa budaya Korea mengusung ideologi yang bertentangan dengan Islam. Budaya Korea dipengaruhi oleh Amerika Serikat yang sejak perang Korea telah bercokol membawa pengaruh di sana. Budaya inilah yang membawa ide-ide liberal. Budaya Korea asli, tentu tidak seperti itu.

Budaya liberal global ini mengajarkan *mindset* yang salah pada generasi. Mereka dicekoki paham liberal sehingga jauh dari nilai-nilai agama. Seperti kita saksikan. Anak-anak masa kini sangat bebas dalam pergaulan. Kurang adab. Kurang hormat terhadap orang tua, bahkan pada sosok ibu. Bukan hanya

ibunya sendiri, siapapun yang berlabel ibu, seharusnya adalah sosok yang dihormati dan dihargai.

Ini tidak. Begitu beringasnya mereka meneror seorang ibu yang notabene dosen, pendidik yang berjuang melindungi anak bangsa. Mengingat potensi kerusakan moral akibat tayangan tidak mendidik bagi perkembangan anak-anak. Siapa yang layak dibela?

Calon Ibu Generasi

Para remaja, khususnya remaja putri pemuja K-Pop atau budaya liberal. Mereka adalah calon ibu di masa mendatang. Bukan hanya ibu bagi anak kandungnya, juga ibu bagi generasi. Sungguh mencemaskan jika saat ini mereka terjajah oleh pemikiran liberal. Kelak, profil ibu seperti apa yang akan mereka sandang?

Jelas tidak akan jauh-jauh dari liberal.

Ketika ada ibu yang mengingatkan tentang bahaya tayangan tidak mendidik untuk anak-anak, seharusnya ini menjadi bahan introspeksi. Karena, kelak mereka akan mencemaskan diri mereka sebagai seorang ibu. Mencemaskan anak-anak mereka. Akan merasakan bagaimana beratnya mendidik generasi. Beratnya membina anak-anak agar taat agama.

Janganlah sekarang bebas bersenang-senang dengan tayangan sesuka hati. Sejatinya, kelak akan muncul penyesalan yang mendalam. Bahwa saat menjadi ibu, ternyata belum menyiapkan bekal apa-apa untuk mendidik anak-anak agar menjadi generasi terbaik. Menyesal, mengapa dulu tidak serius mempersiapkan diri dengan ilmu yang lebih bermanfaat.

Sebab, menjadi ibu itu berat.

Mendidik anak-anak untuk akhirat.

Terlebih, ibu-ibu dituntut peduli. Sebagai ibu generasi. Ya, seorang ibu bukan hanya memikirkan anaknya sendiri. Tetapi ia juga memikirkan generasi secara meluas. Ibu dalam Islam bukanlah sosok egois. "Ah, biarkan saja remaja di luar sana rusak, yang penting bukan anakku." Tentu bukan seperti itu pemikiran seorang ibu.

Ibu generasi memikul tanggung jawab untuk memperbaiki peradaban agar lebih baik. Terlebih saat kondisi peradaban liberal masih berkuasa saat ini. Ibu-ibu harus turut serta memperjuangkan tegaknya peradaban Islam.

Tegakkan Islam

Perjuangan ibu-ibu yang peduli generasi perlu didukung. Sebab, *mindset* seorang ibu memang harus berpikir jauh ke depan. Bukan hanya memikirkan anak-anak kita sendiri. Juga memikirkan generasi secara menyeluruh. Ketika ada cengkeraman budaya asing yang tidak sejalan dengan ajaran agama, kita tidak boleh berpikir yang penting tidak menimpa anak saya. Keluarga saya. Tidak. Tetapi saatnya bertanya, apa yang bisa saya lakukan agar budaya itu tidak menimbulkan mafsadat bagi umat?

Maka, seorang ibu punya tanggung jawab ikut menegakkan peradaban mulia. Peradaban Islam. Tak cukup mendidik diri dan keluarganya. Ia juga peduli pada komunitasnya, sesama ibu-ibu dan lingkungan agar sama-sama peduli. Bersama-sama mengkaji Islam. Mendalami agama agar tidak terjerumus pada budaya liberal.

Ibu harus punya pemikiran bahwa peradaban yang baik harus diperjuangkan. Termasuk oleh kaum ibu. Jadi, ibu-ibu jangan merasa "ah, saya mah apa atuh, nggak usah repot-repot ngurusi orang, urusi saja diri sendiri dan keluarga." Tidak. Ibu-ibu harus berani menunjukkan suaranya. Berkontribusi sebisa yang kita mampu. Inilah tugas yang dititahkan Allah bagi ibu-ibu: berdakwah. Menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran.

Itulah kontribusi untuk ikut menjadi peletak dasar pembangunan peradaban Islam yang kita impikan. Peradaban yang menghapus budaya liberal. Memuliakan perempuan pada fitrahnya yang punya rasa malu. Cukup sudah generasi K-Pop eksis di peradaban sekularis. Jangan lagi beri nafas dalam peradaban Islam.[]

kholda

Kompetensi Ibu Milenial

Bulan ini kaum ibu memperingati harinya. Momentum meluruskan kembali peran ideal seorang ibu. Bukan hanya melahirkan anak kandungnya sendiri, juga melahirkan anak kandung peradaban. Berkaca dari peradaban Islam, generasi hebat lahir dari ibu-ibu hebat. Banyak lahir tokoh-tokoh penting pembangun peradaban Islam yang cemerlang. Masih muda tapi hafiz Alquran. Baru belasan tahun jadi penakluk negara adidaya. Masih belia tapi jadi ulama dan seterusnya.

Di zaman milenial ini, bisakah kehebatan itu terulang? Seharusnya bisa. Sebab, ibu zaman *now* sejatinya dikaruniai akal dan waktu yang sama dengan ibu zaman *old*. Bedanya, dulu tantangan zaman mungkin tidak sebanyak sekarang. Terutama dari sisi cengkeraman sistem kapitalis dan maraknya media-media yang menggoda kaum ibu dan anak-anak dari peran ideal. Lantas apa saja kompetensi yang seharusnya dimiliki kaum ibu agar mampu menjalankan perannya secara maksimal?

1. Ilmu Agama

Jelas ini ilmu terpenting yang harus dikuasai seorang ibu. Pondasi tauhid atau akidah anak-anak, ibulah yang pertama kali menanamkannya. Karena itu ibu harus ngaji. Berguru. Mencari ilmu Islam melalui halqah agar terpupuk pola pikir dan pola sikapnya secara kontinyu. Tidak cukup ibu-ibu belajar ilmu agama sendiri. Misal hanya membaca atau mencari di internet. Carilah komunitas atau kelompok pengajian yang mengajarkan Islam kaffah. Niscaya jadi bekal penting untuk mendidik anak-anak agar mereka juga kaffah.

2. Ilmu Orang Tua

Memang, menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Belajarnya sejak mulai sebelum menikah hingga akhir hayat. Karena itu, menjadi ibu tak lepas dari proses belajar-mengajar. Tidak berhenti ketika lulus sekolah atau kuliah. Sebab, justru saat menikah dan melahirkan anaklah, pelajaran menjadi ibu itu baru saja ditunaikan.

Maka, menjadi ibu tak boleh mudah putus asa menghadapi segala problem yang dihadapi keluarga. Selalu aktif dan kreatif mencari solusi. Sebab permasalahan yang muncul, boleh jadi karena belum menguasai ilmunya. Nah, sekarang marak buku atau training-training parenting yang menawarkan seribu satu jurus mengasuh dan mendidik anak. Ibu-ibu bisa membekali diri dengan itu.

3. Skill atau Ilmu Alat

Ibu harus menguasai banyak *skill* atau keterampilan yang mendukung tugasnya. Antara lain *skill* komunikasi, agar mampu berkomunikasi efektif dalam rumah tangga. Berbicara dengan suami. Mengobrol dengan anak-anak. Ibu harus menguasai *skill* bahasa, baik bahasa daerah, nasional dan jika perlu bahasa internasional. Sebab, anak-anak sekarang lebih jago menguasai berbagai bahasa. Bahkan jika perlu, menguasai bahasa alay. Benar. Terkadang, anak bicara, *chatting* atau ngomong menggunakan bahasa yang sengaja ia sembunyikan dari orangtuanya agar tidak diketahui.

Selain itu juga *skill* dalam mengelola waktu, mengatur pengeluaran, mengelola kesehatan jiwa dan sebagainya.

4. Melek Politik

Ibu tak boleh melepaskan diri dari hiruk pikuk

perpolitikan. Jangan terbuai dengan media-media massa yang hanya mengupas dunia kewanita-an. Isu kecantikan, fashion, *make up*, diet dan segala tetek bengek penampilan. Carilah media atau bacaan yang membuat melek politik. Yang mengandung edukasi mencerdaskan kaum ibu dari sisi pemahaman, politik, sains dan teknologi.

Jangan menghabiskan waktu untuk mengulas yang mubah-mubah saja. Sedangkan ranah wajib abai dari bahasan. Ibu-ibu harus bicara politik. Bicara soal masa depan umat.

5. Berbagi Potensi Diri

Ibu-ibu milenial zaman *now* bisa menghebat karena kemajuan teknologi. Ditambah fasilitas yang sangat memanjakan. Misal, untuk urusan domestik, ibu-ibu sangat terbantu dengan alat-alat elektronik canggih. Mesin cuci, kulkas, kompor gas, komputer, internet dan sebagainya. Seharusnya urusan domestik tidak serepot ibu-ibu zaman dulu. Di sini ibu-ibu justru mampu menggali potensi terpendamnya. Potensi yang bisa menginspirasi banyak orang. Yang bisa dibagikan untuk kemaslahatan umat.

Misal, ada ibu-ibu yang menggeluti isu makanan halal. Ibu yang fokus dengan dunia *crafting*. Ibu yang peduli mempelajari ilmu tahsin. Ilmu kesehatan. Keterampilan menjahit. Memasak. *Public speaking*. Menulis. Mendesain. Dan masih banyak lagi. Banyak ibu-ibu hebat yang mampu membagikan kehebatannya untuk menghebatkan kaumnya. Juga menghebatkan generasi penerus yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk turut membangkitkan peradaban mulia.[] **kholda**



Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan (Entrepreneur) pada Anak

KONSULTASI

Diasuh oleh:
Dra (Psi) Zulia Ilmawati

Assalaamu'alaikum Wr Wb.

Ibu Pengasuh Rubrik Konsultasi Keluarga yang saya hormati, semoga ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Saya Ibu dari tiga orang anak, terlahir dari keluarga yang cukup sukses berwirausaha. Saya ingin anak-anak saya juga memiliki kemampuan berwirausaha seperti kakek neneknya. Apakah kemampuan itu bisa ditumbuhkan sejak masih anak-anak? Langkah seperti apa yang mesti kami lakukan. Terima kasih untuk saran-sarannya.

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

UM-08121xxxxx

Wa'alaikumsalam Wr Wb.

Ibu UM yang baik,

Memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneur*) berarti mendorong adanya mental yang mandiri, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, disiplin, dan tak mudah menyerah, seperti layaknya seorang wirausaha ketika memulai usahanya dari bawah. Memiliki jiwa *entrepreneur* akan membuat anak tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, mampu berpikir kreatif dan inovatif, serta lebih menghargai uang dan barang. Untuk menjadi *entrepreneur* yang tangguh membutuhkan proses, tidak bisa instan dalam sekejap. Motivasi yang kuat adalah modal utama, di samping keberanian dan ketekunan. Di sinilah menjadi penting bagaimana menumbuhkannya, sejak masih anak-anak.

Ibu UM yang baik,

Kenalkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneur*) dalam lingkungan keluarga, orang tua bisa menjadi teladan buat anak. Jika di rumah memiliki usaha, libatkan anak. Sepakati jenis pekerjaan apa yang mesti dilakukan anak. Tentu sebatas yang bisa dijangkau oleh mereka. Kalau perlu, beri anak "upah", dari apa yang telah dia kerjakan. Upah itu tidak boleh digunakan untuk jajan, tapi ditabung. Cara ini tentu bukan untuk mempekerjakan mereka, tapi melatih mereka agar memiliki pengalaman bagaimana menjadi pekerja, sekaligus menanamkan pelajaran bagaimana menghargai hasil keringat sendiri. Sesekali ajak anak-anak berbelanja kebutuhan dari usaha yang dilakukan. Kasih mereka tugas untuk mencari informasi berbagai harga barang-barang di pasar yang dibutuhkan. Selanjutnya, hasil survei pasar bisa dianalisa dan dijadikan bahan diskusi dalam keluarga. Kegiatan ini dimaksudkan agar anak menjadi akrab dengan kehidupan nyata, mampu berkomunikasi dengan baik, mengemukakan pendapat, menarik kesimpulan, sekaligus membiasakan diri selalu mengikuti perkembangan ekonomi sehari-hari.

Ibu UM yang baik,

Menceritakan kisah hidup akan merangsang anak untuk meniru atau meneladaninya. Abdurrahman bin Auf adalah sosok *entrepreneur* yang sukses. Tidak hanya

pejuang Islam yang hebat, tapi juga pengusaha yang sukses. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi Al-Anshari. Sa'ad termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah, ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati, namun Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "*Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini!*". Sejak itulah kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Seandainya ia mendapatkan seongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya sampai ia dijuluki '*Sahabat Bertangan Emas*'.

Ibu UM yang baik,

Coba perhatikan kegemaran anak. Jika dia senang membaca misalnya, tanyakan berapa banyak koleksi bukunya. Kalau cukup banyak, berilah saran agar ia menyewakan koleksinya kepada teman-temannya. Jika anak memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu, puji hasil karyanya agar ia merasa percaya diri untuk menjual kepada teman-temannya. Langkah berikut, ajarkan kepada anak untuk menentukan harga. Ajarkan untuk membuat laporan keuangan yang sangat sederhana, agar anak bisa bertanggung jawab terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran. Mengajak anak melihat tempat usaha juga merupakan cara yang bisa dilakukan. Tak perlu menjadi pengusaha terlebih dahulu untuk mengenalkan anak pada

dunia usaha. Ajak anak melihat berjalannya suatu usaha ke teman yang punya usaha kecil misalnya. Kalau perlu mintalah izin kepadanya untuk menerimanya magang saat liburan.

Ibu UM yang baik,

Cara lain yang tak kalah menarik adalah bermain. Carilah permainan yang anak tak sekadar bermain, namun juga menyusun strategi bisnis dan berinvestasi. Dari permainan diharapkan anak akan bisa mengelola keuangan, membelanjakan uang, bahkan kerugian atau risiko dalam bisnis. Dengan menumbuhkan jiwa *entrepreneur* pada anak, diharapkan sebesar apa pun krisis finansial yang dihadapi nantinya, akan dapat disikapi dengan tenang. Karena anak telah terbiasa memecahkan problem berat dengan strategi yang cepat dan tepat. Bagaimanapun dakwah tidak hanya membutuhkan semangat, ilmu tapi juga dana. Ketika kebebasan finansial sudah dimiliki, insyaallah akan membantu kelancaran jalannya dakwah, dan kemampuan finansialnya akan melengkapi perjuangannya. Seperti halnya yang terjadi pada Abdurrahman Bin Auf.

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah rang-orang yang benar*" (QS. Al-Hujuraat:15).[]

Hukum Menggunakan Diskon Dalam Rangka Natal

Diasuh Oleh: **Ust M Shiddiq Al Jawi**



Tanya:

Ustadz, bagaimana hukumnya membeli baju koko dan busana Muslim dengan menggunakan diskon Natal? Kata seorang ustadz di majelis taklim saya, itu hukumnya haram. Mohon pencerahannya, karena saya telanjur beli. Bila memang haram segera akan kami kembalikan. (Mahfudz, Kudus).

Jawab:

Hukumnya boleh dan tidak mengapa seorang Muslim menggunakan diskon dalam berjual beli pada saat hari Natal atau hari-hari raya non Muslim lainnya, selama memenuhi dua syarat sebagai berikut:

Pertama, barang yang dibeli oleh Muslim tersebut bukan termasuk barang-barang khusus yang digunakan untuk *tasyabbuh bil kuffaar* (menyerupai kaum kafir).

Kedua, penjual atau toko yang memberi diskon ter-

sebut tidak menggunakan keuntungan yang diperolehnya untuk turut merayakan hari raya non Muslim yang ada.

Mengenai syarat pertama, sudah diketahui bahwa *tasyabbuh bil kuffaar* (menyerupai kaum kafir) hukumnya haram sesuai sabda Nabi SAW, "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam golongan mereka." (Arab: *man tasyabbha bi qaumin fahuwa minhum*). (HR Abu Dawud). Maka berjual beli barang-barang khusus untuk *tasyabbuh bil kuffaar* hukumnya haram. Misalnya kalung salib, pohon Natal, topi Sinterklas, lampu-lampu penghias pohon Natal, dan yang semisalnya.

Jika jual beli barang untuk *tasyabbuh bil kuffaar* haram, haram pula hukumnya seorang Muslim memanfaatkan diskon ketika membeli barang-barang tersebut. Hal itu dikarenakan diskon adalah persoalan cabang yang muncul dari persoalan pokok (jual beli). Maka diskon sebagai persoalan cabang hukumnya haram jika persoalan pokoknya, yaitu jual belinya itu sendiri hukumnya haram. Kaidah fiqih dalam masalah ini menyebutkan: *idza saqatha al ashlu saqatha al far'u* (jika persoalan pokok telah gugur, maka gugur pula persoalan cabangnya). (M. Shidqi Al Burnu, *Mausuu'ah Al Qawaa'id Al Fiqhiyah*, Juz I, hlm. 271).

Kaidah fiqih lainnya yang dapat diterapkan berbunyi: *At taabi' taabi'* (perkara cabang hukumnya mengikuti perkara pokoknya). (M. Shidqi Al Burnu, *Mausuu'ah Al Qawaa'id Al Fiqhiyah*, Juz II, hlm. 158). Berdasarkan kaidah ini, jika jual belinya sebagai perkara pokoknya haram, maka diskon sebagai perkara cabangnya menjadi haram pula hukumnya.

Mengenai syarat kedua, yaitu penjual/toko tidak menggunakan keuntungan yang diperolehnya untuk turut merayakan hari raya non Muslim yang ada, hal ini didasarkan pada kaidah fiqih yang berbunyi: *kullu bai'in a'aana 'ala ma'shiyatin haraam* (setiap-tiap jual beli yang mendukung terjadinya suatu kemaksiatan, hukumnya haram). (Imam Syaukani, *Nailul Authar*, hlm. 1035).

Juga didasarkan pada kaidah fiqih yang berlaku lebih umum, yang berbunyi: *al wasiilah ilal haraami muharramah* (segala sesuatu perantara menuju yang haram, hukumnya haram pula). (Taqiuddin An Nabhani, *Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah*, Juz III, hlm. 480; M. Shidqi Al Burnu, *Mausuu'ah Al Qawaa'id Al Fiqhiyah*, Juz XII, hlm. 199).

Maka dari itu, jika penjualnya diketahui dengan dugaan kuat (*ghalabutzh zhann*) akan menggunakan keuntungan jual beli tersebut untuk turut merayakan hari raya non Muslim, ataupun akan menggunakan keuntungannya untuk mendukung suatu dosa atau maksiat secara umum, misalnya mendukung LGBT, atau mendukung Kristenisasi, atau mendukung Zionisme dan Israel, haram hukumnya seorang Muslim menggunakan diskon dalam berjual beli pada saat hari Natal atau hari-hari raya non Muslim yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, boleh hukumnya membeli baju koko dan busana Muslim dengan menggunakan diskon Natal asalkan kita merasa aman bahwa penjualnya tidak menggunakan keuntungan bisnisnya untuk merayakan Natal atau untuk mendukung suatu dosa/kemaksiatan. *Wallahu a'lam.*[]

Di tengah-tengah kehidupan sekuler saat ini, media informasi begitu dikuasai oleh kalangan kapitalis dan liberal yang opininya selalu menyudutkan perjuangan Islam.

Sudah sangat jarang kita temukan media informasi yang teguh dan konsisten memperjuangkan keadilan, peduli dengan problematika dan membela kepentingan umat.

Kini **Media Umat** terus hadir untuk teguh dan konsisten memperjuangkan kehidupan Islam dan melawan opini negatif terhadap perjuangan Islam.

Untuk meningkatkan kekuatan **Media Umat** sudah pasti membutuhkan dukungan umat.

Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk berlangganan, mengajak atau berdonasi untuk orang lain agar memiliki dan membaca **Media Umat**, jangan sampai media ini hanya berhenti ditangan Anda.

Bagi Anda yang ingin berlangganan untuk diri dan orang lain silakan isi formulir di samping.

Kirim ke Agen daerah kami atau SMS berlangganan ke:

0857 1104 4000

FORMULIR BERLANGGANAN

Bismillah...

Saya ingin berlangganan

MediaUmat tabloid
mediaumat.news Memperjuangkan Kehidupan Islam

**TERBIT
1 BULAN
2 KALI**

Nama Pelanggan :
Alamat Pengiriman 1 :
Alamat Pengiriman 2 :
Telpon/ No. Hp-WA :
Jumlah Langganan : eksemplar
Dikirim Mulai edisi :
Sistem Pembayaran :



Harga : Jawa Rp 8.000/eks
Luar Jawa Rp 11.000/eks

Oleh: **Aji Salam**, Forum Ekonomi Indonesia

Warning: Lapangan Kerja Sempit, Ekonomi Makin Sulit

Terasa dan makin terasa susah. Lapangan kerja terus menunjukkan tren penurunan selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sejumlah pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi belum mampu mendongkrak penyerapan tenaga kerja baru. Hal ini selaras dengan hasil riset Tim Institute for Development of Economics and Finance (Indef), rata-rata tambahan penduduk bekerja selama 2015-2017 mencapai 2.127.221 jiwa per tahun. Angka itu lebih rendah dibandingkan tiga tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono yang mencapai 2.868.457 jiwa. Data tersebut mencerminkan penurunan signifikan keterseediaan lapangan kerja.

Pemerintah kini giat membangun infrastruktur yang memasuki fase konstruksi. Setiap 1 persen pertumbuhan sektor konstruksi hanya mampu menyerap 134.592 pekerja. Hal itu disebabkan perubahan industri dari padat karya ke padat modal. Namun, bukan berarti pemerintah diam. Perubahan ke pola padat modal perlu disikapi melalui pengembangan produksi kebutuhan infrastruktur dari domestik. Saat ini, mayoritas kebutuhan infrastruktur dari impor.

Selama pemerintah hanya mengandalkan pemenuhan kebutuhan dari impor, semakin minim masyarakat yang bisa berperan di dalamnya. Sementara beberapa aturan yang dirasa masih menghambat penyerapan tenaga kerja juga mutlak dirombak. Pemerintah gagal menekan kemiskinan dan ketimpangan kalau tidak ada lapangan peker-

jaan. Program bantuan langsung hanya bisa mengatasi gejala krisis. Kuncinya rakyat diberikan pekerjaan. Di saat yang sama problem PHK massal menjadi momok menakutkan di suasana ekonomi yang labil.

Dalam sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara (khilafah), PHK sangat kecil kemungkinannya terjadi. Sebab, prinsip ekonomi Islam yang dianut adalah pe-nyerapan pasar domestik yang sangat didukung oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan individu masyarakatnya. Ekspor bukan lagi tujuan utama hasil produksi. Sebab, sistem mata uangnya juga sudah sangat stabil, yaitu dengan menggunakan standar emas (dinar dan dirham). Dengan demikian, negara tidak membutuhkan cadangan devisa mata uang negara lain karena semua transaksi akan menggunakan dinar/dirham atau dikaitkan dengan emas.

Negara juga akan menerapkan sistem transaksi hanya di sektor riil dan menghentikan segala bentuk transaksi ribawi dan non riil lainnya. Dengan begitu, perputaran barang dari sektor riil akan sangat cepat dan tidak akan mengalami penumpukan stok. Penawaran dan permintaan bukanlah indikator untuk menaikkan/menurunkan harga ataupun inflasi, karena jumlah uang yang beredar stabil sehingga harga akan stabil. Negara pun tidak perlu repot-repot mengatur jumlah uang beredar dengan menaikkan/menurunkan suku bunga acuan seperti yang dilakukan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Negara hanya akan memantau dan memastikan kelancaran proses distribusi barang dan jasa agar segala kebutuhan masya-

rakat dapat terpenuhi.

Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam, negaralah yang mengelola sumber kekayaan yang menjadi milik rakyat. Hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Dengan demikian, jaminan sosial bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, akan terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini, daya beli masyarakat akan sangat kuat dan stabil. Harga tinggi bukan merupakan persoalan dalam sistem ekonomi Islam. Dengan terpenuhinya kebutuhan individu, pola hidup masyarakat pun menjadi lebih terarah. Mereka tidak lagi terperangkap dalam pola hidup individualis, dengan bersaing dan harus menang, dengan menghalalkan segala cara.

Pemerintah saat ini sepertinya telah kehabisan akal sehingga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menanggulangi masalah PHK massal tersebut, kecuali hanya *wait and see* saja. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi krisis global ini.

Sudah waktunya bagi pemerintah dan masyarakat untuk memilih jalan keluar terbaik dari permasalahan ini. Caranya adalah dengan mengambil jalan yang ditawarkan Islam, yakni dengan menerapkan sistem ekonomi Islam sekaligus menerapkan sistem pemerintahan Islam. Tanpa itu, kita akan terus menderita akibat berbagai persoalan hidup yang tidak pernah berakhir.[]

Tak Pandang Bulu, Orang Gila Ikut Pemilu

Oleh: **Retnaning Putri, S.S.** Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

Cuitan isu tentang orang gila, kembali hadir di tengah hiruk pikuknya perpolitikan Indonesia menjelang pesta demokrasi 2019. Setelah dihebohkan dengan orang gila membunuh tokoh ulama, kini orang gila diberi hak pilih dalam Pilpres tahun depan. Pro kontra pun menjadi riuh ramai di dunia maya maupun di dunia nyata.

Di luar pro kontra masyarakat, justru pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa tunagrahita atau disabilitas mental boleh menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan presiden 2019 mendatang. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra meluruskan bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015. Dalam keputusan tersebut warga yang mengidap gangguan jiwa boleh menggunakan hak pilihnya dengan syarat khusus. Oleh karena itu, menurutnya masyarakat tidak boleh menertawakan hasil putusan tersebut. Putusan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan dan membolehkan penderita disabilitas mental untuk menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan surat keterangan dari dokter bersangkutan.

Pernyataan di atas menggambarkan sikap MK yang justru memfasilitasi penderita disabilitas mental untuk memilih. Di samping itu, masyarakat pun dipaksa untuk menerima keputusan tersebut, bahkan dipaksa diam terhadap karut marutnya dunia perpolitikan menjelang Pilpres 2019. Lagi-lagi masyarakat waras pun dibungkam

suaranya. Fenomena ini justru menunjukkan kegagalan bangsa dalam membina tatanan politik yang beradab. Demokrasi telah menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.

Negara mulai tak pandang bulu melihat rakyatnya, baik yang waras maupun yang memiliki gangguan kejiwaan, semua sama di mata hukum demokrasi. Bahkan kelihatannya negara tutup telinga dengan keputusan MK, para pemegang rezim pun menambah cuitan dukungannya terhadap keputusan MK.

Ketika orang gila memiliki hak pilih dan pemegang kekuasaan pun melegalkannya, maka hal ini telah menunjukkan rusaknya sistem kehidupan di bawah landasan sekulerisme. Ini merupakan bagian dari musibah yang menimpa negeri ini, meski secara kasat mata tak terlihat oleh masyarakat umum. Ada dua hal yang bisa kita lihat dengan logika dan nurani, yaitu menjadikan orang gila sebagai alat demokrasi untuk meraih kekuasaan dan diamnya pemerintah yang menunjukkan pro terhadap segala keputusan dalam rezim ini. Jadi, sesungguhnya yang membuat suatu negeri hancur bukanlah orang gila tetapi justru kebijakan yang menggilanya.

Bagi umat Islam, pertimbangan agama merupakan alasan logis dan cerdas dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pandangan Islam sudah jelas, orang gila tidak dibebani tanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Agama saja tidak membebani orang gila dengan

tanggung jawab, seharusnya manusia pun tidak membebani. Rasulullah SAW bersabda:

"Diangkat pena dari tiga orang: Orang tidur hingga dia bangun, orang gila hingga dia sadar, anak-anak hingga sudah baligh." (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Beginilah kondisi perpolitikan negeri, politik berjalan liar dan pragmatis. Politik hanya sebatas meraih kekuasaan di kursi jabatan pemerintahan dan mendapatkan dukungan suara dari banyak kalangan (baca: elite politik). Sehingga makna politik lebih identik sekadar upaya meraih kepentingan pragmatis bagi individu maupun kelompok. Untuk itu, umat Islam harus bijak dalam menilai isu yang mencuat secara tiba-tiba ini, dan tidak terarus dengan upaya rezim untuk melanggengkan demokrasi. Dengan demikian, menjadi penting bagi muslim untuk terus menyerukan Islam, tidak hanya sekadar agama melainkan juga sebagai ideologi. Hanya Islamlah satu-satunya *problem solving* dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup, sehingga manusia akan mampu menilai mana yang *haq* dan mana yang *batil*.[]



Kirimkan opini Anda terkait isu aktual dengan perspektif Islam ke email: pembaca.tabloidmu@gmail.com
Panjang tulisan sekitar 3500 karakter.
Sertakan pula foto diri dan biodata singkat.

Aksi 812 Malaysia Tolak ICERD

Jika saudara-saudara kita di Indonesia berhimpun semata-mata karena ingin membela Islam dan membela kalimah tauhid, maka kita juga seharusnya berhimpun atas dasar yang sama.



Ratusan ribu rakyat Malaysia berkumpul di jalan-jalan Ibukota Kuala Lumpur menolak Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). Panitia yang merupakan gabungan kelompok Muslim Melayu, Partai Islam Malaysia (PAS) dan United Malays National Organisation (UMNO) yang menyatakan setidaknya hadir 500 ribu peserta mengikuti acara yang dipusatkan di Dataran Merdeka pada Sabtu (8/12).

Demonstrasi itu sedianya ditujukan untuk memprotes rencana pemerintah meratifikasi perjanjian PBB yang menentang diskriminasi ras, yang menurut para pengecam perjanjian itu akan menyudahi keistimewaan etnis Melayu, yang dipertahankan lewat kebijakan-kebijakan afirmatif selama beberapa dekade. Rencana memprotes rencana ratifikasi itu dibatalkan, tetapi penyelenggara demonstrasi memutuskan untuk melanjutkan aksi yang mereka sebut sebagai "aksi bersyukur."

Malaysia merupakan satu dari sejumlah negara yang hingga kini belum meratifikasi ICERD. Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) ini mengutuk diskriminasi dan menyerukan kepada negara-negara untuk membuat kebijakan penghapusan diskriminasi rasial dalam berbagai bentuk. Para peserta aksi menganggap ICERD sebagai ancaman bagi hak-hak Islam dan Melayu di bawah Konstitusi Federal. ICERD dinilai bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, undang-undang Malaysia yang tercantum di dalamnya kontrak sosial yang mengistimewakan kaum Bumiputera Melayu.

Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohammad juga menegaskan bahwa meratifikasi ICERD adalah hal yang mustahil dilakukan oleh Malaysia. Ia beralasan, jika ICERD ditandatangani maka Malaysia harus merumuskan ulang Perlembagaan Persekutuan mereka.

Sementara itu, Ketua Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengatakan bahwa ICERD tidak dibutuhkan negaranya. Sebab, sebagai acuan, Islam dinilai lebih lengkap dan berkeadilan. Ia menilai acuan yang diberikan Islam lebih lengkap dan bersifat adil daripada yang dicanangkan oleh PBB sebagai badan internasional.

"Definisi berdasarkan Islam lebih lengkap dari (milik) internasional, kita (Islam)

lebih baik. Kita tidak perlu ICERD, mereka tidak lengkap, tidak cukup, dan mereka tidak adil," kata Ketua PAS tersebut.

Datuk Seri Abdul Hadi Awang juga mengkritik ICERD yang tak berfungsi saat dihadapkan dengan kebiadaban Israel terhadap Palestina, juga kekejaman Myanmar kepada etnis Muslim Rohingya.

"Israel dan Myanmar dibiarkan, apa kesalahan orang Islam, orang Islam tidak berbuat salah. Seharusnya dia (ICERD) justru ditujukan kepada negeri-negeri itu, jadi kita orang Islam tak boleh bersikap lemah menunjukkan kelemahan kita sendiri," tandasnya.

Anggota Dewan Tertinggi UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mengatakan PBB tidak memahami kekhasan Malaysia dibandingkan dengan negeri-negeri Islam lainnya seperti Arab Saudi dan Turki.

"Mereka tidak mengerti. Kami memiliki kekhasan sendiri. Orang Melayu adalah penduduk asli negara ini, dan kami memiliki ras lain imigran yang datang ke negara itu selama penjajahan oleh Inggris," ujarnya.

"Mereka dibawa untuk penambangan timah dan untuk menyadap karet. Menjelang kemerdekaan negara, kami diminta untuk menerima mereka dan kami dengan murah hati melakukannya," imbuh Tajuddin, seperti dikutip *New Straits Times*, Selasa (11/12/2018).

Dia lalu menjelaskan bahwa ada kontrak sosial yang ditandatangani antara Bumiputera dan non-Bumiputera, yang kemudian dimasukkan ke dalam Konstitusi Federal. Tanah Melayu telah dikenal, sebelum akhirnya menjadi Malaysia.

Bukan Hanya ICERD

Juru Bicara Hizbut Tahrir Malaysia (HTM) Abdul Hakim Othman memberikan catatan penting dengan aksi 812 Malaysia ini. Dia mengingatkan, penolakan ICERD seharusnya karena agama bukan karena masalah ras atau bangsa.

"Nasihat saya, jangan berhimpun atas dasar membela bangsa maupun mempertahankan Undang-Undang Dasar ciptaan Inggris. Jika saudara-saudara kita di Indonesia berhimpun semata-mata karena ingin membela Islam dan membela kalimah tau-

hid, maka kita juga seharusnya berhimpun atas dasar yang sama. Perbaiki niat dan tindakan, kerana kedua-duanya wajib seiring. Berhati-hatilah wahai saudaraku sekalian agar kita semua tidak terjermus ke lembah dosa, dan tidak terjebak ke dalam mainan politik pihak-pihak yang berkepentingan," katanya.

Abdul Hakim juga menegaskan ICERD adalah produk PBB yang tidak ada bedanya dengan produk PBB lainnya. Malaysia seharusnya bukan hanya menolak produknya tetapi juga keluar dari badan kufur internasional tersebut.

"ICERD adalah produk PBB dan PBB adalah sebuah badan kufur. Malaysia sepatutnya keluar dari badan kufur, bukannya menjadi anggota dan tunduk kepadanya," tegasnya dalam status di halaman Facebook Abdul Hakim Othman - Jurucakap HTM, dengan judul *8 Perkara yang Anda Perlu Sedar tentang ICERD*, Jumat (7/12/2018).

Malaysia selama ini telah meratifikasi banyak konvensi yang dikeluarkan oleh PBB, dan ratifikasi ini berlaku karena ketundukan Malaysia kepada badan kufur tersebut. Jadi, lanjut Abdul Hakim, walaupun Malaysia sudah membuat keputusan untuk tidak meratifikasi ICERD, pengakuan dan keanggotaan Malaysia dalam PBB itu sendiri merupakan sebuah keharaman.

"Malaysia wajib keluar dari semua badan kufur internasional karena ketundukan kepada badan dan undang-undang kufur adalah haram. Perlu dipahami bahwa sejarah berdirinya PBB itu sendiri adalah untuk menyalakan Islam," tegasnya menyebutkan poin yang pertama.

Menurutnya, Islam tidak mengakui segala macam bentuk undang-undang internasional karena pada faktanya memang tidak ada undang-undang internasional tersebut. Islam hanya mengakui adanya norma internasional ditandai dengan adanya duta dan konsulat negara asing.

"Sehingga, ICERD dan apa saja produk undang-undang yang keluar dari PBB baik berupa konvensi, protokol, piagam, resolusi dan sebagainya, semua ini adalah batil menurut Islam," tegasnya. **[af/joy]**

Islam Solusi Hilangkan Diskriminasi

Juru Cakap Hizbut Tahrir Malaysia (HTM) Abdul Hakim Othman menyebutkan tidak ada istilah "diskriminasi" dalam kamus Islam, dari aspek apa pun. Ini kerana segala hukum dan ajaran Islam itu datangnya dari Allah SWT dan Allah Mahaadil terhadap semua makhlukNya. Dari segi keimanan, Allah membedakan manusia hanya kepada dua kategori yaitu Muslim dan kafir dan Dia menetapkan hukum-hukumNya kepada Muslim dan juga kafir menurut kehendakNya. Muslim maupun non-Muslim wajib tunduk dan patuh kepada hukumNya. Dalam sejarah panjang pemerintahan Islam, sejak zaman Rasulullah SAW hingga Khilafah Utsmani yang mencakup hampir dua per tiga dunia, semua kaum, Muslim dan non-Muslim hidup harmoni dalam Negara Islam (Khilafah) tanpa diskriminasi.

"Malah telah terbukti yang non-Muslim turut mempertahankan hukum dan Negara Islam karena mereka menyaksikan dan merasakan sendiri akan keadilan hukum Islam yang diterapkan kepada mereka," ungkapanya. **[af/joy]**

Jejak Peradaban Emas di Era Khilafah Baitul Hikmah, Rumah Kebijaksanaan



Tudingan era kekhilafah adalah era kemunduran terbantahkan dengan keberadaan Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan (*House of Wisdom*) adalah perpustakaan, lembaga penerjemahan dan pusat penelitian yang didirikan pada masa Kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad, Irak.

Baitul Hikmah ini terletak di Baghdad, dan Baghdad ini dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa zaman keemasan Islam (*The golden age of Islam*). Karena sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam.

Rumah Kebijaksanaan ini merupakan salah satu institusi kunci dari gelombang masuknya literatur asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dianggap sebagai jembatan besar dalam transfer ilmu pengetahuan pada masa



zaman keemasan Islam. Perpustakaan ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya di masa kepemimpinan putranya, Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa pada 813-833 M yang mana perpustakaan ini disematkan sebagai usahanya.

Al-Ma'mun juga diakui usahanya dalam memunculkan banyak ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan dan budaya di Rumah Kebijaksanaan. Berpusat di Baghdad sepanjang abad ke-9 hingga ke-13, terdapat banyak ilmuwan di sana termasuk di antaranya orang-

orang dengan latar belakang Persia maupun Kristen yang ikut ambil bagian pada penelitian dan pendidikan di lembaga ini.

Selain menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, para ilmuwan yang memiliki hubungan dengan Rumah Kebijaksanaan juga banyak membuat kontribusi asli yang besar di berbagai bidang. Di bawah kepemimpinan Al-Ma'mun, observatorium didirikan, dan Rumah Kebijaksanaan telah menjadi pusat untuk studi humaniora dan ilmu pengetahuan yang terbaik pada abad pertengahan Islam, meliputi bidang matematika, astronomi, kedokteran, alkimia dan



kimia, zoologi, geografi dan kartografi. Juga dengan mengambil literatur-literatur dari India, Yunani, dan Persia, para ilmuwan di sana mampu mengumpulkan koleksi pengetahuan dunia secara massif.

Dan berdasarkan itu semua mereka membuat penemuan-penemuan mereka sendiri. Pada pertengahan abad ke-9 masehi Rumah Kebijaksanaan telah menjadi repositori terbesar dari buku-buku dunia.

Baghdad di era kejayaannya 1.200 tahun yang lalu merupakan ibukota kekhilafahan. Selama sekitar 500 tahun, kota ini membanggakan budaya intelektual dan budaya, reputasi yang diperoleh selama masa pemerintahan beberapa khalifah yang paling terkenal (Al-Rashid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tadhid dan Al-Muktafi). Sebagai salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia pada saat



itu, Baghdad memiliki kekayaan yang jauh melampaui harta yang ada. Kekayaan itu adalah Baitul Hikmah, sebuah akademi pengetahuan yang menarik otak dari jauh dan luas dari matematika dan astronomi hingga zoologi.

Baitul Hikmah menjadi akademi, pusat penelitian, pemikiran, dan debat dalam peradaban Muslim. Orang-orang dari seluruh dunia berbondong-bondong ke *House of Wisdom* - baik pria maupun wanita dari banyak agama dan etnis.

Melemahnya kekuasaan kekhilafahan menjadi salah faktor mundurnya keilmuan dalam Islam. Baitul Hikmah hancur dalam penyerangan Baghdad, invasi pasukan Hulagu Khan dari Mongol pada tahun 1258 M. Pasukan yang tak paham pentingnya ilmu ini membunuh dan menghancurkan Rumah Kebijaksanaan beserta seluruh literatur di dalamnya, bersama-sama dengan perpustakaan-perpustakaan lainnya di Baghdad. Pasukan Mongol ini membakar buku-buku dan melemparkannya ke Sungai Tigris. Sungai terkenal di Irak itupun bercampur tinta dan darah.[] **af** dari berbagai sumber

KRONIK MANCANEgara

Kafir Komunis Cina Tutup Sekolah Islam di Gansu

Kebijakan pembatasan kegiatan keislaman di Cina tak hanya berlaku di daerah otonomi Xinjiang Uighur, tapi juga daerah lain. Salah satunya di Provinsi Gansu.

Seperti diberitakan *eramuslim.com*, Sekolah Bahasa Arab Pingliang Gansu yang didirikan untuk siswa tidak mampu sudah menerima pemberitahuan dari dinas pendidikan kota untuk menghentikan aktivitas mulai 17 Desember. Institusi yang menerapkan sistem *boarding school* itu diperintahkan memulangkan 200 siswa dan 20 guru.

Namun para pejabat kota punya alasan lain, tidak menggunakan alasan kegiatan keagamaan, yakni sekolah tidak memiliki izin operasional. Anehnya, meskipun alasannya karena tidak ada izin, pemerintah baru menutup sekolah saat ini, padahal sudah beroperasi sejak 1984.

Pingliang merupakan kota kecil di perbatasan antara Gansu dan Provinsi Shaanxi, salah satu daerah termiskin di Cina. "Siswa kami semuanya berasal dari keluarga sangat miskin. Dengan sekolah bahasa, banyak lulusan kami mendapat pekerjaan seperti menjadi penerjemah untuk para pedagang Timur Tengah yang berbisnis di provinsi-provinsi seperti Guangdong. Jika sekolah ditutup, mereka pasti putus sekolah," kata seorang guru yang meminta namanya dirahasiakan, dikutip dari *South China Morning Post*, Ahad (9/12/2018).[]

Amerika Akan Hentikan Bantuan Militer ke Saudi untuk Serang Yaman?

Memang Senat Amerika Serikat (AS) menyetujui penghentian bantuan militer kepada Arab Saudi yang dipakai dalam menyerang Yaman. BBC seperti dikutip *kompas.com*, memberitakan pada Kamis (13/12/2018), resolusi yang digagas secara bipartisan itu lolos dengan perbandingan suara 56-41.

Melalui UU 1973, Senat meminta Presiden Donald Trump untuk menghentikan seluruh aktivitas personel militer AS yang berada di Yaman. Pengecualian diberikan kepada pasukan yang sedang bertugas untuk memerangi kelompok ISIS. November lalu, Washington memutuskan menghentikan pasokan bahan bakar jet tempur koalisi pimpinan Saudi untuk membombardir Yaman.

Meski di level Senat disahkan, resolusi itu terancam tidak akan menjadi undang-undang karena House of Representatives sudah memblokirnya Rabu lalu (12/12/2018). Sanders berharap House yang bakal dikuasai politisi Partai Demokrat bakal meloloskan resolusi tersebut ketika mereka dilantik Januari tahun depan.

Meski begitu, Trump sudah berjanji bakal memveto resolusi sehingga voting yang digelar Kamis terancam hanya menjadi aksi simbolik saja. Sejak konflik pecah pada 2014, PBB memaparkan ada 14 juta rakyat Yaman yang saat ini kelaparan, serta ribuan orang tewas.[]

Trump: Kami Dukung Pangeran MBS, Saudi Sekutu yang Baik



Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan tetap akan bertahan mendukung Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman.

Sikap Trump diambil, meski MBS dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2 Oktober di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Trump menolak berkomentar apakah putra mahkota benar-benar terlibat dalam pembunuhan itu. Tapi Trump hanya menegaskan dukungannya kepada MBS yang kini sebagai pemimpin *de facto* Kerajaan Arab Saudi.

"Pada saat ini, (saya) mendukungnya, dia pemimpin Arab Saudi, mereka sudah menjadi sekutu yang baik," kata Trump, Rabu (12/12) seperti diberitakan *republika.co.id*.

Trump memang mengutuk keras pembunuhan Khashoggi, kolonnis the Washington Post tersebut. Khashoggi dikenal sebagai penulis yang sering mengkritik pemerintahan MBS.

Tapi Trump kembali mengatakan, putra mahkota 'dengan keras menyangkal' terlibat dalam pembunuhan yang menggemparkan dunia tersebut.

Pada badan intelijen AS (CIA) dalam kesimpulan laporannya menyebutkan MBS menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematian Khashoggi. Namun Trump tak sepakat jika AS harus batal menjual senjatanya ke Saudi. Karena jika AS gagal memenuhi kontrak itu, maka industri militer Cina dan Rusia akan mengisinya.[] **joko prasetyo** dari berbagai sumber

Ilmuwan Baitul Hikmah

Beberapa ilmuwan yang dikenal dan memiliki hubungan dengan Baitul Hikmah di antaranya:

- Sahl bin Harun (w. 830), Kepala perpustakaan;
- Hunain bin Ishaq (809-873), ahli fisika;
- Muhammad bin Musa al-Khwarizmi (780-850), ahli matematika;
- Banu Musa bersaudara, teknisi dan ahli matematika;
- Sind bin Ali (w. 864), astronomer;
- Abu Utsman al-Jahiz, dikenal sebagai Al-Jahiz (781-861), penulis dan ahli biologi;
- Al-Jazari (1136-1206), ahli fisika dan teknisi.[]

Asas Persamaan di Muka Hukum

Dari Aisyah ra bahwa Quraisy terguncang dengan perkara seorang perempuan Bani Makhzum yang mencuri. Seseorang berkata, "Dan siapa yang bisa berbicara kepada Rasulullah SAW? Mereka berkata, "Dan (tidak ada) orang yang berani melakukannya kecuali Usamah bin Zaid, hibbu Rasulullah SAW. Lalu Usamah berbicara kepada beliau. Maka beliau bersabda, "Atasyfa'u fi haddin min hududillâh -apakah engkau memintakan pengampunan dalam salah satu had di antara hudud Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berpidato, beliau bersabda, "Innamâ ahlaka al-ladzina qablakum annahum kânû idzâ saraqâ fihim asy-syarifu tarakûhu wa idzâ saraqâ fihim adh-dha'ifu aqâmû 'alayhi al-hadda wa aymullâh law anna fâthimata ibnata muhammadin saraqat laqatha'tu yaddahâ -tidak lain yang membinasakan orang-orang sebelum kalian bahwa mereka jika orang mulia di antara mereka mencuri maka mereka biarkan. Dan jika orang lemah di antara mereka mencuri maka mereka tegakkan had. Dan demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya".

(HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, an-Nasai, redaksi al-Bukhari).

Sabda Rasul ini seperti dijelaskan dalam berbagai riwayat terjadi pada Fathu Makkah. Juga dijelaskan bahwa Nabi SAW memerintahkan agar tangan perempuan itu dipotong sebagai had atas pencurian itu.

Hadits ini memberikan beberapa pelajaran penting: Pertama, hadits ini menegaskan asas persamaan di muka hukum. Yakni semua orang punya kedudukan yang sama di muka hukum. Tidak seorang pun berada di atas

hukum. Tidak seorang pun yang punya hak istimewa kebal dari hukum.

Kedua, sabda Rasul SAW, "Dan demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya," merupakan retorika sangat kuat yang menegaskan asas persamaan di depan hukum itu. Sabda beliau itu menegaskan orang yang terdekat dengan penguasa sekali pun tetap tidak bisa lolos dari hukum.

Ketiga, hadits ini menegaskan, pelaksanaan hudud merupakan kewajiban dari Allah SWT. Desakan, pujian, komentar, bahkan cacian orang sekali pun tidak boleh memengaruhi pelaksanaan hukum sehingga menyimpang, baik menjadi lebih berat atau pun lebih ringan atau malah meloloskan orang dari hukum.

Keempat, dalam hal hudud, jika perkaranya sudah diajukan kepada khalifah atau hakim atau proses hukum sudah berjalan bahkan sudah ada vonis, maka tidak boleh ada pengampunan, baik dari korban atau penguasa.

Pertanyaan Rasul kepada Usamah "apakah engkau memintakan pengampunan..." merupakan istifhâm ingkari, yakni pertanyaan untuk mengingkari, merupakan uslub celaan yang menunjukkan ketidakbolehan apa yang ditanyakan itu.

Larangan pengampunan itu jika perkaranya sudah diajukan kepada khalifah atau hakim mewakili khalifah, artinya sudah diproses hukum. Adapun jika sebelum diajukan, maka jika seseorang mendapati orang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan hudud, dia boleh tidak mengajukannya ke proses hukum. Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya Abdullah bin Amru bin al-Ash, Nabi SAW bersabda: "ta'âfaw al-hudûda fimâ baynakum famâ balaghani min haddin faqad wajaba -Saling maafkanlah hudud diantara kalian, sebab kasus had yang telah sampai kepadaku maka telah wajib (dilaksanakan)-". (HR Abu Dawud, an-Nasai, al-Baihaqi, al-Hakim).

Sementara dalam kasus jinayat, maka korban atau

ahli waris korban boleh memberikan pengampunan atau memaafkan, baik sebelum kasus itu diajukan kepada imam, hakim atau pengadilan atau pun setelah diajukan. Rasul SAW bersabda: "Siapa saja yang terkena darah atau luka maka ia berhak memilih satu dari tiga pilihan: menuntut qishash, mengambil diyat (ganti rugi) atau memaafkan". (HR Ibnu Majah, Ahmad, al-Baihaqi, ath-Thabarani, Ibnu Abi Syaibah).

Jika satu kasus hudud atau jinayat sudah diajukan ke proses hukum, maka negara sama sekali tidak boleh memberi pemaafan atau pengampunan, baik kasus itu sedang diproses atau pun sudah dijatuhi vonis. Sebab negara bukan pemilik hak dalam hal itu. Hudud merupakan hak Allah. Sementara jinayat adalah hak adami, sehingga yang punya hak pemaafan atau pengampunan dalam jinayat adalah pemilik hak yaitu korban atau ahli waris korban.

Sementara untuk kasus ta'zir, maka jenis dan kadar sanksinya diserahkan kepada khalifah atau hakim mewakili khalifah untuk memilih dan menentukan sesuai koridor syariah. Dalam hal ini, khalifah atau hakim boleh saja memaafkan pelakunya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa kasus. Boleh juga khalifah atau hakim meringankan sanksinya hingga yang paling ringan sekali pun. Adapun jika sudah dijatuhi vonis, maka selanjutnya harus dijalankan.

Kelima, dalam hadits ini Rasul SAW memperingatkan bahwa penyimpangan terhadap pelaksanaan asas persamaan di depan hukum menjadi sebab kemunduran, kerusakan bahkan kebinasaan suatu kaum atau masyarakat.

Keenam, atas pentingnya pelaksanaan asas persamaan di muka hukum itu, hadits ini mengisyaratkan pentingnya komitmen kuat dari penguasa atas realisasi dan pelaksanaan asas tersebut. Wallâh a'lam bi ash-shawâb.[]

yahya abdurrahman

PPDB
2019/2020

Penerimaan Peserta Didik Baru
PONPES
AL JAWAHIR

PONDOK PESANTREN
AL JAWAHIR
Membina Mutiara Umat

MEMBUKA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

Tahun Ajaran 2019/2020

**Menerima Lulusan
SD/MI dan SMP/MTs
(KHUSUS PUTRI)**

aljawahir.id/ppdb

KH. Ruslan Gunawan Djawahir
Mudir Ponpes Al Jawahir

Kurikulum Pondok Pesantren Al Jawahir

Pondok Pesantren Al Jawahir memiliki kurikulum yang akan mempersiapkan para santri untuk bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi Islam ternama khususnya di Mesir dan Timur Tengah.

- ☉ Bahasa Arab
- ☉ Tahfidz Al Qur'an
- ☉ Fiqh Dasar dan Lanjutan
- ☉ Tsaqofah Islam

Alamat:
Jl. Otista Gg. Lurah No. 2 Sasaktinggi Ciputat Tangerang Selatan 15411

ponpes.aljawahir.id
@aljawahir.id

aljawahir.id
info@aljawahir.id

0895 6152 20764
aljawahir.id/maps

Syahara
your travel

ATTMI
Asosiasi Tour & Travel Muslim Indonesia



**HARGA MULAI
USD 1.600**

*Pendamping ke Tanah Suci
Meniti Jejak Peradaban Nabi*

Pembimbing Utama
KH. Drs. Hafidz Abdurrahman, MA

Program Umroh	Jadwal
Spesial	18 Maret '19, 15 April '19
Plus Turki (3n4d)	25 Mar '19
Plus Mesir, Yordan, dan Aqsha	28 Jan '19
Plus Thaif (12h)	23 Feb '19
Awal Ramadhan	06 Mei '19
Syawal	18 Jun '19

HOTLINE :
0812-1885-7851 | 0856-9876-300
0858-4002-4486 | 0877-7029-3564
0251-7595-928

Kantor: Bukit Cimanggu City B1 No.2,
Jl. KH. Shaleh Iskandar Bogor
Email: 4syahara@gmail.com
Web: www.syahara.co.id

dengan beriklan
di Media Umat, Insha Allah
produk Anda
akan dikenal oleh
lebih dari **150.000**

pembaca **Tabloid**
Media Umat
yang tersebar di seluruh
penjuru nusantara

Dapatkan Discount Special

TARIF IKLAN

URAIAN	UKURAN	HARGA
1 Halaman Back Cover	255 X 370 mm	Rp 20,000,000
1 Halaman Dalam	255 X 360 mm	Rp 16,000,000
½ Halaman Dalam	255 X 180 mm	Rp 8,000,000
1/4 Halaman Dalam	125 X 180 mm	Rp 4,000,000
1/8 Halaman Dalam	125 X 90 mm	Rp 2,000,000
1/16 Halaman Dalam	125 X 45 mm	Rp 1,000,000
Advetorial 1 Halaman	255 X 360 mm	Rp 11,000,000
Center Spread (2 Halaman)	520 X 360 mm	Rp 36,000,000

Iklan, hubungi:
0857 1713 5759 (Telp/ WA)
email: iklan.tabloidmu@gmail.com,
www.mediaumat.com



KETENTUAN IKLAN

- Materi diserahkan selambat-lambatnya 1 minggu (7 hari) sebelum terbit.
- Materi iklan dalam bentuk softcopy dengan format CDR, JPG, TIF resolusi 300 dpi, CMYK.
- Desain iklan menjadi tanggung jawab pihak pemasang iklan.
- Materi iklan tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam, serta tidak menyinggung hak cipta orang lain dan tidak memuat hal-hal yang dianggap fitnah, penghinaan, atau merugikan nama baik pihak lain.
- Pihak pemasang bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terjadi gugatan oleh pihak lain atas isi materi iklan tersebut.
- Pembayaran dilakukan maksimal 1 minggu sebelum terbit.
- Pembayaran di transfer ke Rekening:
- BNI Syariah: 0245 8009 73 atau BSM: 7000 5898 47 An. Budi Darmawan.





Insantama
SEKOLAH ISLAM TERPADU

Misi SIT Insantama adalah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang memadukan aspek pembentukan syakhsiyah Islamiyyah, penguasaan tsaqafah Islam dan Ilmu Kehidupan dalam suasana pendidikan yang religius serta didukung oleh peran serta masyarakat.



SDIT INSANTAMA



SMPIT INSANTAMA



SMAIT INSANTAMA



Penampilan siswa SMAIT Insantama di depan Dubes RI untuk New Zealand saat program LKMA 2018 *Advance to New Zealand*

ISLAMIC
BOARDING
SCHOOL

Mari Bergabung Bersama
PARA JUARA DAN CALON PEMIMPIN

PPDB 2019/2020

MASA PENDAFTARAN
1 - 31 DESEMBER 2018



Dibuka pendaftaran online melalui
ppdb.insantama.sch.id

KONTAK KAMI
0821.2000.2020



Ustadz Abdul Somad

Kalau kau tidak bisa ngajar anak-anakmu (karena kesibukanmu), sekolahkan saja anak-anakmu ke Sekolah Islam Terpadu Insantama. Insya Allah anak-anakmu akan selamat.



Dr. Bima Arya (Walikota Bogor)

Tidak banyak sekolah yang didesain dengan tujuan yang jelas, target yang tegas dan secara terbuka mengatakan bahwa ini adalah Kampus Para Juara dan Calon Pemimpin.



Hj. Irene Handono

Insantama adalah sekolah favorit, siswa-siswinya bisa diandalkan menjadi generasi pemimpin-pemimpin yang akan datang.



KAMPUS PUSAT
BOGOR JAWA BARAT

Jl. Hegarmanah IV
Gunung Batu Kota Bogor

INSANTAMA
HADIR PULA
DI 20 KOTA
INDONESIA

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 01. Serang | 11. Malang |
| 02. Banjar | 12. Tangerang Selatan |
| 03. Bekasi | 13. Jember |
| 04. Banjar Baru | 14. Padang |
| 05. Makassar | 15. Pangkalpinang |
| 06. Cilegon | 16. Pontianak |
| 07. Leuwiliang | 17. Situbondo |
| 08. Bandar Lampung | 18. Bandung |
| 09. Kendari | 19. Blitar |
| 10. Ternate | 20. Banjarmasin |

www.insantama.sch.id | **SEKOLAH PARA JUARA DAN CALON PEMIMPIN**